

**Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di  
Kabupaten Sidoarjo**

**(Studi pada Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

**FANDY EKA ARDIANTO**

**NIM.135030107113032**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2017**

## MOTTO

**BOLEH MENANGIS BUKAN KARENA HIDUP SUSAH, BOLEH  
TERTAWA BUKAN KARENA UANG SEMATA, MAKA  
NIKMATILAH HIDUP TERLALU BERHARGA.**



## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)  
di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Relokasi PKL dari Alun-alun  
ke GOR Sidoarjo)

**Disusun Oleh** : Fandy Eka Ardianto

**NIM** : 135030107113032

**Fakultas** : Ilmu Administrasi

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Publik

**Konsentrasi** :-

Malang, 22 Desember 2017

Komisi Pembimbing,

Ketua



**Dr. Suryadi, MS**

**NIP. 19601103 198703 1 003**

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Januari 2018  
Jam : 11.00 – 12.00 WIB  
Skripsi atas Nama : Fandy Eka Ardianto  
Judul : Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo)

Dan dinyatakan **LULUS**

Malang, 15 Januari 2018

### MAJELIS PENGUJI

Ketua



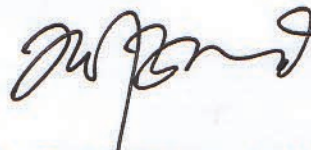
**Dr. Suryadi, MS**  
**NIP. 19601103 198703 1 003**

Anggota



**Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS**  
**NIP. 19540306 197903 1 005**

Anggota



**Dr. Endah Setyowati, M.Si**  
**NIP. 19710505 199903 2 001**



## PERYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 22 Desember 2017



4C3DBAEF853955360

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Randy Eka Ardianto

135030107113032

## RINGKASAN

**Fandy Eka Ardianto, 2017. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi pada Relokasi PKL dari Alun-Alun Ke GOR Sidoarjo) 1) Dr. Suryadi, MS 189 Hal + XVI**

Penyebaran PKL di Kabupaten Sidoarjo mulai menunjukkan gejala kurang terkendali, yang berdampak beralihnya fungsi suatu kawasan dalam hal ini adalah kawasan Alun-alun. Kawasan Alun-alun kota yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan dan merupakan Ruang Terbuka Hijau beralih fungsi menjadi pusat perekonomian menengah ke bawah. Kebijakan Relokasi PKL dari Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo Ke GOR yang dilakukan di Kabupaten diharapkan dapat mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjambratan. Selain itu, penataan dan pemberdayaan PKL juga mampu mendukung inovasi dan kreatifitas dalam sektor ekonomi maupun sektor pariwisata daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Penelitian dilakukan dengan melakukan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke kawasan GOR Delta Sidoarjo merupakan mekanisme kebijakan yang Pemerintah Daerah dalam menertibkan dan menata kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh PKL dikawasan Alun-alun yakni melalui Sosialisasi dan Pendataan, Penetapan Lokasi Usaha, serta Kegiatan Pembinaan. SDM yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke kawasan GOR Delta Sidoarjo juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Pembina PKL, Pihak Swasta, Ketua Paguyuban PKL serta masyarakat, Disposisi atau sikap pelaksana didalam mendukung kebijakan relokasi PKL belum berjalan dengan baik dimana terlihat adanya kegiatan berjualan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh PKL meskipun pkegiatan PKL dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo. (2) Faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke kawasan GOR Delta yakni keterbatasan jumlah SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo serta rendahnya kesadaran para pedagang kaki lima untuk menaati hukum. Mengacu pada hasil analisis tersebut terdapat 2 saran yaitu, 1) Pemerintah daerah Sidoarjo yang dalam hal ini DLHK serta Satpol PP perlu meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas para PKL. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan petugas jaga secara bergantian serta pos jaga selama 24 jam. 2) Seluruh OPD yang ditunjuk didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL seharusnya melibatkan peran dari masyarakat dalam melakukan kontrol. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kontak saran ataupun membuka layanan pengaduan yang dapat diakses melalui nomor hp ataupun melalui aplikasi pesan online (*Line* atau *WA*) sebagai sarana penyampaian keluhan dari implementasi kebijakan relokasi PKL.

***Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Relokasi, Pedagang Kaki Lima (PKL)***

## SUMMARY

**Fandy Eka Ardianto, 2017. RELOCATION POLICY IMPLEMENTATION OF FIVE FOOTWEARS IN SIDOARJO REGENCY (Study at PKL Relocation from Alun-alun to GOR Sidoarjo) 1) Suryadi,DR., MS 189 Pages + XVI**

The spread of street vendors in Sidoarjo regency began to show less controllable symptoms, which impacted the switch function of a region in this case is the area of Alun-alun. The area of the town square which is supposed to be the center of government and the Green Open Space switches the function of being the center of the middle to lower economy. The PKL Relocation Policy from the Sidoarjo Regency Square to the GOR conducted in the District is expected to prevent traffic congestion, as well as to prevent crime such as pickpocketing and mugging. In addition, structuring and empowerment of street vendors are also able to support innovation and creativity in the economic sector as well as the regional tourism sector.

The research method used is descriptive research with qualitative approach. Techniques of collecting data through interviews, observation and documentation. Data analysis used is interactive data model analysis from Miles, Huberman and Saldana. Research done by conducting Interview, Observation and Documentation.

The results of this study indicate that (1) Implementation of the PKL relocation policy from the square to the Delta GOR of Sidoarjo is a policy mechanism that the Regional Government in disciplining and organizing the trade activities conducted by the street vendors in the Alun-alun that is through Socialization and Data Collection, Determination of Business Location, as well as Coaching Activities. The human resources involved in implementing the PKL relocation policy from the square to the Delta GOR area of Sidoarjo also involves Satpol PP (Satpol PP), PKL Development Team, Private Parties, Head of Paguyuban PKL and the community. Disposition or executive attitude in supporting the PKL relocation policy has not been running well where there is a clandestine selling activity conducted by street vendors even though PKL activities are transferred to GOR Delta Sidoarjo. (2) Inhibiting factor in the implementation of PKL relocation policy from the square to Delta GOR is limited the number of human resources in Dinas Environment and Hygiene and Civil Service Police Unit of Sidoarjo Regency and low awareness of street vendors to obey the law. Referring to the results of the analysis there are 2 suggestions that is, 1) Sidoarjo local government in this case DLHK and Satpol PP need to improve control and supervision of the activities of street vendors. This can be done by placing the guard officers alternately as well as the guard post for 24 hours. 2) All OPD appointed in implementing the PKL relocation policy should involve the role of the community in exercising control. This can be done by making contact suggestions or opening a complaint service that can be accessed via hp number or through online message application (Line or W'A) as a means of delivering complaints from the implementation of PKL relocation policy.

**Keywords: Policy Implementation, Relocation, Street Vendors**

## Halaman Persembahan

Terima Kasih Kepada Allah SWT atas berkah dan nikmat yang telah kau berikah setiap hari.

### Karya ini kupersembahkan kepada

Papa Hendy Ardianto dan Mama ku tersayang Sri Sulastri, Kakek Toekiran, Alm. Nenek Soelasih, Adik Cindy Leonita Twain Ardianto yang selalu memberikan semangat,dukungan dan doa



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo” (Studi pada Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo) yang diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya .
4. Bapak Dr. Drs. Suryadi, MS., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Harindra Djajati, SH, MM selaku Sekretaris dan Bapak Ir Moch. Rochjadi Hafiluddin selaku Seksi Pertamanan serta Keluarga Besar Dinas



Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang selalu memberikan motivasi dan arahan didalam penyusunan skripsi ini.

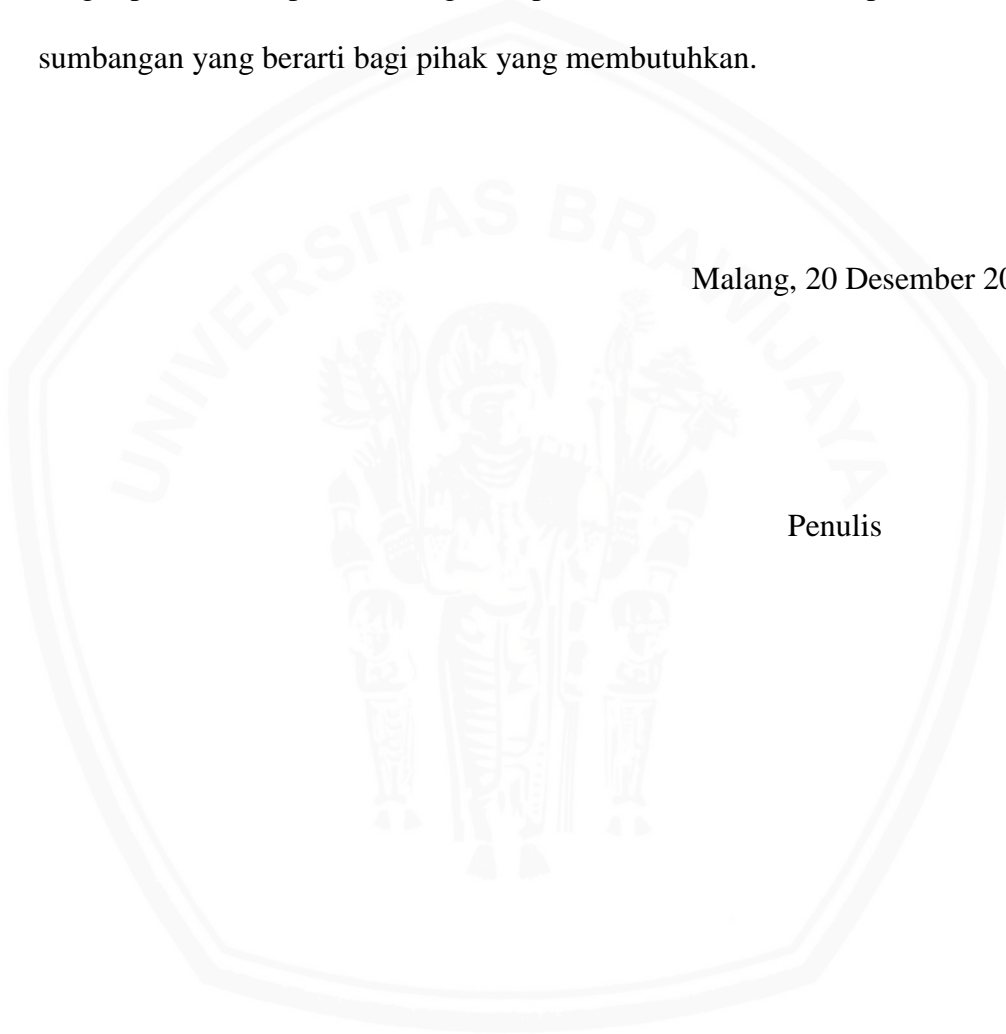
7. Ibu Asfiatul Hanifah, SP selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Bapak Willy Radyto, S.STP serta Keluarga Besar Satpol PP Kabupaten Sidoarjo yang selalu memberikan motivasi dan arahan didalam penyusunan skripsi ini.
8. Orang tua penulis Bapak Hendy Ardianto dan Ibu Sri Sulastris serta Kakek Toekiran, Alm. Nenek Soelasih dan Adik Cindy Leonita yang telah memberikan doa terbaik, dukungan moril, kasih sayang serta semangat yang tiada hentinya sehingga penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Allen Ayu Oktavianda sebagai pacar yang setia mendukung dan menemani saya dalam menyusun penulisan skripsi ini, dan sahabat saya Aditya Dimas aka Magamon, Neddiar aka Sam, Yoseph Wijaya aka Tape, yang terakhir Clara Chyntia aka Bigos yang selalu menghibur dan mengajarkan hal-hal yang baik maupun tidak baik.
10. Teman saya Anastasia dan teman-teman satu kontrakan, Hafidz, Alvin, Angga, Fendy, Aufa, Ari Tongji, dan kucing kesayangan Inyo, Onyi, Alm. Jojo, yang selalu menghibur dari bangun tidur sampai tidur lagi.
11. Anugerah Family Alfian, Bayu Insan, Kukuh, Gusti, Biyou, Akbar, Malik yang telah menjadi keluarga kecil di perantauan.

12. Teman-teman FIA PUBLIK UB 2013, Basket FIA dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Desember 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kontribusi Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>2.1 Kebijakan Publik .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....</b>	<b>14</b>
2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	17
2.1.3 Model Perumusan Kebijakan Publik .....	18
<b>2.2 Implementasi Kebijakan .....</b>	<b>22</b>
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	22
2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik .....	24
<b>2.3 Pedagang Kaki Lima (PKL) .....</b>	<b>31</b>
2.3.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	31
2.3.2 Karakteristik PKL Berdasarkan Jenis Dagangan.....	32
2.3.3 Karakteristik PKL Berdasarkan Sarana Jual yang Dipergunakan.....	33
2.3.4 Pola Penyebaran Aktivitas PKL .....	36
2.3.5 Pembangunan Ruang terhadap PKL .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Fokus Penelitian .....	45

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian .....	46
3.4 Sumber Data dan Jenis Data .....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.6 Instrumen Penelitian.....	52
3.7 Analisis Data .....	54
3.8 Keabsahan Data.....	56

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo .....	61
4.1.2 Gambaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo .....	69
4.1.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo .....	75
4.1.4 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima pada Gelanggang Olahraga (GOR) Sidoarjo .....	80
4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian .....	81
4.2.1 Implementasi Kebijakan Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo .....	81
4.2.1.1 Sosialisasi dan Pendataan.....	89
4.2.1.2 Penetapan Lokasi Usaha.....	93
4.2.1.3 Kegiatan Pembinaan.....	99
a. Komunikasi.....	104
b. Sumber daya .....	111
c. Disposisi .....	121
d. Struktur Birokrasi .....	127
4.2.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo.....	131
4.2.2.1 Keterbatasan Jumlah Aparatur DLHK Maupun Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo .....	132
4.2.2.2 Rendahnya Kesadaran Para Pedagang Kaki Lima Untuk Menaati Hukum .....	136
4.3 Analisis Data .....	140
4.3.1 Implementasi Kebijakan Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo .....	140
4.3.1.1 Sosialisasi dan Pendataan .....	147
4.3.1.2 Penetapan Lokasi Usaha .....	150
4.3.1.3 Kegiatan Pembinaan .....	154
a. Komunikasi.....	159
b. Sumber daya .....	165
c. Disposisi.....	171
d. Struktur Birokrasi.....	175
4.3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo .....	178

4.3.2.1 Keterbatasan Jumlah Aparatur DLHK Maupun Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo .....	178
4.3.2.2 Rendahnya Kesadaran Para Pedagang Kaki Lima Untuk Menaati Hukum.....	181
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>184</b>
5.1 Kesimpulan .....	184
5.2 Saran .....	185
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>186</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Sekuensi Implementasi Kebijakan. ....	22
2	Mekanisme Implementasi Kebijakan .....	23
3	Model Implementasi Goggin .....	27
4	Model Proses Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Meter .....	28
5	Peta Kabupaten Sidoarjo .....	62
6	Lambang Kabupaten Sidoarjo .....	63
7	Dialog antara DLHK yang dilakukan bersama dengan Para PKL yang menempati GOR Delta, 2015 .....	107
8	Pelatihan dan Sosialisasi Bagi Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Serta Satuan Pol PP Kabupaten Sidoarjo .....	115
9	Kegiatan Berjualan PKL yang masih dilakukan disekitaran Alun-Alun Sidoarjo, 2017 .....	125
10	Struktur Organisasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo .....	127
11	Kegiatan berjualan yang dilakukan oleh PKL dikawasan Alun-alun .....	130



**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Kontribusi Jumlah PKL di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2016.....	8
2	Daftar Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo .....	62
3	Data Kependudukan Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan Tahun 2015 .....	68
4	Jumlah Aparatur dalam Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 .....	80
5.	Jumlah Pegawai DLHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	113
6.	Jumlah Pegawai DLHK dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 .....	135



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian
2	Kegiatan Wawancara Peneliti di Lapangan
3	Surat Riset
4	<i>Curriculum Vitae</i>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perspektif Otonomi Daerah yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hasil evaluasi atas penyelenggaraan sistem pemerintahan sentralisasi yang dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan didalam penyelenggaraan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sentralisasi yang mengakar didalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berimbas pada menumpuknya kekuasaan pemerintah pusat, melainkan juga menghambat proses pembangunan yang ada di daerah. Sobandi dkk, (2005:112)

Lahirnya otonomi daerah sendiri memberikan implikasi di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Widjaja, (2005:99) menambahkan bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi,

kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman serta kemajemukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 14 menjelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tjokroamidjojo (1984:49) mengungkapkan bahwa Dengan adanya pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Primiana (2009:12) mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan dan penataan kota seringkali mengabaikan pergerakan aktivitas penduduk kota yang dinamis, sehingga perencanaan pembangunan dan penataan kota yang telah dibuat menjadi usang dan tidak mampu mengatasi perkembangan ekonomi masyarakat yang demikian cepat. Perkembangan pembangunan kota tidak dapat lepas dari keberadaan para pelaku ekonomi yang didalamnya termasuk para Pedagang kaki lima yang saat ini keberadaanya sangat dilematis. Munculnya pedagang kaki lima di hampir sudut kota telah menimbulkan masalah baru dan menyulitkan pemerintah kota dalam melakukan penataan. Pedagang kaki lima banyak yang berjualan pada tempat yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan kesemrawutan.



Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana Menurut Primiana (2009:13), potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pedagang Kaki Lima Menurut Kartono dkk, (1980:7) adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum yang mana usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Kegiatan yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Kartono dkk, (1980:8) secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Keberadaan PKL di lingkungan kota besar Menurut Dimara (1979:44) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil khususnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Menurut Kurniadi dan Tangkilisan (2002:14), akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap para PKL marak terjadi dimana para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di sekitaran Alun-alun Sidoarjo ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain karena dalam perkembangannya. Kurniadi dan Tangkilisan (2002:15) menambahkan bahwa keberadaan PKL di kawasan perkotaan seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan dibadan jalan. Sehingga keberadaan mereka sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat kondisi arus lalu lintas para pengguna jalan.

Kehadiran PKL Menurut Permadi (2007:12) merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kabupaten Sidoarjo. Permadi (2007:12) mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain itu ada juga PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika suatu saat akan ditata. PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Jika pemerintah

melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka menjadi sasaran penggusuran dan penertiban.

Kurang efektif apabila pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Pemkab Sidoarjo hanya menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pedagang kaki lima tanpa adanya penataan dan pemberdayaan terhadap para PKL. Para PKL perlu ditata lebih lanjut agar mampu lebih dan tetap berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan di daerah. penataan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta dapat menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru dan penumbuhan daya saing.

Pemerintah daerah Menurut Permadi (2007:14) memiliki wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki sehingga dengan munculnya fenomena PKL dan segala akibatnya yang hingga kini telah muncul di Kabupaten Sidoarjo menuntut dan menekankan akan peran pemerintah daerah untuk melindungi, memberdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat

meningkatkan kesejahteraannya serta untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum sesuai dengan apa yang diamanatkan didalam Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelumnya telah menerbitkan regulasi yaitu Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. dalam kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih saja banyak PKL melakukan kegiatan jual beli di Alun-alun Sidoarjo. Penyebaran PKL di Kabupaten Sidoarjo mulai menunjukkan gejala kurang terkendali, yang berdampak beralihnya fungsi suatu kawasan dalam hal ini adalah kawasan Alun-alun. Kawasan Alun-alun kota yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan dan merupakan Ruang Terbuka Hijau beralih fungsi menjadi pusat perekonomian menengah ke bawah. Para pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan pantauan peneliti, kegiatan jual beli berlangsung tidak pada tempatnya dan belum mempunyai izin usaha yang akhirnya menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dikarenakan selain tidak mendapatkan ijin untuk berjualan pada kawasan-kawasan yang sudah ditentukan, para PKL masih terlihat menggunakan bahu jalan hingga Trotoar jalan sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas jual beli (*Jawa Pos : Sidoarjo, Edisi hari senin tanggal 11 Juli Tahun 2017*)

Berkaitan dengan penataan PKL ini, telah diatur secara tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dalam Permendagri tersebut memuat penjelasan mengenai segala peraturan tentang status, kewajiban serta lokasi aktivitas dari PKL ini di atur. Di dalam penataan PKL di Kabupaten Sidoarjo, dipandang perlu untuk dikelola dan ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara masyarakat mengenai keberadaan PKL di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini pula penanganan tentang kepastian hukum untuk fasilitas-fasilitas umum yang biasanya ditempati oleh para PKL agar lebih dijamin oleh pemerintah. Fasilitas umum tersebut untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan individu atau sekelompok orang, serta dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang banyak.

Pembangunan pasar di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya dapat menampung para PKL agar dapat berdagang tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan disekitarnya seperti halnya Alun-alun Sidoarjo dan tempat-tempat keramaian umum seperti pada Taman Pinang serta seputaran jalan gading fajar. Para PKL menggap bahwa kegiatan berjualan yang mereka lakukan hanya untuk mencari rezeki dan nafkah tanpa didasari dengan sebuah pertimbangan akan kerugian yang timbul dari aktivitas berdagang yang dilakukan. kehadiran para PKL baik yang berjualan di sekitaran Alun-alun Sidoarjo maupun Taman Pinang serta seputaran jalan gading fajar tidak hanya berdampak negatif saja, manfaat yang menguntungkan dapat dirasakan bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah atau rendah karena mereka bisa mendapatkan barang yang



terjangkau dengan harga murah. Adapun kerugian bagi masyarakat misalnya menimbulkan kemacetan di jalanan kota, tempat sarana publik seperti halnya yang terjadi di pusat Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, keberadaan para PKL merusak pemandangan taman kota, fasilitas penunjang dan tempat-tempat disekitaran Alun-alun. (<http://radarjatim-seputarsidoarjo.co.id>:2017)

Jumlah PKL dalam perkembangan waktu memang sulit ditekan dan menempati lokasi publik, karena pedagang sektor informal seperti mereka ini lebih mudah ditemukan oleh para konsumennya ketimbang para pedagang yang bertempat tetap dan resmi. Sehingga dalam hal ini para konsumen digampangkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat eceran. Para PKL cenderung menjual barang dagangan yang lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah daripada di toko-toko swalayan. Berikut ini merupakan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) selama 4 tahun terakhir yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1 Jumlah PKL di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2016**

No	Tahun	Jumlah
1	2013	5.355 PKL
2	2014	6.472 PKL
3	2015	6.908 PKL
4	2016	8.201 PKL

Sumber : [www.perdagangan.sidoarjokab.go.id](http://www.perdagangan.sidoarjokab.go.id):2017

berdasarkan data jumlah PKL yang ada di Kabupaten Sidoarjo diatas, dapat dikatakan bahwa perkembangan jumlah Pedagang kaki lima yang ada di Kabupaen Sidoarjo pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang

sangat besar di setiap tahunnya. seharusnya pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya PKL, dan juga dalam penerbitan kebijakan (Perda) tentang penertiban PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, penyediaan tempat-tempat khusus bagi para PKL perlu dilakukan agar mereka bisa tetap berjualan tanpa harus mendapatkan pengusuran maupun penertiban. Kebijakan Relokasi PKL dari Alun-alun Kabupaten Sidoarjo Ke GOR yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjam-bretan. Selain itu, penataan dan pemberdayaan PKL juga mampu mendukung inovasi dan kreatifitas dalam sektor ekonomi maupun sektor pariwisata daerah. ([www.mediacenter.sidoarjokab.go.id](http://www.mediacenter.sidoarjokab.go.id) : 2017)

Pada satu sisi para Pedagang Kaki Lima menghendaki suatu tempat yang luas dan strategis dalam mencari rejeki sebagai sumber penghidupannya dan juga agar pekerjaan mereka tidak terganggu lagi dengan adanya kegiatan pengusuran yang dilakukan oleh Satpol PP. Sedangkan di sisi lain, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan (Perda) bertujuan dalam rangka menciptakan daerah/kota yang bersih dan tertib dari PKL, khususnya di daerah Kabupaten Sidoarjo. Adanya bentuk kontradiktif dari penataan dan pemberdayaan PKL yakni dengan melakukan relokasi terhadap sejumlah PKL ke GOR Delta Sidoarjo yang menurut beberapa PKL sangatlah tidak tepat dan kurang strategis. inilah yang mengakibatkan keresahan dari semua komponen masyarakat khususnya bagi para

PKL. Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk memilih judul **“Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Pada Kebijakan Relokasi PKL Dari Alun-alun Ke GOR Sidoarjo)”** Karena peran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan merupakan salah satu hal yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah terimplementasikan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, serta masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kabupaten Sidoarjo harus berperan aktif dan bekerja sama didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Sidoarjo. berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang ingin di pecahkan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo?
2. Apa sajakah faktor penghambat yang timbul didalam proses implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat yang timbul didalam proses implementasi kebijakanrelokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo.

#### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat secara umum yaitu sebagai berikut:

##### **1.4.1 Secara akademis**

- a. Bagi penulis

Manfaat akademis yang ingin diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh kajian terkait dengan Implementasi Kebijakan yang dalam hal ini tentang implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun para pedagang kaki lima dalam implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo yang diharapkan nantinya akan menjadi sebuah terobosan bagi penataan lingkungan yang lebih teratur serta meningkatkan pendapatan maupun taraf hidup para pedagang kaki lima. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir ilmiah dan logis dengan membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

### 1.4.2 Secara Praktis

#### a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi umpan masuk bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo.

#### b. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam judul atau topik yang sama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika penulisan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat. Adapun sistematika penulisan dapat dirinci sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada Bab ini, dijelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi serta Sistematika Penulisan Proposal Skripsi.

#### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini menjelaskan dan menguraikan terkait konsep-konsep, Teori-teori dari Beberapa Sumber Referensi seperti Buku,

Jurnal serta Hasil Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi) yang relevan dengan Pokok masalah didalam Penelitian Sehingga dapat Mendukung dan menganalisa data yang diperoleh dilapangan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, menjelaskan Tentang Metode-metode yang digunakan didalam Proposal Penelitian ini. didalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, lokasi dan situs Penelitian, Jenis Dan Sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, Instrumen Penelitian, Analisis Data serta Keabsahan Data.

**BAB IV** Bab ini merupakan bab yang menguraikan dan menjelaskan seluruh hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dilakukan, ditambah dengan pembahasan data yang merupakan hasil analisa data.

**BAB V** Merupakan bab akhir dalam penulisan bab ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.yang diajukan untuk perbaikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Duncan Mac Rae, Jr, dan James A. Wilde dalam Islamy (2003:42) memberikan definisi policy and public policy sebagai berikut :

*“A chosen course of action significantly affecting large numbers of people is a policy, if chosen by government, it is public policy”.*

Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Dye dalam Islamy (2003:43), mengartikan kebijakan publik sebagai *“The Authoritative allocation of value for the whole society”*. Pendapat yang pertama lebih menekankan pada aspek-aspek "tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berpengaruh terhadap sejumlah besar orang". Sedangkan pendapat yang kedua menunjukkan wujud tindakan itu berupa “pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif” oleh pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas serta perannya sebagai pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengalokasikan sumber-sumber daya dan mampu memanami setiap masalah-masalah publik secara efisien. Pemerintah juga seharusnya mampu melihat secara jelas kegagalan-kegagalan yang tengah terjadi dalam ruang lingkup publik, baik dalam pemenuhan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur



sehingga mampu mencapai produk kebijakan publik yang berkualitas bahkan berkontinuitas.

Kebijakan publik menurut Friedrich dalam Agustino (2008:35) mengatakan bahwa

“Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Hampir sama halnya dengan salah satu definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Eyeston dalam Winarno (2014:23) bahwa secara luas kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Pada dasarnya suatu kebijakan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan keterkaitan antara pemerintah, masyarakat serta lingkungannya. Dalam suatu konsep kebijakan publik mengandung implikasi didalamnya. Karakteristik yang dimiliki kebijakan publik menurut Anderson dalam Winarno (2014:24) sebagai berikut :

- a) Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan dan maksud tertentu, tertata secara terukur. Kebijakan publik berarti bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, akan tetapi proses perencanaan yang matang oleh aktor-aktor kebijakan terkait.
- b) Suatu kebijakan publik disusun tidak hanya sebagai produk tertulis akan tetapi melalui tahap penerapannya dan pelaksanaannya. Artinya, tidak

secara formalitas suatu kebijakan berdiri, akan tetapi memiliki tahapan dukungan dalam proses pelaksanaan.

- c) Dalam suatu kebijakan publik juga telah mempertimbangkan hal yang akan atau dapat terpakai setelah kebijakan itu diimplementasikan.
- d) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Dalam hal ini keterkaitan terhadap aktor yang dilibatkan dalam menentukan kebijakan.
- e) Kebijakan publik mempunyai sifat yang memaksa secara sah dimana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Kebijakan publik pada awalnya bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk dimengerti. Akan tetapi sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan yang dapat dimengerti secara baik bila dipaparkan dalam beberapa kategori yaitu :

- 1) *Policy demands* atau permintaan kebijakan merupakan permintaan atau kebutuhan yang dibuat oleh warga masyarakat secara personal atau kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan.
- 2) *Policy decision* atau putusan kebijakan ; merupakan putusan yang dibuat oleh pejabat politik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan.
- 3) *Policy statements* atau pernyataan kebijakan; merupakan ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan.
- 4) *Policy output* atau hasil kebijakan ; merupakan “perwujudan nyata” dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut

keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat dikatakan bahwa *output* kebijakan adalah terhadap apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

- 5) *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan ; merupakan konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

### 2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Wahab (2014:17), pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*a unique activity*), dalam artian ia memiliki ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lain. Pernyataan ini membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik, yang secara rinci akan dijelaskan dibawah ini :

1. kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekadar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak, asal-asalan, dan serba kebetulan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukanlah keputusan-keputusan yang berdiri sendiri .

3. Kebijakan itu adalah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, kebijakan mungkin meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimanapun campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat dibutuhkan. Dengan kata lain ada ataupun tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat saja merupakan sebuah pilihan ataupun kebijakan yang diambil.

### **2.1.3 Model Perumusan Kebijakan Publik**

Perumusan kebijakan merupakan hal yang sangat penting dari suatu kebijakan publik. Perumusan kebijakan merupakan suatu fase yang mendasar dan utama dalam proses kebijakan publik. Dalam hal ini akan dirumuskan apa yang menjadi batasan serta cakupan dalam menentukan suatu kebijakan. Proses perumusan kebijakan publik bukan hanya sebagai bentuk formalitas adanya suatu kebijakan, akan tetapi tentang seberapa akuntabel pemerintah dalam menjamin kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut model perumusan kebijakan dalam Nugroho (2012:545), dibagi menjadi beberapa model diantaranya :

a) Model Kelembagaan (Institusional)

Perumusan kebijakan model institusional memiliki makna bahwa dalam membuat suatu kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Hal tersebut demikian mengingat akan rungsi pemerintah dalam aspek kelembagaan. Dye dalam Nugroho (2012:546), membenarkan tiga hal dalam pendekatan kelembagaan yakni pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tertentu bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama.

b) Model Proses

Dalam model ini, politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu kebijakan publik merupakan juga proses politik. Model ini menekankan bagaimana kebijakan dibuat atau seharusnya dibuat, namun kurang memberikan tekanan substansi seperti apa yang ada.

c) Model Teori Kelompok

Model ini mengandaikan kebijakan sebagai titik kesimbangan. Interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Terdapat peran sistem politik didalam pendekatan model ini yaitu untuk memanajemeni konflik yang muncul dari adanya perbedaan tuntutan, melalui cara-cara berikut :

1. Merumuskan aturan main antar kelompok kepentingan
2. Menata kompromi dan menyeimbangan kepentingan

3. Memungkinkan terbentuknya kompromi dalam kebijakan publik (yang akan dibuat ).
4. Memperkuat kompromi-kompromi.

d) Model Teori *Elite*

Model ini mengasumsikan bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau *elite* dan yang tidak memiliki kekuasaan atau *massa*. Model ini mengembangkan diri pada kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias dalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para *elite*.

e) Model Rasionalisme

Model ini mengedepankan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitas-rasionalitasnya yaitu membandingkan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai melalui beberapa cara yakni :

1. Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya.
2. Menemukan pilihan-pilihan.
3. Menilai konsekuensi masing-masing pilihan.
4. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan.

## 5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

### f) Model Inkrementalis

Model ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional. Para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya, ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, adanya hasil-hasil kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan, dan menghindari konflik. Model ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan kebijakan di masa lalu. Model ini dapat dikatakan sebagai model pragmatis atau praktis. Pendekatan ini diambil ketika pengambil kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu maupun ketersediaan informasi.

### g) Model Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning*)

Model ini berupaya menggabungkan antara model rasional dan model inkremental. Model ini diperkenalkan oleh Etzioni (1967) sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, menetapkan proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai.



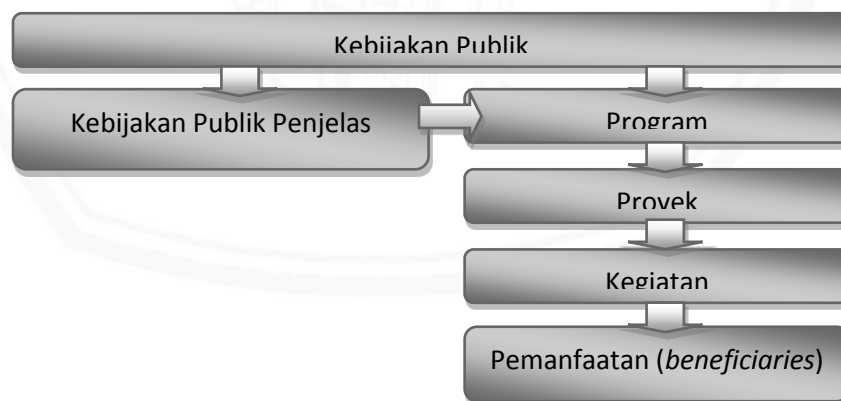
#### h) Model Pilihan Publik

Model ini melihat kebijakan publik sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Model ini membantu kita memahami mengapa kebijakan-kebijakan publik selalu berada ditengah-tengah kebijakan yang liberal ataupun konservatif.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

### 2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. tidak lebih dan tidak kurang. untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1 Sekuensi Implementasi Kebijakan.**

*Sumber :Nugroho (2012 :675)*

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar diatas dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik, sebagaimana digambarkan berikut ini.



**Gambar 2 Mekanisme Implementasi Kebijakan.**

*Sumber :Nugroho (2012 :676)*

Misi adalah yang pertama, karena melekat pada organisai. Misi adalah *raison d'etre*, atau alasan mengapa organisasi hadir atau eksis. Jadi, misi menentukan kemana akan pergi, ata visi. Jika misi melekat pada organisasi, dan tidak berubah selama organisasi ada, kecuali jika organisasi dirombak atau direformasi, visi melekat pada individu yang memimpin organisasi. Setiap pemimpin organisasi harus mempunyai visi kemana organisasi dibawa selama dibawa kepemimpinannya. Perlu dipahami, karena pemimpin organisasi sering kali terlalu berlebihan hingga mencanangkan visi lebih dari yang dapat dicapainya. Ini juga membuat pemimnpin menjadi terlalu terobsesi atau obsesif pada apa yang dapat dicapainya, bahkan pada kekuasaan organisasi. Jika pun pemimpin hendak mencanangkan visi melebihi jabatan kepemimpinannya, ia harus menetapkan detail dari visi yang hendak dicapai pada masa kerjanya, dan menetapkan bahwa visi jangka panjang adalah visi yang digerakan oleh capaiannya pada visi dimana ia bekerja.

### **2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

#### **a. Implementasi Model Grindle**

Model implementasi ini dikemukakan oleh Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Model Grindlee ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut yang mencakup hal-hal berikut :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Jika dicermati, Keunikan dari model Grindlee terletak pada pemahamannya akan konteks kebijakan, khususnya menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang dibutuhkan.

#### **b. Implementasi Model Hogwood dan Gunn**

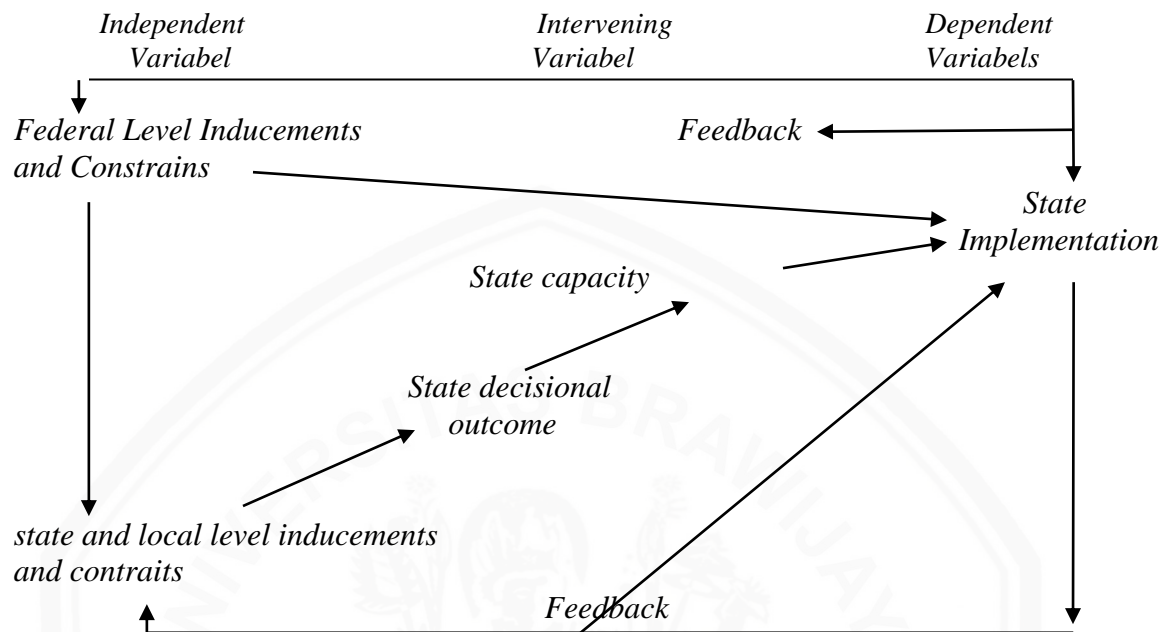
Model imlementasi ini dikembangkan oleh Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gunn pada Tahun 1978. Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana
2. Ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya waktu
3. Perpaduan antara sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada

4. Kebijakan yang diimplementasikan didasari atas hubungan kausal yang handal
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi didalam proses pengimplementasian kebijakan.
6. Adanya hubungan saling ketergantungan yang kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.

### **c. Implementasi Model Goggin, Bowman, dan Lester**

Malcolm Gogin, Ann Bowman, dan James Lester dalam Nugroho (2012 :678) mengembangkan apa yang disebutnya sebagai *Communication Model* untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai generasi ketiga model implemetasi kebijakan. Goggin dkk bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan yang digambarkan kedalam bagan berikut ini



**Gambar 3 Model Implementasi Goggin.**

*Sumber : Nugroho 2012 :678*

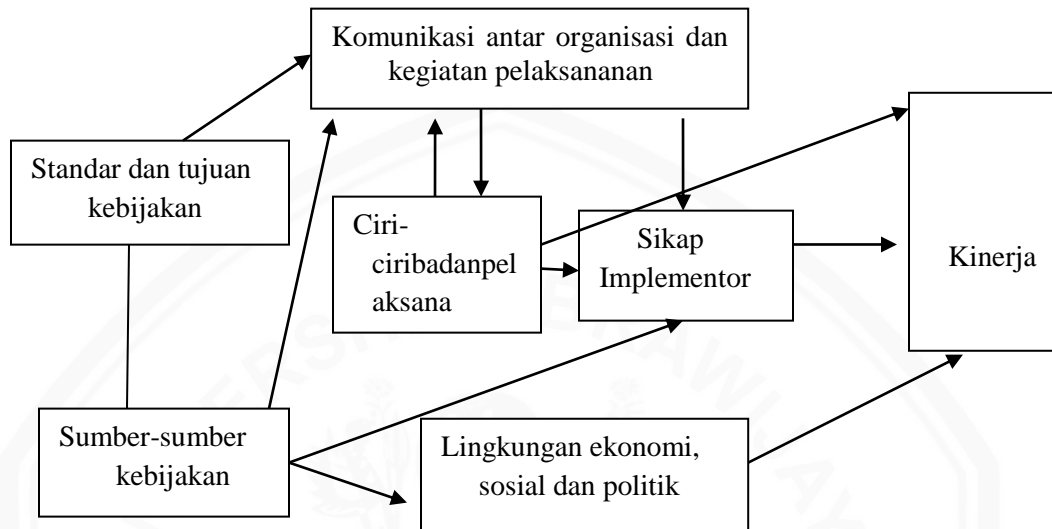
#### **d. Implementasi Model Van Meter dan Van Horn**

Model ini dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975 dengan mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. beberapa variabel dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel-variabel berikut :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana

3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecendrungan (disposition) pelaksana atau implementor.

Berikut ini merupakan proses implementasi kebijakan Model Van Horn :



**Gambar 4 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Meter**  
 Sumber : Wahab, 2014:166

#### e. Implementasi Model Edward

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition, or attitudes*, dan *bureaucratic structures*



- a. *Communication* merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, sedangkan dalam hal ini komunikasi kebijakan adalah penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Menurut Widodo (2009:97) bahwa informasi kebijakan publik tersebut harus disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan agar dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan serta agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik. Adapaun berbagai dimensi dalam komunikasi kebijakan, yaitu dimensi transformasi, kejelasan, dan konsistensi.
- b. *Resources* Menurut Edward III (1980) dalam Widodo (2009:98) bahwa faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengungkapkan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber-sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya tersebut antara lain adalah sumber daya manusia, sumber daya peralatan atau fasilitas, sumber daya anggaran atau

keuangan, sumber daya peralatan atau fasilitas dan sumber daya informasi serta kewenangan.

- c. *Disposition* menurut Edward III dalam Widodo (2009:104) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik.
- d. *Bureaucratic Structure* menurut Edward III dalam Widodo (2009:106) bahwa implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif dikarenakan adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, kepegawaian, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan luar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan kegagalan komunikasi, dimana para pelaksana

kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar atau instruksinya akan terdistorsi. Fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasi semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu. Akibatnya lebih lanjut adalah terjadinya ketidakefisiennan dan pemborosan sumber daya langka. Dengan kata lain, organisasi pelaksana yang terfragmentasi atau terpecah-pecah.

## **2.3 Pedagang Kaki Lima (PKL)**

### **2.3.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Dalam pelaksanaan aktivitas perdagangan di pasar, terdapat pedagang formal dan informal atau pedagang kaki lima (PKL), penjual jasa dan pedagang asongan. Mc. Gee dan Yeung dalam Herawati (2007:39), memberikan pengertian PKL sama dengan "*hawkers*", yang didefinisikan sebagai kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar, PKL di Indonesia saat ini dapat dikatakan mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat terutama di perkotaan. Perkembangan suatu kota selalu diikuti perkembangan jumlah PKL yang memenuhi ruang publik kota.

Karakteristik pembeli dari perdagangan sektor informal didominasi oleh penduduk yang berpendapatan rendah (Wirosardjono dalam Hariyono, 2007:108), walaupun secara faktual tidak selalu demikian. Pada kasus tertentu, para pedagang kaki lima tersebut juga melayani atau dapat didominasi oleh pembeli dari golongan penduduk berpendapatan menengah ke atas. Pada prinsipnya lokasi perdagangan

diharapkan dapat meraup sebanyak mungkin konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di mengerti bahwa jenis barang yang di perdagangan serta cara menjajakan/menampilkan barang yang diperdagangkan akan memberikan pengaruh pada pemilihan lokasi tempat mangkalnya.

### **2.3.2 Karakteristik PKL Berdasarkan Jenis Dagangan**

Karakteristik pedagang kaki lima bermacam-macam dibedakan berdasarkan apa saja barang yang dijual dan jasa yang di sediakan. Untuk jenis dagangan yang ditawarkan/dijual oleh pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi (Mc Gee dan Yeung, dalam Herawati, 2007:39):

- a. Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi, yang termasuk dalam hal ini adalah bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu juga dapat berupa barang-barang setengah jadi seperti beras.
- b. Makanan siap saji, jenis dagangan ini berupa makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Penyebaran fisik pedagang kaki lima bisa cenderung mengelompok dan homogen.
- c. Makanan, berupa dagangan yang tidak berupa makanan/minuman misalnya barang tekstil sampai obat-obatan.
- d. Jasa pelayanan (*service*), jenis dagangan yang diperjual belikan adalah jasa perseorangan seperti tukang pembuat kunci, reparasi, jam, dan lain-lain. Pola persebarannya pada umumnya berada di pusat pertokoan dan mengelompok dengan jenis lainnya.

### 2.3.3 Karakteristik PKL Berdasarkan Sarana Jual yang Dipergunakan

Ditinjau dari alat/sarana jual yang dipergunakan, maka kegiatan pedagang kaki lima dapat dibagi menjadi lima tipe dasar menurut Wawoeroentoe dalam Arifianto (2006:50-51), yaitu:

a) Hamparan di lantai

Merupakan kelompok kegiatan perdagangan kaki lima yang mempergunakan alat jual seperti tikar, kain, plastik meja dalam bentuk sederhana, bakul atau sejenis sebagai alas untuk menjajakan barang dagangannya. Jika dikaitkan dengan cara melakukan kegiatannya, pedagang kaki lima dalam kelompok ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok pedagang kaki lima berpindah.

b) Pikulan

Merupakan sarana usaha yang menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan cara dipikul, agar barang dagangan lebih mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat. Bentuk sarana ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktifitas pedagang kaki lima keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*) dan yang sering dijumpai adalah pada jenis makanan dan minuman.

c) Meja/songko

Merupakan kelompok kegiatan perdagangan kaki lima yang mempergunakan meja/songko sebagai sarana penjualan barang yang diperdagangkan. Pada kelompok yang menggunakan meja ada yang diberi pelengkap atap dan ada yang tidak. Fungsi atap tersebut adalah untuk melindungi barang maupun

pedagang itu sendiri dari cuaca seperti panas, hujan ataupun dari gangguan debu. Bila dikaitkan dengan tata cara melakukan kegiatan, kelompok ini dapat dimasukkan dalam kelompok pedagang kaki lima menetap.

d) Kereta dorong/gerobak

Merupakan kelompok kegiatan pedagang kaki lima yang mempergunakan sebuah kereta dorong sebagai sarana perdagangannya. Dengan alat ini pun ada yang dilengkapi dengan atap ada yang tidak dan ada yang diberi tenda. Bila dikaitkan dengan tata cara pelaksanaan kegiatannya, kelompok ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok pedagang kaki lima menetap. Penggunaan alat kereta dorong banyak dipakai oleh pedagang kaki lima yang memerlukan kemudahan dalam mengangkut barang dagangannya.

e) Warung semi permanen

Salah satu bentuk sarana usaha yang terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi. Dimana bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau bahan lainnya agar tidak tembus air.

Sedangkan menurut Herawati (2007:44), menjelaskan bahwa sektor informal, termasuk di dalamnya PKL, memiliki beberapa karakteristik, yaitu meliputi:

- a) jumlah unit usaha banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja. Selain itu, beberapa hal serba rendah (tingkat pendidikan dan keterampilan,

akses ke lembaga keuangan, produktivitas tenaga kerja, dan tingkat upah).

- b) Sektor informal terkait dengan sektor pedesaan. Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Sektor formal tergantung pada sektor informal terutama dalam hal input murah dan penyediaan barang-barang bagi pekerja di sektor formal.
- c) Penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit dibandingkan dengan sektor formal sehingga cukup dengan modal sedikit dapat memperkerjakan orang. Dengan menyediakan akses pelatihan dan keterampilan sektor informal dapat memiliki peran besar dalam pengembangan SDM. Sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil.
- d) Sektor informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan memakai sumber daya lokal sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Sektor informal juga sering terkait dengan pengelolaan limbah atau sampah. Sektor informal dapat memperbaiki distribusi hasil pembangunan kepada penduduk miskin.
- e) Sektor informal terlihat indikasi *labor surplus* dimana pekerjaan formal tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja.



- f) Ciri dari sektor informal ini adalah upah atau gaji yang tidak tetap, rendah, serta tidak cukup memadai. Produktivitasnya tidak maksimal karena sektor informal tidak menggunakan teknologi atau peralatan yang modern.

Jadi, dapat disimpulkan menurut pendapat para ahli diatas sektor informal atau PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan sektor yang kuat dalam perdagangan barang dan jasa, karena sektor informal relatif kecil dalam penggunaan modal dibandingkan dengan sektor formal, baik jenis dagangan, sarana jual dan lokasi untuk berjualan tidak memerlukan biaya yang besar. Akan tetapi berbanding lurus dengan pendapatan atau upah yang diperoleh tidak tetap dan relatif rendah.

#### **2.3.4 Pola Penyebaran Aktivitas PKL**

Terkait dengan sejarah munculnya peristilahan PKL, dalam perkembangan pola penyebaran PKL juga sangat dipengaruhi oleh aktifitas pedestrian. PKL di pedestrian hampir dijumpai pada semua fungsi kawasan. Secara umum, faktor utama pemicu hadirnya PKL adalah pejalan kaki, jika kemudian pada kawasan perdagangan muncul PKL, karena itu di kawasan tersebut lebih banyak pejalan kakinya. Namun demikian bukan berarti kawasan yang sedikit pejalan kakinya akan steril dari PKL. Menurut Mc Gee dan Yeung dalam Herawati (2007:44), pola penyebaran aktifitas pedagang kaki lima terbagi dalam dua yaitu:

a. Pola penyebaran memanjang (*street concentration*)

dipengaruhi oleh pola jaringan dan pola memanjang terjadi di sepanjang atau pinggir jalan utama ataupun jalan penghubung. dimana pola ini terbentuk berdasarkan pertimbangan kemudahan pencapaian/aksesibilitas tinggi sehingga mempunyai potensi dalam mendatangkan maupun menarik konsumen. jenis barang dagangan yang umumnya diperdagangkan adalah sandang atau pakaian, kelontong, jasa reparasi, buah-buahan, rokok atau obat-obatan, dan lain-lain.

b. Pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*)

Pola penyebaran ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka, taman, lapangan dan sebagainya. pola ini dipengaruhi oleh pertimbangan faktor aglomerasi yaitu keinginan penaja untuk melakukan pemusatan atau pengelompokan penaja sejenis dengan sifat dan komoditas sama untuk lebih menarik minat pembeli.

### 2.3.5. Pembangunan Ruang terhadap PKL

Dalam pembangunan suatu fungsi kegiatan pada suatu ruang kota dalam hal ini khususnya kegiatan perdagangan sangat tergantung pada lokasi. Kaidah tersebut juga bagi sektor informal (PKL) sebagai sektor yang sering tersingkirkan dalam penataan kota. Menurut Budihardjo (2009:24), pewadahan kegiatan sektor informal seringkali keluar dari lokasi kawasan perkotaan yang strategis. Kebijakan pembangunan di Indonesia selama ini selalu ditentukan pada pendekatan pasokan (*supply*) dan bukan pada pendekatan kebutuhan. Akibatnya timbulah kasus-kasus

sarana perkotaan yang tidak terpakai. Rencana-rencana yang diperuntukkan bagi aktivitas masyarakat yang berorientasi pada sektor keuntungan.

Pedagang kaki lima beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan kaki yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah atau kawasan komersil, Mc Gee dan Yeung dalam Herawati (2007:44). Pengelolaan dan pembinaan aktivitas PKL telah diimplementasikan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi eksiting dan karakteristik masing-masing kota. adapun pengelolaan dan pembinaan aktivitas PKL ini meliputi:

a. Pengelolaan Lokasional

Sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataan dari masing-masing kota. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kota dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Relokasi/Pemugaran

Yaitu pemugaran suatu lokasi baik berupa pembangunan baru dengan fungsi yang berbeda dari semula maupun berupa perbaikan dari kondusi yang telah ada. Tindakan ini juga memperhatikan kepentingan dari pihak PKL sendiri, yakni tidak mengganggu perolehan atau hubungannya dengan konsumen maka tindakan tersebut dapat diterima.

2) Stabilisasi/Pengaturan

Yaitu berupa penataan fisik atau penempatan lokasi PKL pada suatu lokasi. Adapun beberapa alternatif tindakan yang dilakukan antara lain berupa:

- a) Peruntukan dalam ruang terbuka (*open market*). Dimaksudkan untuk kemudahan pergerakan konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan PKL, ini diharapkan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan lokasi PKL.
- b) Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu. Yaitu dengan menutup jalan-jalan tertentu dan menutup sirkulasi lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor dan hanya diperuntukkan bagi pergerakan pejalan kaki. Tindakan ini biasanya bersifat temporer dilakukan dalam waktu-waktu tertentu saja.
- c) Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan trotoar. Yakni menempatkan PKL, pada jalan-jalan atau sebagian trotoar tertentu, yang sekiranya tidak mengganggu aktivitas disekitarnya. Setelah itu, PKL tersebut wajib membersihkan ruang usahanya agar tidak mengganggu fungsi kota lainnya.
- d) Multifungsi ruang terbuka (taman, lapangan, ruang parker). Yakni pemanfaatan ruang terbuka di sekitar kawasan perbelanjaan atau pusat keramaian pada waktu-waktu tertentu pada saat ruang tersebut kurang dimanfaatkan.

### 3) *Removal*/Pemindahan

Dimaksudkan untuk pemindahan sektor informal ke satu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Pemindahan ke lokasi tetap ini dapat berupa pasar resmi atau sebuah lokasi khusus yang diterapkan sebagai lokasi sekor informal. Adapun upaya memindahkannya secara permanen ke dalam pasar yang telah dilakukan pada beberapa kota, terdapat kendala yaitu pertama rancangan bangunan yang tidak sesuai dimana rancangan fisik pasar sangat penting bagi kebutuhan yang bermacam-macam dan tipe yang berbeda-beda pula. kedua, adalah faktor finansial yaitu terkait dengan tarif sewa ruang di dalam pasar yang tinggi sehingga salah satu alternatif pemecahannya adalah dengan membuat ruang-ruang kecil untuk menekan harga sewa, namun hal tersebut juga masih terdapat kendala yaitu jenis komoditas dagangannya. Sehingga apabila dilakukan upaya memindahkan sektor informasi ke pasar legal, maka pertimbangannya adalah rancangan bangunan pasar yang sesuai dan akomodatif, tingkat harga sewa yang memadai, rencana yang terperinci, dan jarak lokasi berjualan dari tempat berjualan semula.

b. Pola Pengelolaan Struktural

Pemerintah kota biasanya lebih sering menerapkan pola pengelolaan lokasional walaupun tidak selalu berhasil. Selain bentuk pengelolaan lokasional, pemerintah kota juga mencoba pola pengelolaan struktural.

Adapun yang termasuk dalam pola pengelolaan struktural adalah sebagai berikut:

1) Perajinan

Perajinan usaha pada kelompok PKL didasari menurut jenis dan barang/jasa yang ditawarkan, waktu usaha, dan lokasi tertentu. Perijinan bagi aktivis PKL dalam melakukan usahannya didasari atas pertimbangan untuk Memudahkan dalam pengaturan, pengawasan, dan pembatasan jumlah serta Membantu dalam penarikan retribusi

2) Pembinaan

Tindakan pengendalian dalam hal ini dilakukan dengan pembinaan terhadap kualitas pola pikir para pedagang dan pelaksanaan aktivitas PKL secara keseluruhan, karena diketahui pola pikir PKL sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan yang ada, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangnya perhatian mengenai visualisasi aktivitas secara keseluruhan. Di Malaysia pembinaan yang pernah dilakukan adalah perbaikan dalam tingkat PKL, dari pembinaan ini diharapkan dapat membatasi jumlah PKL seiring dengan kesadaran mereka akan keterampilannya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

3) Bantuan/pinjaman

Pemberian bantuan dan pinjaman di Malaysia dilakukan untuk memberikan kesempatan pada PKL untuk berkembang dan meningkatkan efisiensi bagi

PKL yang telah ada. Pola ini berhubungan erat dengan pihak lain seperti swasta, LSM, dan lainnya.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijelaskan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:29) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil dari penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara faktual suatu fenomena dan peristiwa yang akan diteliti. Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini yakni peristiwa yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo.

Sugiyono (2012:1) berpendapat bahwa metode suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Menurut Bogdan & Taylor dalam Moleong (2006:3) penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan, Sugiyono (2012:9) mengemukakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari generalisasi.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini berupa fenomena sosial yang ditemui terkait dengan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo. Untuk melihat fenomena tersebut, maka diharuskan untuk mengetahui peran antara kelompok organisasi dan kelompok sosial sebagai target/sasaran yang dalam hal ini yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai Instansi yang ditunjuk dalam mengkoordinir implementasi dari kebijakan relokasi PKL, serta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasi berperan sebagai target/sasaran dari adanya kegiatan implementasi dari kebijakan relokasi. Dengan begitu, peneliti diharuskan untuk mengetahui secara mendalam terkait proses Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo beserta faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo khususnya Relokasi PKL Dari Alun-Alun Ke GOR Sidoarjo.

Peneliti juga diharuskan memperoleh data-data untuk memperlancar proses penelitian. Data yang dihasilkan yakni berupa data deskriptif berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen dari sumber yakni informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Informan yang dimaksud berasal dari kedua pihak sebagai pelaksana melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Dengan demikian, data tersebut kemungkinan akan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti serta penyajian

data yang digambarkan dalam laporan penelitian sebagian besar berasal dari kutipan-kutipan data tersebut. Oleh karena itu, peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

### 3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2006:297), fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian pada suatu penelitian. Sugiyono (2012:32) berpendapat bahwa fokus penelitian kualitatif bersifat *holistic* (menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan) dimana penelitian yang diteliti harus berdasarkan keseluruhan situasi sosial meliputi tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Adapun fokus penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

3.2.1 Implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo yang mengacu pada konsep Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yakni sebagai berikut :

a. Komunikasi

Menjelaskan tentang komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat didalam proses pengimplementasian kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo

b. Sumber daya

Menjelaskan tentang ketersediaan akan sumber daya manusia sebagai sumber daya utama serta sumber daya penunjang yaitu ketersediaan sumber daya anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo

c. Disposisi

Sikap menerima atau menolak dari para agen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo

d. Struktur Birokrasi

Menjelaskan tentang struktur birokrasi yang dibentuk dalam mendukung implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo

3.2.2 Faktor penghambat Implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo

- a. Keterbatasan Jumlah Aparatur DLHK Maupun Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
- b. Rendahnya Kesadaran Para Pedagang Kaki Lima Untuk Menaati Hukum

### 3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Moleong (2006:128) mengemukakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat peneliti saat melakukan penelitian terutama dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi di Kabupaten Sidoarjo didasarkan atas beberapa alasan yang telah dikemukakan sebelumnya pada latar belakang penelitian yakni terjadinya kenaikan jumlah PKL yang ada di Kabupaten Sidoarjo di setiap tahunnya serta masih adanya aktivitas jual beli yang

dilakukan oleh para PKL di sekitaran Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Kondisi ini menyebabkan Implementasi dari kebijakan relokasi bagi para PKL sangatlah penting agar tidak mengganggu aktivitas dan kegiatan masyarakat umum yang ingin bersantai di seputaran Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.

Situs penelitian merupakan tempat untuk melihat peristiwa yang diteliti dalam memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Situs Penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo yang bertindak sebagai salah satu dinas yang ditunjuk dalam mendukung implementasi kebijakan terkait dengan relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo.

### **3.4 Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah data berupa informasi-informasi penting yang dapat menunjang penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dan selebihnya hanya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dapat digolongkan dalam 2 (dua) sumber yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari pemberi data ke pengumpul data (Sugiyono, 2012:139). Sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain seperti literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012:141). Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber/informan melalui proses wawancara dengan pihak yang terkait. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2006:132). Informan yang diwawancarai harus memahami permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti menetapkan jumlah informan berdasarkan pertimbangan waktu, tempat, dan tingkat pemahaman informan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, serta para pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi oleh pemerintah daerah dari alun-alun menuju ke GOR Sidoarjo.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder bisa berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang dimiliki lembaga/ instansi terkait. Data sekunder juga dapat diperoleh berupa rekaman media massa, artikel-artikel, jurnal-jurnal atau sumber data yang lain. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah studi kepustakaan berupa buku dan jurnal ilmiah serta dokumen berupa tabel maupun kegiatan relokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo didalam merelokasikan para pedagang kaki lima

(PKL) yang berjualan disekitaran Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara/teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data-data penelitian yang diperlukan. Pengumpulan data sangatlah penting dikarenakan peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar memperoleh data yang akurat. Sugiyono (2012: 230) menyatakan bahwa secara umum teknik pengumpulan data terdapat empat bagian yaitu observasi, interview, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi). Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara menurut Hasan dalam Emzir (2012: 50) adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan serta melakukan tanya jawab untuk meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memahami permasalahan penelitian. Pada penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh jawaban secara langsung dan data akurat dari narasumber/informan terkait dengan implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan wawancara yakni dengan metode wawancara semi-terstruktur. Wawancara semiterstruktur yakni metode wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara yang terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan yang diteliti secara terbuka dimana



informan dimintai pendapat dan ide-idenya terkait dengan topik penelitian (Sugiyono 2012:221). Dengan metode ini maka peneliti akan mengajukan pertanyaan dari pedoman wawancara yang telah dibuat maupun diluar pedoman wawancara serta informan dapat memberikan jawabannya secara terbuka dan tidak dibatasi/bebas. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu berupa *smartphone* yang digunakan untuk merekam pembicaraan saat wawancara dan pedoman wawancara (*interview guide*) yang digunakan sebagai batasan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berdurasi 1-2 jam atau lebih sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan. Adapun informan yang dijadikan peneliti sebagai sumber data penelitian sebagai berikut:

- 1) Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
- 2) Bapak Mohamad Edi Kurniadi, ST, MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
- 3) Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengedalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
- 4) Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
- 5) Ibu Cucuk Sumiyati sebagai salah satu pedagang kaki lima yang berjualan makanan ringan.

- 6) Bapak Ahmad Mastori yang berprofesi sebagai PKL yang setiap harinya berjualan es kelapa muda.
- 7) Bapak Drs. Asrorudin selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
- 8) Bapak Toyib Ginanjar selaku ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima GOR Delta
- 9) Bapak Aji Nur Rohman selaku PKL yang kesehariannya berjualan bakso dan Somai
- 10) Bapak Sutrisno Soleh yang kesehariannya berjualan pakaian anak anak
- 11) Bapak Nuryanto Wahid selaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo
- 12) Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap suatu kejadian, gejala, atau sesuatu (Emzir,2012:37). Pengamatan dilakukan untuk melihat fakta dari fenomena sosial terkait dengan implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode observasi non-partisan dimana peneliti hanya sebagai pengamat atas fenomena atau peristiwa yang menjadi pokok penelitian (Emzir,2012:39). Obyek yang dijadikan tempat observasi meliputi kondisi terakhir dari Alun-alun dan GOR Sidoarjo. Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan alat bantu berupa *smartphone* yang digunakan untuk mengambil gambar

obyek observasi serta merekam informasi-informasi yang didapatkan selama proses observasi. Peneliti juga menggunakan buku catatan lapangan (*field notes*) untuk mencatat informasi yang diperoleh selama observasi. Kedua instrumen tersebut digunakan sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahan terhadap obyek yang diamati.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data tertulis berupa dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiyono (2012:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan dapat berupa catatan, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen-dokumen tersebut akan dijadikan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung sumber data primer berupa wawancara dan observasi terkait dengan implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo.

#### 3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat-alat pendukung yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012:223) instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data untuk memecahkan masalah dan mencapai

tujuan penelitian Dalam mendukung proses pengumpulan data yang diperlukan, instrumen yang digunakan sebagai berikut:

1. Peneliti, yaitu orang yang melaksanakan penelitian. Menurut Sugiyono (2012:223) peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif dimana peneliti harus memahami terhadap metode penelitian, menguasai teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai subyek penelitian atau pelaksana penelitian yang mengumpulkan data berupa wawancara, observasi, dan dokumen pendukung serta menyajikan data hasil penelitian.
2. Pedoman wawancara, yaitu alat bantu berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik penelitian dalam pengambilan data melalui wawancara dengan informan. Pedoman wawancara akan digunakan peneliti untuk menggali data primer kepada informan yang telah ditentukan dan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terkait topik penelitian.
3. *Smartphone*, yaitu alat yang digunakan untuk mendokumentasikan data-data lisan maupun visual. *Smartphone* digunakan untuk merekam pembicaraan saat wawancara dan mengambil gambar saat melakukan observasi.
4. Alat tulis, yaitu alat yang digunakan untuk menulis catatan-catatan penting untuk membantu peneliti dalam pengumpulan data. Alat tulis yang digunakan berupa bolpoin dan buku catatan lapangan (*field notes*).

### 3.7 Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan suatu proses penghimpunan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk sederhana. Tujuannya agar data yang diperoleh mudah dimengerti dan maknanya dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:244) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, disusun ke dalam suatu pola, memilah data yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Adapun alur aktivitas analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan data yang telah ditentukan sejak awal yang melibatkan aktor, aktifitas dan terjadinya fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dengan metode wawancara dengan informan dan observasi ke obyek yang sesuai dengan topik penelitian.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang di dapat dari lapangan. Kondensasi data

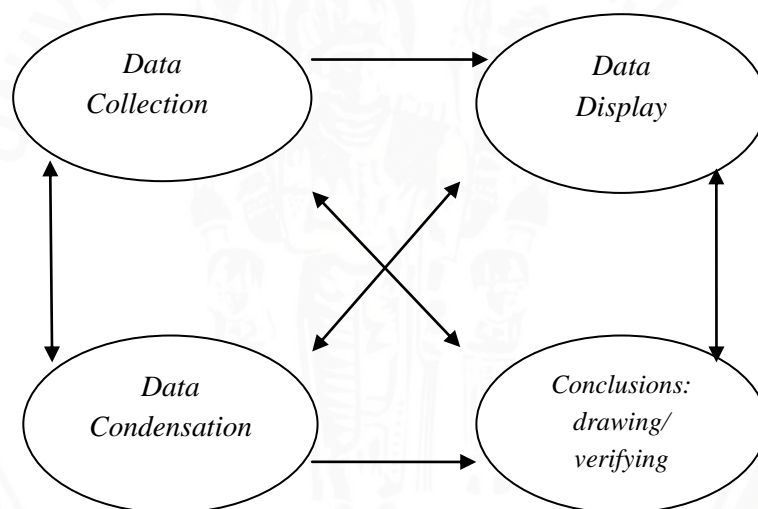
berlangsung terus-menerus selama penelitian. Kondensasi dapat dilakukan dengan cara, menjabarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian secara lengkap dan terperinci. Laporan lapangan disederhanakan dan dipilih hal-hal yang penting atau pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Pola yang dimaksud yakni berdasarkan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian yang ditentukan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan. Data yang telah dipilih dan disederhanakan akan dijadikan sebagai sumber data sesuai dengan fokus dan topik penelitian.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik dalam bentuk tabel maupun bentuk kalimat atau uraian. Data yang telah terkumpul dan disederhanakan dari 2 pihak informan akan disajikan oleh peneliti dalam bentuk uraian kalimat dimana data tersebut diperoleh dari data primer kemudian di dukung oleh data sekunder yang telah disederhanakan ke dalam bentuk tabel, gambar, maupun grafik. Hal ini bertujuan agar peneliti dan pembaca mudah untuk memahami terkait topik penelitian. Data yang telah terkumpul akan disajikan sesuai dengan subfokus penelitian yakni berkaitan dengan implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo.

### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam kegiatan analisis. Dari hasil data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisa untuk dapat ditarik kesimpulannya. Peneliti akan menganalisis data yang telah disajikan dengan membandingkan secara teoritis berdasarkan Konsep Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III untuk mencari kesimpulan/hasil dari proses penelitian yang dilakukan sesuai dengan fokus penelitian .



**Gambar 4. Analisis Data Model Interaktif**  
*Sumber: Miles, Hubberman dan Saldana, 2014:14*

### 3.8 Keabsahan Data Penelitian

Di dalam penelitian kualitatif, menguji keabsahan data bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



Uji keabsahan data biasanya hanya menekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik uji *credibility* (validitas internal) untuk menguji kredibilitas data dimana peneliti akan mengukur kebenaran data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo maupun dari beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) .

Pengujian *credibility* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check* (Sugiyono,2012:368-375). Adapun teknik pengujian *credibility* yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti akan kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan atau wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam teknik ini. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data penelitian hingga titik jenuh. Data yang diperoleh peneliti juga secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pengamatan dan wawancara secara terus menerus dengan

informan yang pernah ditemui ataupun baru ditemui baik dari pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo maupun dari beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga data yang diperoleh akan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

b. Meningkatkan Ketekunan (Ketekunan Pengamatan)

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu sah atau tidak. Oleh karena itu, peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam melakukan pengamatan dan wawancara ke kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, pengunjung Alun-alun Sidoarjo serta pengunjung GOR Sidoarjo agar dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang fenomena yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Triangulasi Sumber. Digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data. Data atau informasi diperoleh melalui beberapa sumber diantaranya yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, Pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi oleh pemerintah daerah dari Alun-alun menuju ke GOR Sidoarjo Serta beberapa masyarakat yang berkunjung ke Alun-alun maupun ke GOR Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Triangulasi Teknik. Digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan tiga macam teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- 3) Triangulasi Waktu. Digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu, hari, dan situasi kondisi yang berbeda-beda. Maka pengecekan bisa dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Dengan 3 teknik triangulasi diatas, maka peneliti akan memperoleh data dari berbagai sumber dengan teknik dan waktu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti akan menyesuaikan data hasil wawancara dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo serta para pedagang kaki lima dengan pengamatan (observasi) dengan data dokumen yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, data hasil pengamatan dengan data dari dokumen yang diperoleh, serta pandangan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat yang diperoleh dari para pedagang kaki lima yang direlokasi dilakukan pada waktu yang berbeda-beda untuk memperoleh data yang valid.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo**

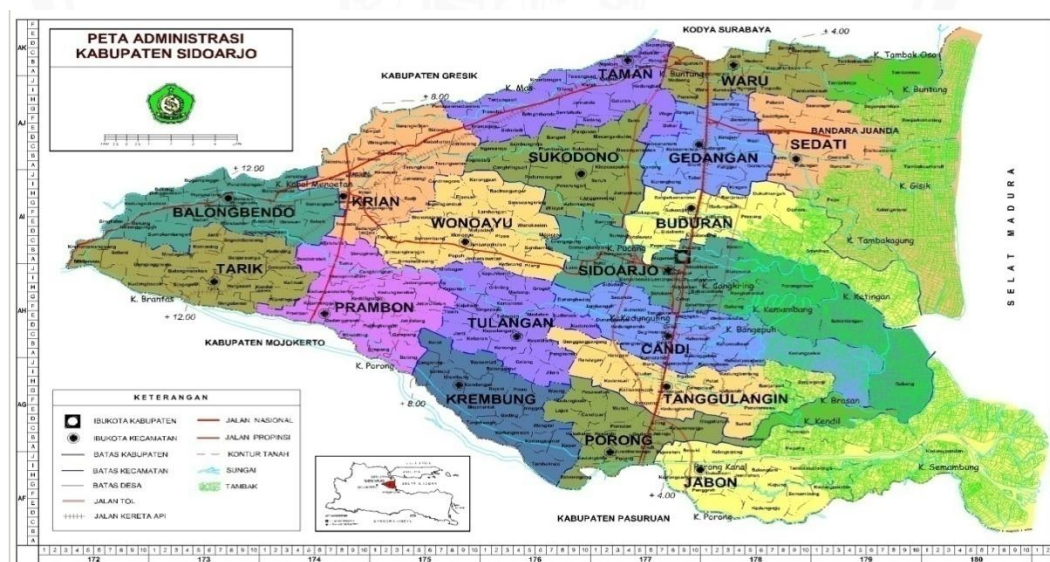
###### **4.1.1.1 Profil Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Menurut situs resmi Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil dan terpadat penduduknya di Jawa Timur dengan luas wilayah 71.424,25 Ha yang diapit dua sungai yaitu sungai Surabaya dan sungai Porong sehingga disebut Kota Delta. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 Kecamatan. Berikut ini adalah Tabel 1 (Hal.62) yang menguraikan terkait dengan daftar Kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 2 Daftar Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**

No.	Kecamatan	No.	Kecamatan
1	2	3	4
1.	Balongsendo	10.	Sedati
2.	Buduran	11.	Sidoarjo
3.	Candi	12.	Sukodono
4.	Gedangan	13.	Taman
5.	Jabon	14.	Tanggulangin
6.	Krebung	15.	Tarik
7.	Krian	16.	Tulangan
8.	Prambon	17.	Waru
9.	Porong	18.	Wonoayu

Sumber : [www.sidoarjo.go.id](http://www.sidoarjo.go.id) 2017



**Gambar 5 Peta Kabupaten Sidoarjo**

Sumber : [www.sidoarjo.go.id](http://www.sidoarjo.go.id) 2017



#### 4.1.1.2 Lambang Kabupaten Sidoarjo

Menurut situs resmi Kabupaten Sidoarjo, lambang dari Kabupaten Sidoarjo memiliki 5 bagian dimana lima bagian tersebut memiliki arti-arti tersendiri bagi Kabupaten Sidoarjo baik dari bentuk, susunan lambang, dan warna-warna yang digunakan dalam lambang tersebut.



**Gambar 6 Lambang Kabupaten Sidoarjo**

Sumber : [www.sidoarjo.go.id](http://www.sidoarjo.go.id) 2017

Berikut arti-arti dari 5 bagian dari lambang Kabupaten Sidoarjo:

1. Sebuah segilima beraturan yang sisi-sisinya berbentuk kurung kurawal melambangkan: Falsafah Pancasila yang juga mengandung arti bahwa rakyat daerah Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan ajaran Pancasila dengan tertib dan pasti
2. Sebuah bintang bersudut lima melambangkan: KeTuhanan Yang Maha Esa yang menggambarkan kehidupan ber-KeTuhanan/beragama dari rakyat daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Setangkai padi, delapan belas butir dan sebatang tebu lima ruas dengan bentuk bulat melambangkan: Hasil bumi yang paling penting dalam daerah Kabupaten



Sidoarjo. Sedangkan bentuk yang membulat dari padi dan tebu tersebut menggambarkan kebulatan tekad untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Delapan belas butir padi menunjukkan banyaknya Kecamatan dalam daerah Kabupaten Sidoarjo

4. Ikan bandeng dan ikan udang membentuk huruf “S” melambangkan: Hasil tambak dalam daerah Kabupaten Sidoarjo. Bentuk Huruf “S” dari ikan bandeng dan ikan udang tersebut menunjukkan huruf pertama dari Sidoarjo.

#### MAKNA WARNA-WARNA YANG DIPAKAI DALAM LAMBANG KABUPATEN SIDOARJO

1. Warna Biru Laut pada lambang berarti air yang menggambarkan bahwa Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terkenal dengan nama: “DELTA BRANTAS” dikelilingi air yaitu sungai dan laut. Warna biru laut yang terlepas dalam lingkaran padi dan tebu berarti air yang menggambarkan bahwa daerah Kabupaten Sidoarjo adalah daerah tambak yang banyak menghasilkan ikan bandeng dan ikan udang.
2. Warna dasar Hijau menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Sidoarjo (Delta Brantas).
3. Warna Kuning pada bintang, padi, tebu, dan pita menggambarkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Sidoarjo.
4. Warna Hitam pada tebu, ikan bandeng, ikan udang dan tulisan Kabupaten Sidoarjo menggambarkan keteguhan Iman rakyat daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Warna Abu-abu ikan bandeng dan ikan udang adalah warna pelengkap.

#### **4.1.1.3 Slogan/Motto Kabupaten Sidoarjo**

##### **SIDOARJO PERMAI BERSIH HATINYA**

**(Pertanian Maju, Andalan Industri, Bersih, Rapi, Serasi, Hijau, Sehat, Indah dan Nyaman)**

Artinya Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertanian yang subur sebagai lumbung pangan dengan cara identifikasi pertanian yang maju agar bisa swasembada pangan dengan cara identifikasi pertanian dan menggunakan mekanisme teknologi tepat guna, di samping itu mendorong perkembangan industri semakin meningkat, maka kedua hal ini harus berkembang secara serasi. Selain itu masyarakat Kabupaten Sidoarjo berbudaya hidup dengan lingkungan yang bersih, rapi, serasi, hijau, sehat, indah dan nyaman.

#### **4.1.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo**

##### **VISI**

**“Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”**

##### **MISI**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Sidoarjo 2010-2015 tersebut, ditempuh melalui misi-misi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Sidoarjo, “Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan” dijabarkan ke dalam delapan misi utama yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergi, yang memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Delapan misi utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
2. Menumbuh kembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan Koperasi secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.
6. Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
8. Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menunjang tinggi norma dan etika masyarakat.

#### **4.1.1.5 Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo**

Menurut situs resmi Kabupaten Sidoarjo, Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari kondisi geografis wilayah terletak pada 112,5'-112,9' Bujur Timur dan 7,3'-7,5' Lintang Selatan. Luas wilayah laut Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mill ke arah laut adalah  $\pm$  201,6868 Km<sup>2</sup>. Batas Administrasi wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

Dataran Delta dengan ketinggian antara 0 s/d 25m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakkan yang berada di wilayah bagian timur

Topografi : Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81%. Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian. Meliputi 29,20%

Hidrogeologi : Daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah .

Hidrologi : Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Sungai Surabaya dan Sungai porong yang merupakan cabang dari Sungai Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang.

Klimatologi : Beriklim tropis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai bulan Oktober dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Mei.

Struktur Tanah :

- a. *Alluvial* kelabu seluas 6.236,37 Ha
- b. Asosiasi *Alluvial* kelabu dan *Alluvial* Coklat seluas 4.970,23 Ha
- c. *Alluvial* Hidromart seluas 29.346,95 Ha
- d. Gromosal kelabu Tua Seluas 870,70 Ha

#### 4.1.1.6 Kondisi Demografi

Menurut situs resmi Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Timur namun dengan penduduk terpadat. Keadaan demikian dikarenakan Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah penyangga dari Ibukota Provinsi, Surabaya. Pada tahun 2014 dengan luas wilayah 71.424,25 Ha berpenduduk sebanyak 2.127.043 orang dengan kepadatan penduduk rata-rata 3.334 orang/km<sup>2</sup>. Berikut tabel data kependudukan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015.

**Tabel 3 Data Kependudukan Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan  
Tahun 2015**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )	Kelahiran (orang)	Kematian (orang)
1	2	3	4	5	6
Sidoarjo	214.695	56.00	3.833.84	2.390	639
Buduran	98.436	37.00	2.660.43	2.214	261
Candi	151.688	38.00	3.991.79	2.327	234
Porong	89.103	28.00	3.182.25	1.361	251
Krembung	71.352	27.00	2.642.67	1.107	212
Tulangan	96.638	30.00	3.221.27	1.701	208
Tanggulangin	106.476	30.00	3.549.20	921	233
Jabon	59.040	62.00	952.26	1.579	303
Krian	127.997	30.00	4.266.57	2.391	268
Balombang	75.786	29.00	2.613.31	1.345	223
Wonoayu	83.436	33.00	2.528.36	1.178	225
Tarik	68.591	33.00	2.078.52	1.596	285
Prambon	80.502	31.00	2.596.84	1.339	268
Taman	222.435	29.00	7.670.17	2.415	276
Waru	230.913	28.00	8.246.89	2.478	295
Gedangan	127.747	23.00	5.554.22	2.152	258
Sedati	101.594	62.00	1.638.61	2.190	238
Sukodono	120.614	32.00	3.769.19	2.386	263
<b>Jumlah</b>	<b>2.127.043</b>	<b>638.00</b>	<b>3.333.92</b>	<b>33.070</b>	<b>4.940</b>

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2016

Dari data diatas diketahui bahwa Jumlah penduduk yang terbesar adalah Kecamatan Waru dengan jumlah penduduk 230.913 dan yang paling terendah adalah Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk 59.040. Kepadatan penduduk yang paling tertinggi adalah Kecamatan Waru dengan Kepadatan Penduduk 8.246.89. Pertumbuhan di Sidoarjo akan meningkat setiap tahunnya dikarenakan Sidoarjo merupakan daerah penopang dari Kota Surabaya.

#### **4.1.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

##### **4.1.2.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

Menurut Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo berada di Jalan Raya Siwalan Panji Nomor 36, Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Telepon (031) 8963184, 8946551 Fax: (031) 8946551. Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menerangkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- 2) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.1.2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas**

##### **Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

*“Menuju Sidoarjo yang Ramah Yang Ramah Lingkungan.”*

Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Kabupaten  
Sidoarjo

Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a) Mencegah dan mengendalikan pencemaran Lingkungan
- b) Mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan
- c) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup.
- d) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup



- e) Mengupayakan terwujudnya hak masyarakat atas lingkungan yang berkualitas, serta kewajiban masyarakat dalam memelihara kelestarian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- f) Memantapkan fungsi koordinasi dan kemitraan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, antara ekonomi, antara ekonomi dan ekologi dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas.

#### **4.1.2.3 Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

Menurut Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup dan kebersihan melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara,
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- c) Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

#### **4.1.2.4 Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. Dalam rangka mencapai tujuan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai berikut:

- a) Terpeliharanya ketersediaan dan kualitas air,
- b) Terpeliharanya kualitas udara,
- c) Meningkatnya penanganan sampah dan limbah,
- d) Terjaganya kualitas lingkungan perikanan pada tingkat yang optimum bagi berkembangbiakan ikan,
- e) Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan,
- f) Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air,
- g) Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi,
- h) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim.

#### **4.1.2.5 Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

Menurut Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mutu produk Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- 2) Meningkatkan produktivitas dalam Lingkungan masyarakat,
- 3) Meningkatkan kualitas sarana/prasarana produksi dan pemasaran produk lingkungan yang berkelanjutan,

- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan dan kebersihan hingga ke tingkat yang optimum keberlanjutan masyarakat,
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan investasi bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- 6) Meningkatkan kualitas SDM aparatur,
- 7) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat di bidang bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan

#### **4.1.2.6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo pada Pasal 5, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Staf : Sekretaris, terdiri dari;
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Unsur Pelaksana: Bidang terdiri dari:
  - a) Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
    1. Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak;
    2. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan
    3. Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3

b) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1. Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup;
2. Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum
3. Seksi Pembinaan dan Kemitraan;

c) Bidang Pertamanan dan PJU, terdiri dari:

1. Seksi Pertamanan;
2. Seksi Keindahan dan Dekorasi;

d) Bidang Kebersihan, terdiri dari

1. Seksi Pelayanan Kebersihan
2. Seksi Angkutan Sampah
3. Seksi Pengelolaan Sampah

e) Unit Pelaksana Teknik dinas (UPTD), terdiri dari;

- a) UPT Laboratorium Lingkungan;
- b) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD);

#### 4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **4.1.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

#### **Kabupaten Sidoarjo**

#### **4.1.3.1 Profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tersebut telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, sebagai langkah operasional mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

#### **4.1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Sidoarjo**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah perangkat pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang penegakan Perundangan-undangan Daerah, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  - 2. Seksi penyelidikan dan penyidikan;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
  - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - 2. Seksi Pengamanan;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
  - 1. Seksi Satuan Linmas
  - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta pelaporan.

## 3. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

## 4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan, dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi keuangan.

## 5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data,



menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, perlengkapan, urusan kerumah tanggaan, serta kepegawaian.

6. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta memfasilitasi proses penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS.

7. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengawasi, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

8. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengawasi, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan penindakan yustisial oleh PPNS.

9. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengawasi, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan operasi penertiban dan pengamanan dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### 10. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan operasi penertiban dan pengendalian.

#### 11. Seksi Satuan Linmas

Seksi satuan linmas dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengawasi, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat.

#### 12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

#### 4.1.3.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo didukung oleh jumlah sumber daya aparatur yakni 3 anggota Satpol perempuan dan 41 anggota Satpol Laki-laki yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4 Jumlah Aparatur dalam Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017**

No	Tingkat Pendidikan	J	Golongan	J
1	S2	-	I	6
2	S1	3	II	13
3	SMA	12	III	24
4	SD	30	IV	2
<b>TOTAL</b>		<b>45</b>		<b>45</b>

*Sumber: Renstra Satpol PP Kab. Sidoarjo, 2017*

#### 4.1.4 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima pada Gelanggang Olahraga (GOR) Sidoarjo

Gambaran Aktivitas PKL di area selain Alun-alun, terdapat tempat lain yang telah dilegalkan pula oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah pada area GOR Sidoarjo. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat keramaian masyarakat yang biasanya memilih daerah GOR Delta Sidoarjo sebagai tempat berkumpul untuk menghilangkan kepenatan. Gelanggang Olah Raga (GOR) sendiri biasa dikatakan sangat menguntungkan bagi para PKL sendiri. Menurut beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti yang merupakan para Pedagang Kaki Lima

(PKL) di areal GOR yang tak mau disebutkan namanya, menyatakan bahwa omset yang biasanya diperoleh dari berjualan di areal GOR ini lebih kecil dibandingkan jika berjualan di Alun-alun ataupun berkeliling disekitaran kawasan Taman Pinang. Di lain sisi, narasumber PKL yang berbeda menanggapi permasalahan ini, dimana menyatakan bahwa “Pemerintah seharusnya lebih objektif dalam merelokasi para PKL ini karena para pedagang tersebut sedikit banyak dapat menambah pemasukan daerah”. Pada area GOR berdasarkan obsevasi dari peneliti PKL lebih tertata dibandingkan keadaan sebelumnya yang juga dikemukakan oleh beberapa narasumber yang merupakan para petugas satuan polisi pamong praja maupun para petugas DLHK serta para pengunjung Alun-alun sidoarjo, dimana jarang ditemui PKL yang bertumpah-ruah dan memenuhi jalan-jalan disekitar daerah luar GOR. Kawasan ini memang lebih dijaga oleh pemerintah Sidoarjo agar tidak mengganggu pemandangan dan kebersihan Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan salah satu peraih penghargaan piala Adipura di Tahun 2014.

## **4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **4.2.1 Implementasi Kebijakan Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo**

Sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Kebijakan Penertiban Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah sebuah upaya pembinaan PKL di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi penentuan lokasi dan membentuk sentra-sentra lokasi bagi PKL, penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL yang memperhatikan kepentingan

sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya. Dalam hal penentuan lokasi PKL di Kabupaten Sidoarjo memang tidak dipersiapkan suatu lahan khusus bagi PKL tanpa izin kepala daerah, karena mereka termasuk pada sektor perdagangan informal.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo adalah PKL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2007 tentang: “Larangan PKL berjualan di trotoar jalan, bahu jalan, dan taman. PKL yang ketahuan melanggar, diberikan himbauan untuk tidak melakukannya lagi”. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009, antara lain mengatur untuk bagaimana menata dan merelokasi PKL di tempat yang telah diatur oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo.

Pedagang kaki lima tumbuh berkembang karena usahanya yang sederhana tanpa adanya struktur birokrasi yang berbelit-belit. Karena Banyaknya pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya yang menjajakan jualanya diseputaran alun-alun Sidoarjo membuat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo melakukan langkah strategis dalam menata dan mengelola pedagang kaki lima yakni dengan mengimplementasikan kebijakan relokasi terhadap para PKL. Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah penanganan permasalahan pedagang kaki lima dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menerapkan kebijakan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan lancar yakni melalui kebijakan relokasi bagi para PKL khususnya para PKL yang berjualan disekitaran

Alun-alun. Para pedagang kaki lima yang berdagang disekitaran Alun-alun dirasa sangat mengganggu ketertiban umum dan keindahan taman kota, hal ini menjadi dasar dari pengimplementasian kebijakan relokasi PKL dari alun-alun menuju ke GOR delta Sidoarjo.

Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa tempat usaha yang didirikan oleh para PKL tidak memperhatikan keindahan dan ketertiban kota. Dalam beberapa kasus sering terjadi PKL setelah berjualan tidak membongkar atau tidak membersihkan tempat dagangan mereka, adakalanya mereka membuat tempat usahanya yang semi permanen bahkan permanen. Selain itu juga para PKL diketahui bahwa di sepanjang jalur lambat, taman dan trotoar maupun area publik lainnya disetiap sudut kota Sidoarjo banyak dimanfaatkan oleh para PKL. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Pertumbuhan PKL yang begitu pesat di Kabupaten Sidoarjo khususnya yang berjualan diseputaran alun-alun yang tidak terkendali akan merusak keindahan alun-alun dan sekitarnya disamping itu juga para PKL berjualan semanya tanpa menghiraukan kepentingan publik. Kenyataan seperti inilah yang mendorong pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan kebijakan relokasi para PKL”.* (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Hal seperti itulah maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan reloasi untuk mengatur PKL menurut karakteristik PKL yang ada. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih mempermudah pengaturan dan keseragaman dalam penanganan PKL sehingga di samping PKL sebagai aset



ekonomi daerah, PKL juga sebagai aset pariwisata yang khas di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Bapak Mohamad Edi Kurniadi, ST, MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan Pedagang kaki lima yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No.2 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan PKL. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Para PKL pada waktu itu perkembangannya begitu pesat sekali dan kurang terkendali, mereka berjualan di tempat semaunya mereka sendiri sehingga kota Surakarta terkesan tidak rapi, hal seperti ini yang mendorong pemerintah kota untuk mengeluarkan peraturan daerah tersebut sehingga diharapkan PKL dapat tertata dengan rapi dan indah”.*  
(Hasil Wawancara dengan Bapak Mohamad Edi Kurniadi, ST, MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 13.03 WIB di ruang kerja beliau pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Mohamad Edi Kurniadi, ST, MM tersebut diatas, Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kegiatan relokasi PKL yang ada di Alun-alun Sidoarjo, keindahan dan ketertiban kota dapat ditata kembali. Hal ini selain dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, kegiatan relokasi terhadap pedagang kaki lima dimaksudkan juga untuk memusatkan segala aktivitas dan kegiatan berjualan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima yang ada di



Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih tertata dan tidak menimbulkan kesemerawutan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*”Sangat sulit mengatur mereka dan banyak juga PKL menggunakan area-area kepentingan publik bahkan mereka tidak tertib kalau jualan, itu sebabnya apabila tidak ditangani malah mengganggu keindahan kota. Salah satu alasan inilah pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus merelokasi PKL yang berjualan disekitaran alun-alun atau tempat-tempat umum yang ada di di Kabupaten Sidoarjo”.* (Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah berusaha menertibkan Pedagang Kaki Lima ditempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk berjualan. Akan tetapi, pada awal tahun 2017, para PKL mulai menempati Kawasan Perumahan Taman Pinang Indah maupun berjualan secara kucing-kucingan di Alun-alun kabupaten sidoarjo. Adapun latar belakang para PKL menempati Kawasan tersebut yang dikemukakan oleh Ibu Cucuk Sumiyati sebagai salah satu pedagang kaki lima yang berjualan makanan ringan. Beliau mengungkapkan bahwa sejak direlokasi oleh pemerintah menuju ke GOR Delta Sidoarjo, jumlah pendapatan yang diperoleh sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan oleh sepiunya jumlah para pembeli. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Saya dan teman-teman yang mulanya berada di Alun-alun Sidoarjo di relokasi di empat tempat, salah satunya yaitu Gor. Dari awal memang enggak nyaman dan pengunjung juga sepi makanya ada beberapa PKL yang tidak menempati lokasi yang ada di Gor Delta dan malah kembali bermain kucing-kucingan di kawasan Alun-alun maupun disekitaran Kawasan Taman Pinang karena banyak pengunjung dan tempatnya sangat strategis sehingga banyak PKL yang lebih memilih berdagang di lokasi Taman Pinang.”* (Hasil Wawancara dengan Ibu Cucuk Sumiyati sebagai

salah satu pedagang kaki lima yang berjualan makanan ringan, pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 15.24 WIB di Gor Delta Sidoarjo)

Pendapat Ibu Cucuk Sumiyati terkait dengan kegiatan berjualan para pedagang kaki lima yang justru memilih lokasi lain maupun dengan bermain kucing-kucingan daripada berjualan di seputaran GOR Delta juga ditambahkan oleh Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini telah mendapatkan keluhan dari beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran GOR Delta Sidoarjo bahwa sepiunya jumlah pengunjung serta pendapatan para PKL yang setiap harinya tidak menentu menyebabkan beberapa pedagang kaki lima justru ada yang kembali berjualan disekitaran Alun-alun secara sembunyi-sembunyi serta ada juga beberapa pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan berjualan diseputaran Taman Pinang. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*"Memang hingga kini masih ada beberapa PKL yang berjualan secara sembunyi-sembunyi, hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa PKL yang mengeluhkan sepiunya pengunjung yang ada di GOR. Bahkan menurut pantauan kita, ada juga beberapa PKL yang tidak menempati GOR dan justru berjualan disekitaran Perumahan Taman Pinang".* (Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak Willy Radityo, SP, jumlah PKL yang direlokasi ke Kawasan GOR Delta hingga bulan Agustus Tahun 2017 berjumlah sebanyak 183 orang yang berasal dari berbagai daerah. Jumlah para pedagang kaki lima yang berjualan di Gor Delta justru tidak sebanding dengan

jumlah PKL yang berjualan disekitaran taman pinang yakni sebanyak 207 pedagang. Bapak Ahmad Mastori yang berprofesi sebagai PKL yang setiap harinya berjualan es kelapa muda mengungkapkan bahwa PKL yang berjualan di Taman Pinang merupakan sebagian besar dari PKL yang direlokasi oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo untuk berjualan di Gor Delta. Para PKL yang menolak untuk direlokasi lebih memilih untuk berjualan di sekitaran perumahan Taman Pinang sebab para PKL menganggap bahwa lokasinya sangat strategis dan sangatlah ramai dikunjungi oleh pembeli. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Ya Kita dulu memang juga dipindah ke GOR mas tapi memang karena kalau jualan disana itu pengunjungnya sepi mas enggak sama kalau kita jualan di taman pinang. Banyak yang beli. Lagian kalau jualan di Taman Pinang kan tempatnya agak luas dan strategis kalau disini.”* (Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mastori yang berprofesi sebagai PKL yang setiap harinya berjualan es kelapa muda, pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 15.24 WIB di Jalan Taman Pinang)

Menanggapi pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Cucuk Sumiyati dan Bapak Ahmad Mastori yang berprofesi sebagai PKL, Bapak Drs. Asrorudin selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa pemerintah masih belum dapat merelokasikan para pedagang kaki lima secara serta merta khususnya bagi para pedagang yang berjualan di kawasan Taman Pinang untuk berjualan di GOR Delta sebab daya tampung GOR Delta sudah tidak mencukupi lagi untuk menampung para PKL yang berasal dari Taman Pinang. Selain itu, Bapak Drs. Asrorudin selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menambahkan bahwa pemerintah daerah hingga

kini masih belum menemukan lokasi alternatif yang dapat digunakan untuk merelokasikan para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran Taman Pinang selain di daerah GOR Delta Sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*"Jika berbicara soal ijin, kawasan taman pinang memang tidak diijinkan dan tidak diperuntukan dalam melakukan kegiatan perdagangan oleh PKL, namun memang kesulitan yang kita hadapi yaitu karena sampai saat ini kita maih belum menemukan lokasi alternatif dan strategis selain GOR Delta untuk menampung para PKL yang telah berjualan di kawasan Taman Pinang".* (Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asrorudin selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 10.07 WIB di ruang kerja beliau pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan dengan bertambah banyaknya pedagang kaki lima dikawasan Taman Pinang telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyak PKL yang menempati kawasan Taman Pinang hingga Gading Fajar tanpa adanya perizinan tempat dari pemerintah setempat, karena ditempat tersebut banyak pengunjung dan lokasinya strategis. Seharusnya penataan lokasi PKL harus di setting sedemikian rupa sehingga tidak ada gejolak lagi dan penataannya harus bisa mengakomodasi kepentingan pedagang. Hal-hal yang mengenai PKL sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. peraturan pelaksana yang menunjang dalam terlaksananya kebijakan Pedagang Kaki Lima sudah tertera dalam Permendagri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, ada juga di

Peraturan Bupati sidoarjo Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo.

Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke kawasan GOR Delta Sidoarjo merupakan suatu mekanisme pelaksanaan kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai prosedur operasional dalam menertibkan dan menata kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh PKL maupun untuk menjaga ketertiban umum yang ada di Kabupaten Sidoarjo dimana didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo membaginya kedalam 3 bagian proses didalam merelokasikan para pedagang kaki lima yang berjualan di GOR Delta yakni :

#### **4.2.1.1 Sosialisasi dan Pendataan**

Dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi bagi pedagang kaki lima yang beada di alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo, Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo serta dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo berdasarkan peraturan daerah no.8 tahun tahun 1995 dan ditindak lanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2001 maka sebelum melakukan kegiatan relokasi, pemberian informasi yang dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada PKL di alun-alun. Bapak Drs. Asrorudin selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa Hal ini dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Sidoarjo terhadap PKL yang berjualan di Alun-alun yang dilakukan secara bertahap. Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo serta dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu memberikan informasi terkait dengan pengimplementasian kebijakan relokasi secara langsung kepada masing-masing pedagang atau *door to door*, penyampaian secara lisan yakni dengan memberikan surat pemberitahuan serta bekerjasama dengan phak LSM didalam menggelar kegiatan sosialisasi bagi para pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun setelah itu dilanjutkan dengan proses pendataan PKL yakni dengan melakukan pengumpulan identitas seperti kartu tanda pengenalan (KTP). Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*"Untuk kegiatan Sosialisasi sebelum kita merelokasikan semua pedagang yang ada di Alun-alun, memang kita disaat sebelumnya sudah memberikan informasi yakni dengan penyampaian secara door to door atau langsung kepada masing-masing PKL, pemberian surat pemberitahuan, serta melakukan kerjasama dengan teman-teman dari LSM lalu kita lanjutkan untuk mendata jumlah PKL yang kita lakukan dengan mengumpulkan kartu identitas dari seluruh PKL yang akan direlokasi".* (Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asrorudin selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 10.07 WIB di ruang kerja beliau pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Menanggapi pendapat Bapak Drs. Asrorudin selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Cucuk Sumiyati sebagai salah satu pedagang kaki lima yang berjualan makanan ringan membenarkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pemberitahuan secara langsung, pemberitahuan secara lisan yakni dengan memberikan surat, serta melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima.



Beliau menambahkan bahwa dari pemerintah dalam hal ini yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan disaat sebelum dilakukannya kegiatan relokasi, Ibu Cucuk Sumiyati dan teman-teman pernah dikumpulkan disamping Alun-alun untuk diberikan arahan terkait dengan larangan berjualan serta diberitahukan terkait dengan akan adanya relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun untuk direlokasikan ke GOR Delta Sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Iya mas, sebelum aparat menertibkan kami sebagai PKL yang berjualan di alun-alun, kami terlebih dahulu didatangi oleh petugas dari DLHK maupun dari Satpol. Mereka memberikan penjelasan kepada kami hal-hal yang tidak boleh kami lakukan berjualan di tempat yang tidak semestinya. Kemudian beberapa hari kemudian para PKL dikumpulkan di samping alun-alun untuk diajak berdialog oleh petugas kantor dan kami diberikan arahan-arahan bahwa akan ada pemindahan PKL ke tempat sekarang ini (GOR Delta) kepada kami”.*(Hasil Wawancara dengan Ibu Cucuk Sumiyati sebagai salah satu pedagang kaki lima yang berjualan makanan ringan, pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 15.24 WIB di Gor Delta Sidoarjo)

Menambahkan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Asrorudin selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan Ibu Cucuk Sumiyati selaku pedagang kaki lima, Bapak Toyib Ginanjar selaku ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima GOR Delta mengungkapkan bahwa memang benar bahwa sebelum dilaksanakannya kegiatan relokasi bagi para pedagang yang berjualan dialun-alun ke GOR Delta, dirinya dan para pedagang kaki lima yang telah berjualan di Alun-alun telah mendapatkan informasi baik secara langsung maupun secara lisan dari DLHK maupun diberikan peringatan dari Satpol PP kabupaten Sidoarjo terkait dengan akan



dilaksanakannya relokasi pedagang kaki lima ke GOR Delta Sidoarjo. Namun beliau sedikit mengecewakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah didalam memberikan sosialisasi maupun penyampaian informasi terkait dengan akan adanya kegiatan relokasi dimana beliau menilai bahwa pemerintah daerah dalam melakukan relokasi PKL ke GOR Delta tidak secara serta merta memperhatikan dan mendengarkan masukan yang diberikan oleh pedagang kaki lima. Beliau beranggapan bahwa pemerintah daerah justru hanya menjalankan kebijakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadaan dan kondisi yang akan terjadi sesudah kegiatan relokasi dilakukan dimana para pedagang kaki lima dihadapkan oleh jumlah pendapatan yang menurun secara drastis dikarenakan oleh kurangnya minat belanja dan sepiunya para pengunjung yang datang ke GOR Delta. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Memang benar mas bahwa sebelum direlokasi kesini, saya dan teman-teman sudah mendapatkan pemberitahuan dari Dinas maupun dari Satpol bahwa kita nanti akan direlokasi ke GOR. Namun yang perlu diperhatikan juga yaitu pemerintah daerah sepertinya tidak mempertimbangkan masukan dari teman-teman PKL, kita hanya diajak berdialog tetapi pemerintah daerah langsung mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan bagaimana nasib kita kedepannya”* (Hasil Wawancara dengan Bapak Toyib Ginanjar selaku ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima GOR Delta, pada tanggal 4 November 2017 pukul 16.07 WIB di Gor Delta Sidoarjo)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini melalui dinas lingkungan hidup dan kebersihan serta satuan polisi pamong praja kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa sebelum direlokasi ke GOR Delta, PKL yang

berjualan di Alun-alun sudah pernah memperoleh sosialisasi yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta para petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Sosialisasi itu lewat rapat yang bersifat formal maupun informal. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mendukung langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima menuju ke GOR Delta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan berbagai saluran informasi yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo didalam mensosialisasikan akan adanya pengimplementasian kebijakan relokasi sudah dilaksanakan dengan baik. Pertemuan yang dilakukan dengan para PKL bertujuan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang peraturan daerah yang mengatur para PKL, sehingga diharapkan PKL dapat mentaati peraturan tersebut. Di dalam melakukan pertemuan pemerintah kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satuan Polisi Pamong Praja melakukan secara kontinyu sehingga diharapkan PKL benar-benar memahami dan menaati peraturan yang telah di sosialisasikan terkait dengan adanya kegiatan Relokasi dari alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo.

#### **4.2.1.2 Penetapan Lokasi Usaha**

Penetapan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima yang berada di Alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di

Kabupaten Sidoarjo pada bab 2 pasal 2 ayat ke 3 menyatakan bahwa “Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya perlu mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya dan keadaan pasar. Tempat yang nantinya dijadikan pertimbangan dan digunakan untuk PKL dalam pembuatan kebijakan ini merupakan tempat yang strategis dan benar-benar potensial, karena diharapkan tempat yang baru dapat digunakan untuk jangka panjang atau permanen, PKL disana diminta untuk pindah yang berujung pada munculnya kebijakan Penertiban tempat usaha dan pembinaan PKL untuk merelokasi PKL yang berjualan di alun-alun ke tempat yang lebih layak yakni di GOR Delta Sidoarjo.

Menurut Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa Kepala daerah yang dalam hal ini yaitu Bupati Sidoarjo menetapkan lokasi relokasi kegiatan para pedagang kaki lima dari Alun-alun Sidoarjo menuju ke Gor Delta Sidoarjo dikarenakan oleh beberapa pertimbangan yakni adanya penolakan dari beberapa pedagang kaki lima akan beberapa tempat alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. salah satu lokasi yang akhirnya menjadi tempat relokasi bagi pedagang yang berjualan di sekitaran Alun-alun akhirnya diputuskan oleh pemerintah daerah yakni di GOR Delta Sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Kewenangannya memang untuk penetapan lokasi sebagai tempat relokasi PKL sudah diatur Perda yang mana bupati sidoarjo sebagai kepala daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan lokasi melalui berbagai pertimbangan salah satunya penetapan lokasi dimana para pedagang yang berjualan di alun-alun direlokasikan ke GOR Delta Sidoarjo“. (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin*

selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Menanggapi pendapat Bapak Harindra Djajati, SH, MM tentang Penetapan tempat relokasi para pedagang kaki lima ke GOR Sidoarjo, Bapak Toyib Ginanjar selaku ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima GOR Delta mengungkapkan bahwa hampir sebagian besar pedagang kaki lima memang merasa tidak adil dan dirugikan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi GOR Delta sebagai tempat relokasi bagi para pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun. Hal ini menurut beliau dikarenakan bahwa berdasarkan pengamatannya, GOR Delta tempatnya letaknya kurang strategis serta intensitas pengunjung yang datang tidaklah sebanding dengan jumlah pengunjung yang ada di Alun-alun Sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Iya mas, kan dari awal sebelum direlokasi kesini, saya dan beberapa teman-teman paguyuban sudah lakukan pengamatan dan sudah kita laporkan ke pemerintah daerah. Kita menilai bahwa lokasi sekarang ini sangatlah sepi jumlah pengunjungnya, tidak seperti yang ada di alun-alun.. nahn.. kan sekarang terbukti juga karena memang banyak teman-teman yang mengeluh karena pendapatan mereka sangatlah kecil jika dibandingkan ketika berjualan di alun-alun. Kalau mau dibilang rugi ya kita-kita yang rugi lah mas”* (Hasil Wawancara dengan Toyib Ginanjar selaku ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima GOR Delta, pada tanggal 4 November 2017 pukul 16.07 WIB di Gor Delta Sidoarjo)

Setelah penempatan di GOR Delta Sidoarjo, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan pengaturan dalam pembagian lahan dan tenda serta waktu berdagang. Bapak Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa melalui penetapan lokasi berdagang diharapkan agar dalam menjalankan aktivitasnya, para pedagang kaki lima lebih teratur dan tertata dengan rapi. Pengaturan didalam berjualan bagi para pedagang kaki lima didasari atas kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja dan para pedagang kaki lima yang berjualan di GOR Delta Sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*”Untuk penetapan lokasi berdagang memang sebelumnya sudah ada dialog terbuka yang kita lakukan dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan serta para pedagang kaki lima yang akan direlokasi. Untuk pengaturannya, sudah kita sepakati sedemikian rupa termasuk didalamnya seperti pembagian tenda jualan sampai pada besaran lapak yang untuk semua pedagang mendapatkan besaran lapak yang sama”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Penedialian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 3 November pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)*

Namun berbeda dengan kenyataan dilapangan disaat peneliti melakukan observasi, masih terdapat beberapa petak jualan yang kosong dan tidak digunakan oleh para pedagang. Para pedagang lebih memilih untuk berjualan ditempat lain seperti halnya yang ditemui di kawasan taman pinang. Ada juga pedagang yang memilih petak jualan tidak berdasarkan pengelompokan jenis dagangan yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan memilih untuk berbaur dengan para pedagang lain yang berbeda jenis barang dagangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan akan tempat jualan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo masih belum berjalan dengan baik. dalam pengaturan dalam berjualan, masing-

masing pedagang mendapatkan luas petak yakni 9 m persegi dengan lamanya waktu berjualan yakni tidak melebihi waktu yang telah ditentukan yakni hanya diperbolehkan pada pukul 01.00 WIB

Menanggapi temuan peneliti di lapangan akan masih adanya para pedagang yang memilih untuk berjualan didaerah lain maupun tidak menempati petak jualan yang telah disediakan oleh pemerintah di kawasan GOR Delta Sidoarjo, Bapak Toyib Ginanjar selaku ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima GOR Delta mengungkapkan bahwa hal ini memang seharusnya menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah mengapa sampai masih adanya para pedagang yang keluar dari GOR Delta maupun masih ada pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan pengelompokan jenis barang dagangan. Menurut beliau, hal ini lebih dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang ada di GOR Delta Sidoarjo masih belum memungkinkan bagi para pedagang untuk melakukan kegiatan berdagang. Sepinya pengunjung serta letaknya dinilai kurang strategis, menyebabkan para pedagang lebih memilih untuk berbaur dengan jenis barang dagangan lain yang tidak sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Seperti tadi ya mas yang sudah saya singgung bahwa ini seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah.teman-teman langsung ditempatkan untuk berjualan di GOR tetapi pemerintah justru tidak pernah melakukan kajian terlebih dahulu tentang situasi dan kondisi dari para pengunjung yang datang ke GOR. Seperti sekarang ini mas, kalau banyak penjual yang berjualan tidak sesuai dengan jenis dagangannya, itu memang karena disini sangat sepi akan pengunjung”* (Hasil Wawancara dengan Toyib Ginanjar selaku ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima GOR Delta, pada tanggal 4 November 2017 pukul 16.07 WIB di Gor Delta Sidoarjo)



Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan melakukan penetapan lokasi. Penetapan lokasi berdagang sebelumnya telah diatur didalam peraturan daerah nomor Nomor 7 Tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten sidoarjo pada bab 2 pasal 2 ayat ke 3 menyatakan bahwa “Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya perlu mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya dan keadaan pasar. Dalam penetapan lokasi, terdapat pengaturan-pengaturan termasuk didalamnya yakni besaran lapak yang masing-masing pedagang mendapatkan besaran yang sama, pengaturan lamanya berjualan serta pengaturan jenis dagangan yang diajakan oleh para pedagang. dalam pengaturan dalam berjualan, masing-masing pedagang mendapatkan luas petak yakni 9 m persegi dengan lamanya waktu berjualan yakni tidak melebihi waktu yang telah ditentukan yakni hanya diperbolehkan pada pukul 01.00 WIB. Namun berbeda dengan kenyataan dilapangan disaat peneliti melakukan observasi, masih terdapat beberapa petak jualan yang kosong dan tidak digunakan oleh para pedagang. Para pedagang lebih memilih untuk berjualan ditempat lain seperti halnya yang ditemui di kawasan taman pinang. Ada juga pedagang yang memilih petak jualan tidak berdasarkan pengelompokan jenis dagangan yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan



memilih untuk berbaur dengan para pedagang lain yang berbeda jenis barang dagangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan akan tempat jualan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo masih belum berjalan dengan baik.

#### **4.2.1.3 Kegiatan Pembinaan**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo maka dibentuk Tim Pembina Pedagang Kaki Lima seperti yang termuat di dalam pasal 9 ayat (1). Adapun susunan anggota Tim Pembina PKL sebagai berikut :

- a. Asisten I Sekda Kabupaten Sidoarjo sebagai Ketua
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagai Wakil Ketua
- c. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo sebagai Sekrkretaris
- d. Komandan Pelaksana Harian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sebagai Wakil Sekretaris
- e. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai Anggota
- f. Bagian Hukum Sekda Kabupaten Sidoarjo sebagai Anggota
- g. Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Sidoarjo sebagai anggota

Tugas Tim pembina PKL sebagaimana tersebut dalam pasal 9, adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis kewirausahaan kepada PKL.
- b. Memberikan pertimbangan dan sarana lokasi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk tempat usaha PKL
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

Menurut Bapak Ir.Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terhadap para PKL yang telah direlokasi ke GOR Delta Sidoarjo dilakukan dengan berbagai jalur diantaranya dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, *door to door* atau mengumpulkan mereka kesuatu tempat kemudian dilakukan pembinaan. Kegiatan pembinan ini dimaksudkan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara pemerintah daerah dan para pedagang yang telah direlokasi ke GOR Delta. Beliau menambahkan bahwa didalam memberikan pembinaan kepada para PKL, Dinas Lingkungan Hidup juga mengedepankan aspek kebersihan bagi para PKL didalam menjalankan kegiatan berdagang seperti halnya dengan memberikan pembinaan terkait dengan kebersihan makanan yang di jajakan maupun pengaturan kebersihan akan sanitasi didalam pembuangan limbah hasil jualan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Pembinaan yang kami lakukan mengutamakan pendekatan secara dialogis, Hal ini agar tidak terjadi benturan kepentingan kepada para pedagang yang telah direlokasi yakni melalui kegiatan Door to door juga kami lakukan di dalam pembinaan tersebut. Penyuluhan yang dilakukan diantaranya kebersihan sanitasi, menggunakan sarung tangan dalam berjualan atau juga menggunakan celemek”.* (Hasil Wawancara dengan

Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Menanggapi pendapat Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Aji Nur Rohman Selaku PKL yang kesehariannya berjualan bakso dan siomay juga mengungkapkan bahwa setelah direlokasi, khususnya para pedagang makanan yang berjualan di GOR dikumpulkan di kantor kelurahan untuk diberikan pembinaan terkait dengan usaha dagangan yang dijalankan. Beliau menambahkan bahwa didalam kegiatan pembinaan yang diberikan yang biasanya dilakukan selama 1 kali dalam 2 bulan, dirinya dan para PKL yang berjualan di GOR Delta hanya sebatas diberikan penyampaian agar mereka tidak kembali berjualan ditempat-tempat umum yang dilarang oleh pemerintah daerah serta lebih memperhatikan kebersihan makanan yang dijual. Namun begitu, beliau mengaku bahwa alangkah lebih baik apabila para PKL yang telah direlokasi tidak hanya sebatas diberikan pembinaan dan pengarahan melainkan juga perlu diberikan bantuan modal didalam menjalankan usaha mengingat kondisi yang dihadapi ketika berjualan di GOR Delta dari sisi pendapatan perhari sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan sewaktu masih berjualan di Alun-alun. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Kami biasanya dalam dua bulan sekali dikumpulkan di kelurahan, di sana kami diberikan pengarahan dan pembinaan di dalam menjalankan usaha. Pembinaan hanya berupa peringatan-peringatan agar kami tidak melanggar peraturan daerah. Sebenarnya yang kami harapkan bantuan dalam berusaha agar usaha kami bisa lebih baik dan maju dikemudian hari”* (Hasil Wawancara dengan Bapak Aji Nur Rohman Selaku PKL yang

kesehariannya berjualan bakso dan Somai, pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 16.07 WIB di Gor Delta Sidoarjo)

Dari keterangan tersebut diatas, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo mengedepankan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan masih jauh dari harapan PKL yang telah direlokasi ke GOR Delta yaitu ingin memajukan usahanya atau meningkatkan taraf hidup mereka. Pembinaan yang dilakukan masih sebatas peringatan terhadap pelanggaran yang dilakukan PKL tanpa memperhatikan tingkat pendapatan yang menjadi keluhan utama dari para pedagang kaki lima setelah direlokasikan ke GOR Delta Sidoarjo. Menanggapi keluhan ini, Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sedang mengupayakan langkah-langkah agar PKL yang berjualan di GOR Delta mentaati peraturan daerah serta dapat meningkatkan tingkat pendapatan dari para pedagang kaki lima yang telah direlokasikan ke GOR Delta yaitu diantaranya dengan menggandeng pihak swasta didalam penyelenggaraan pesta rakyat, pasar malam, serta acara-acara berupa hiburan band yang diadakan disekitaran GOR Delta guna memancing para pengunjung dan meningkatkan pemasukan dari para pedagang kaki lima yang telah direlokasi ke GOR Delta. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau.

*“Kita tentu selalu mengupayakan agar baik masyarakat khususnya pkL yang telah direlokasi maupun masyarakat umum tidak merasa dirugikan dari adanya kebijakan ini. terkait dengan rendahnya pemasukan yang diperoleh sejak direlokasi ke GOR, sampai saat ini kita telah berupaya untuk menggandeng peran pihak swasta didalam penyelenggaraan pasar rakyat maupun kegiatan hiburan”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan, pada tanggal 7 November 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja beliau pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)*

Setelah memahami apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, kegiatan pembinaan dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dilakukan dengan Pembinaan terhadap para PKL yang telah direlokasi ke GOR Delta Sidoarjo dilakukan dengan berbagai jalur diantaranya dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, *door to door* atau mengumpulkan mereka kesuatu tempat kemudian dilakukan pembinaan. Kegiatan pembinaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara pemerintah daerah dan para pedagang yang telah direlokasi ke GOR Delta.

Terkait dengan proses pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima di alun-alun Sidoarjo ke GOR Delta Sidoarjo, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan tentu harus diimplementasikan agar dampak atau tujuan adanya kebijakan dapat tercapai dimana kebijakan hanya akan menjadi sebuah catatan diatas kertas apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam proses pengimplementasian kebijakan publik terdapat beberapa model yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implemtasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, dimana Model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III menyatakan bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat (4) variabel yakni

komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut ini dapat dijelaskan masing-masing variabel yang terkait dengan Implementasi Kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Alun-alun Sidoarjo ke GOR Delta Sidoarjo yakni sebagai berikut

**a. Komunikasi**

Komunikasi dalam proses implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusioanal yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam komunikasi, pesan-pesan disampaikan dan juga berbagai informasi terkait pelaksanaan dari suatu kebijakan. Komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan kesalahan pahaman yang menimbulkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan baik. Komunikasi dilakukan antar sesama implementor atau badan pelaksana kebijakan dan juga komunikasi kepada kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses implementasi, semua pelaksana sudah seharusnya memahami dan mendukung apa yang menjadi tujuan kebijakan. Faktor kepemimpinan sangat berperan dalam mengatur bawahannya atau implemntor memmunyai pemahaman dan dukungan terhadap tujuan dari organisasi.

Selain komunikasi yang dilakukan dengan sesama implementor atau badan pelaksana di Kabupaten Sidoarjo, implementor juga melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat luas khususnya bagi para pedagang kaki lima yang telah direlokasikan ke GOR Delta..



Komunikasi yang dilakukan adalah berupa sosialisasi atau penyuluhan kepada para pedagang kaki lima terkait dengan pengimplementasian kebijakan relokasi PKL serta kegiatan pengaturan didalam melakukan relokasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. terkait dengan komunikasi yang dibangun didalam pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berada di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo, Bapak Ir.Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjalin selama ini antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Pembina PKL yang didalamnya melibatkan Dinas-Dinas terkait maupun maupun berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung bersama dengan para pedagang kaki lima telah berjalan dengan sangat bagus dimana sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bertanggung jawab didalam memonitoring Implementasi dari kebijakan relokasi PKL khususnya pra PKL yang berjualan di GOR Delta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo juga berkomunikasi dengan pihak swasta dalam menggelar event-event maupun kegiatan hiburan di daerah GOR Delta. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau.

*“Sangat baik ya mas dalam hal komunikasi karena sebagai satuan kerja yang ditunjuk tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita selalu berkomunikasi dengan OPD yang terlibat didalam tim pembina pihak swasta, maupun dengan membangun komunikasi dengan para pedagang yang telah kita relokasikan ke GOR. Pihak swasta sendiri bertindak sebagai pengelola kegiatan seperti halnya kayak hiburan band ataupun seperti pasar rakyat yang kita gelar di GOR .”* (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup



dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Kejelasan isi pesan yang disampaikan akan sangat mempengaruhi penerima pesan. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari program. Karena pesan yang jelas atau tidak samar-samar akan menghindari penafsiran menyimpang dari yang dimaksudkan. Selain itu juga harus memperhatikan aspek konsistensi. Suatu pesan yang disampaikan haruslah konsisten, karena jika pesan yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi penerima pesan. Dimana pesan tersebut haruslah mempunyai kesesuaian antara apa yang diberikan oleh pengirim pesan dengan petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan dan dengan yang disampaikan oleh media lain ( media cetak dan elektronik).

Dalam pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo, antara lain mengatur untuk bagaimana menata dan merelokasi PKL di tempat yang telah diatur oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo, sarana komunikasi yang digunakan dalam memberikan informasi yang digunakan tidak hanya berupa pemberian surat melainkan menggunakan berbagai media cetak dan elektronik. Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Mengungkapkan bahwa penyampaian informasi serta pesan kepada masyarakat khususnya bagi para

pedagang tidak lepas juga akan komunikasi yang baik dengan pihak satuan polisi pamong praja saling bahu membahu melengkapi informasi melalui media cetak seperti Koran (Jawa Pos, Kompas, dan sebagainya), Spanduk atau banner yang dipasang di depan Rumah Sakit, di jalan-jalan strategis maupun tempat-tempat umum. Berikut ini peneliti juga menampilkan kegiatan pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan informasi kepada masyarakat maupun kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun sebelum direlokasikan ke GOR Sidoarjo.



**Gambar 7 Dialog antara DLHK yang dilakukan bersama dengan Para PKL yang menempati GOR Delta, 2015**

*Sumber : Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 2015*

Disamping itu, bentuk komunikasi juga dilakukan yakni dengan memberikan sosialisasi serta menggelar kegiatan dialog dengan para pedagang

yang telah direlokasi ke GOR setiap 1 kali dalam 2 bulan, serta melakukan rapat dengar pendapat antar instansi yang masuk sebagai tim pembina pedagang kaki lima. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

*“Koordinasi dan komunikasi yang kita bangun baik sebelum pedagang direlokasi maupun setelah direlokasi telah kita bangun dengan baik. kita mengupayakan agar baik masyarakat khususnya pkL yang telah direlokasi maupun masyarakat umum tidak merasa dirugikan dari adanya kebijakan ini.”.* (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan, pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja beliau pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagai Dinas pelaksana relokasi pedagang kaki lima ke GOR Sidoarjo saat ini berupaya untuk memberikan penyuluhan bagi para pedagang yang telah berjualan di GOR Delta maupun bagi masyarakat umum di Kabupaten Sidoarjo untuk sama-sama bagaimana menjaga ketertiban dan kondisi lingkungan kabupaten sidoarjo yang lebih tertata untuk tidak kembali lagi berjualan di tempat-tempat yang telah dilarang seperti halnya kembali berjualan ke Alun-alun Sidoarjo.

Akan tetapi tidak semua pedagang kaki lima yang telah direlokasi ke GOR Delta Sidoarjo dengan mudah menerima kebijakan relokasi yang dibuat oleh pemerintah. Banyak dari mereka yang tidak tahu atau bersikap acuh terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Seperti hasil wawancara kepada salah seorang pedagang kaki lima yaitu Bapak Sutrisno Soleh yang kesehariannya berjualan pakaian anak-anak di GOR Delta. Beliau mengungkapkan bahwa dalam pemberian informasi, komunikasi yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tidak melibatkan keseluruhan Pedagang melainkan hanya melalui ketua paguyuban maupun para pengurus paguyuban. Jika ada pedagang yang ikut dilibatkan untuk berdialog, itu merupakan pedagang kaki lima yang memang sudah sangat lama telah berjualan sebagai PKL. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Saya tidak tahu dan tidak pernah mas kalau untuk diajak berkomunikasi atau dialog bersama dengan pemerintah khususnya untuk kami pedagang disini. Biasanya yang menyampaikan tata tertib itu kepala paguyuban sama pengurus-pengurus paguyuban, kalau pegawai dinas menarik iuran, pernah juga sesekali ngasih informasi tapi itupun sudah lama mas”* (Hasil Wawancara dengan Bapak Sutrisno Soleh yang kesehariannya berjualan pakaian anak-anak, pada tanggal 04 November 2017 pukul 14.48 WIB di di lokasi jualan beliau di GOR Delta Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Sutrisno Soleh, juga ditambahkan oleh Bapak Ashatul Hanifah, SP selaku Kasi Perencanaan dan Pengendalian Sat.Pol PP Kabupaten Sidoarjo yang mengungkapkan bahwa masih adanya beberapa pedagang kaki lima yang tidak mengetahui aturan-aturan yang berlaku meskipun telah direlokasi ke GOR Delta Sidoarjo meskipun dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo meskipun telah memberikan pengertian dan arahan baik berupa lisan maupun melalui tulisan. Hal inilah mengapa masih saja terdapat beberapa pedagang kaki lima yang justru kembali lagi berjualan secara sembunyi-sembunyi di seputaran Alun-alun maupun memilih untuk tidak menempati kawasan GOR Delta dan memilih untuk berjualan di daerah lain seperti halnya di kawasan Taman Pinang. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*”Kalau mau dibilang ya memang masih banyak juga mas pedgang yang acuh dan kurang maun bergabung dalam dialog ketika kita menyampaikan info terkait dengan relokasi. Itu sebabnya meskipun sudah direlokasi ke GOR, masih ada juga beberapa PKL yang jualannya kucing-kucingan sama kita, malahan ada yang sudah sempat direlokasi tapi malah keluar lagi dan jualan ditempat lain seperti yang ada di Taman Pinang”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengedalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 08 November 2017 pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)*

Bagi Para pedagang kaki lima yang tidak mau menempati tempat jualan di kawasan GOR Delta, yang mereka tahu yaitu terdapat tempat untuk berjualan di sisi jalan dan itu dianggap legal karena setiap hari terdapat retribusi. Tentang aturan lain seperti tempat yang tidak diperbolehkan untuk berdagang, batas penjualan dan sarana yang digunakan mereka tidak memahami. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, terdapat upaya komunikasi secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar seluruh pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat tempat yang dilarang termasuk juga beberapa PKL yang masih secara sembunyi sembunyi menggelar dagangannya untuk kembali dan dapat bergabung di tempat relokasi yakni di kawasan GOR Delta Sidoarjo.

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, komunikasi yang dibangun antar pihak didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya yakni melalui komunikasi dengan Tim Pembina Pedagang Kaki Lima, Pihak Swasta maupun dengan para pedagang kaki lima sendiri. Meskipun komunikasi yang dibangun didalam kebijakan relokasi PKL ke GOR telah



dilakukan semaksimal mungkin, dalam hasil penelitian lapangan, peneliti masih menemukan ketidak sesuaian dimana masih terdapat beberapa pedagang yang mengaku tidak dilibatkan didalam dialog yang dilakukan bersama dengan pihak DLHK. Dalam dialog ataupun tatap muka, hanya beberapa PKL saja yang dilibatkan, itupun hanya seperti ketua paguyuban PKL serta para pengurus yang duduk didalam paguyuban. Kalaupun ada pedagang yang dilibatkan itupun jumlahnya tidak begitu banyak dan hanya para pedagang yang telah lama berjualan saja yang dilibatkan ketika ada dialog maupun tatap muka bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun jika ada dialog bersama dengan pemerintah. Para pedagang mengaku hanya didatangi oleh pihak dinas hanya sebatas untuk menarik uang iuran/retribusi tempat jualan. Ketidak sesuaian inilah yang menimbulkan masih adanya beberapa pedagang yang justru tidak mau menempati tempat jualannya di kawasan GOR Delta dan memilih untuk berjualan di tempat-tempat lain yang dianggap strategis dan ramai akan pengunjung.

#### **b. Sumber daya**

Sumber daya merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia, dana (anggaran) diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran maupun peralatan yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas dimana kondisi ini dapat menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.

Dalam menunjang kegiatan pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun menuju ke GOR Delta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya ditunjang oleh sumber daya manusia tetapi juga ditunjang oleh sumber daya anggaran. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima menuju ke GOR Delta Sidoarjo dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### **1.1 Sumber daya Manusia**

Berbicara tentang organisasi sama halnya berbicaranya tentang aspek kelembagaan yang didalamnya termasuk kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kondisi sumberdaya manusia atau aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Jenis pendidikan serta jumlah pegawai yang terlibat dalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini (Hal.113):



**Tabel 5 Jumlah Pegawai DLHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Pegawai DLHK</b>		
<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	S2	3
2.	S1	27
3.	Diploma 3	8
4.	SMA	195
5.	SLTP	141
6.	SD	176
<b>TOTAL</b>		<b>548</b>

*Sumber: DLHK Kabupaten Sidoarjo, 2017*

Berdasarkan data pada tabel diatas, Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo saat ini justru justru lebih banyak dari dari pegawai yang hanya berlatarbelakang pendidikan di tingkat SMA yakni 195, tingkat SLTP sebanyak 141 orang dan tingkat SD sebanyak 176. Hal ini menunjukan bahwa komposisi pegawai yang ada dalam lingkup DLHK masih belum sebanding dengan jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan dengan lulusan S2 maupun S1 yang masing-masingnya berjumlah 3 orang dan 27 orang. Hal senada juga yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin, MM selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengungkapkan bahwa keterbatasan dari jumlah pegawai yang ada di DLHK Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu faktor penentu didalam proses pengimplementasian kebijakan

relokasi pedagang kaki lima untuk dipindahkan ke GOR Delta yang mana jumlah pegawai dari lulusan SMA, SLTP, dan SD masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai DLHK Sidoarjo dengan lulusan S1 maupun S2. Keterbatasan pada jumlah aparatur DLHK Sidoarjo membuat kontrol akan keberlangsungan kebijakan relokasi PKL ke GOR Delta tidak dapat dilakukan setiap saat maupun secara menyeluruh mengingat jumlah maupun kualitas SDM dari aparatur DLHK Sidoarjo masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Sebagai dinas yang ditunjuk sebagai penanggungjawab, kita selalu berusaha semaksimal mungkin walaupun jumlah pegawai maupun tingkat pendidikan masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada, itu sebabnya kita juga dibantu oleh teman-teman dari Satpol PP maupun bekerjasama dengan pihak swasta, kita dari DLHK hanya sebatas memonitoring sejauh mana pelaksanaan dari kegiatan relokasi para pedagang yang ada di alun-alun ketika dipindahkan ke GOR”* (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 08 November 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Berikut ini peneliti juga menampilkan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan didalam meningkatkan kapasitas dan kapasibilitas para pegawai baik itu aparatur DLHK maupun aparatur pada Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.



**Gambar 8 Pelatihan dan Sosialisasi Bagi Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Serta Satuan Pol PP Kabupaten Sidoarjo**  
*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2017*

Dalam menutupi kekurangan akan jumlah pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai koordinator penertiban didalam merelokasikan para pedagang kaki lima baik

didalam proses sosialisasi maupun proses relokasi para pedagang dari Alun-alun menuju ke GOR Delta. Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengedalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa baik pihak Satpol PP maupun pihak DLHK sama-sama memiliki kekurangan yakni minimnya sumber daya manusia yang perlu dilibatkan didalam mengawal berjalannya relokasi PKL ke GOR delta. Itu sebabnya menurut beliau, kerjasama dan komunikasi yang kuat antara kedua belah instansi merupakan salah satu jalan keluar didalam menentukan keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan relokasi PKL yang ada di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*"Kita sudah sering berdialog juga tentang kurangnya aparatur didalam menjalankan kebijakan ini baik itu dari kami sendiri maupun dari pihak DLHK. Kerjasama maupun koordinasi lintas sektoral yang kita lakukan memang sangatlah efektif agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dan tujuan dari relokasi sendiri dapat tercapai secara baik." (Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengedalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 08 November 2017 pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)*

Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengedalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga menambahkan bahwa didalam menutupi kekurangan dari SDM yang ada dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, baik sebelum maupun setelah melakukan relokasi selalu melakukan evaluasi secara internal didalam membenahi setiap kekurangan dalam menjalankan peraturan daerah yang didalamnya termasuk juga kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di kawasan Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo. Evaluasi secara internal dilakukan untuk membenahi setiap kekurangan



maupun kekeliruan dalam setiap proses yang ada sesuai yang telah diamanatkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak terjadi singgungan dengan para pedagang kaki lima yang akan direlokasi ke GOR Delta. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*"Kita sudah sering berdialog juga tentang kurangnya aparatur didalam menjalankan kebijakan ini baik itu dari kami sendiri maupun dari pihak DLHK. Kerjasama maupun koordinasi lintas sektoral yang kita lakukan memang sangatlah efektif agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dan tujuan dari relokasi sendiri dapat tercapai secara baik." (Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 09 November 2017 pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)*

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, bahwa sumber daya manusia merupakan modal penting dalam menggerakan atau menjalankan sebuah kegiatan ataupun kebijakan yang fungsinya adalah menggerakan setiap kegiatan didalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan. Sumber daya yang terlibat baik dalam merencanakan maupun mengimplemetasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya melibatkan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan saja melainkan juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang berperan sebagai koordinator dalam penertiban dalam proses relokasi para pedagang yang ada di alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo. Meskipun baik dari sisi jumlah

maupun kemampuan aparaturnya dinilai masih kurang, DLHK maupun Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sama-sama melengkapi kekurangan aparaturnya yakni dengan bekerjasama didalam proses relokasi pedagang yang ada di alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo.

### **1.2 Sumberdaya Anggaran**

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, yang tersedia maka proses implementasi dilapangan akan lebih mudah dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia lebih sedikit maka kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Ketersediaan dana dalam mendukung keberlangsungan dari setiap kegiatan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, semakin banyak dana Dana sangat berpengaruh terhadap penggunaan strategi dan cara-cara dalam implementasi kebijakan sehingga dengan tersedianya dana yang cukup maka implementasi akan dapat sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, akan tetapi jika dana yang tersedia kurang, cara-cara atau strategi implementasi kebijakan akan menyesuaikan besarnya jumlah dana yang tersedia dengan kata lain implementasi menyesuaikan jumlah dana yang tersedia.

Menurut wawancara peneliti bersama dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, beliau mengemukakan bahwa hingga saat ini ketersediaan dana sudah tidak menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pra

pedagang yang telah berdagang di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR, sebab setiap kegiatan yang dijalankan mendapatkan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo. Ketersediaan sumber daya finansial atau sarana prasarana yang mencukupi akan mendukung suatu keberhasilan kebijakan dan juga ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan dapat diandalkan akan sangat menentukan keberhasilan program. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Untuk masalah anggaran tentu bersumber sepenuhnya dari APBD Sidoarjo itu sebabnya hingga sejauh ini kita belum menemukan masalah merelokasikan para pedagang yang ada di alun-alun ke GOR.”* (Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengedalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)

Pendapat Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengedalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga ditambahkan oleh Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. beliau mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, dana yang digunakan memang bersumber dari APBD Sidoarjo dimana dalam melakukan proses relokasi, hal ini memang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Keseluruhan anggaran yang kita gunakan dalam menjalan kegiatan relokasi pedagang yang ada di alun-alun ke GOR memang secara penuh bersumber dari APBD Sidoarjo yang mana memang sudah diatur dalam perda.”* (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo,



pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, bahwa sumber daya anggaran ikut menjadi penentu dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan. Ketersediaan dana dalam mendukung keberlangsungan dari setiap kegiatan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, semakin banyak dana sangat berpengaruh terhadap penggunaan strategi dan cara-cara dalam implementasi kebijakan sehingga dengan tersedianya dana yang cukup maka cara-cara dan strategi implementasi akan dapat sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, akan tetapi jika dana yang tersedia kurang, cara-cara atau strategi implementasi kebijakan akan menyesuaikan besarnya jumlah dana yang tersedia dengan kata lain implementasi menyesuaikan jumlah dana yang tersedia.

Dalam proses pengimplementasian kebijakan terkait dengan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun untuk dipindahkan ke kawasan GOR Delta, secara keseluruhan berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo hingga sejauh ini belum menemukan hambatan yang berarti terkait dengan anggaran sebab berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua narasumber diatas mengungkapkan bahwa proses penyusunan kegiatan yang ada dalam kegiatan pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima disusun berdasarkan jumlah anggaran yang ada. hal ini memungkinkan setiap kegiatan yang dilakukan

dalam 1 tahun anggaran dapat dilaksanakan secara penuh tanpa dihadapkan dengan persoalan akan terbatasnya anggaran.

### **c. Disposisi**

Pelaksanaan sebuah kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila pelaksana atau implementor dari kebijakan itu sendiri memiliki komitmen dan konsisten terhadap aturan main yang berlaku. Fokus utama dari studi implementasi adalah persoalan tentang bagaimana organisasi berperilaku, atau bagaimana orang berperilaku dalam mencapai tujuan organisasi. Kecenderungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkah laku dari pelaksana program yaitu petugas lapangan apakah mendukung atau bertentangan dengan program yang mereka sampaikan.

Terkait dengan implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo, pelaksana kebijakan yang dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta dibantu oleh aparaturnya daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dinilai oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai para pedagang kaki lima masih belum mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya khususnya para aparaturnya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Bapak Nuryanto Wahid selaku masyarakat Kota Sidoarjo menuturkan bahwa meskipun kebijakan relokasi PKL telah dilaksanakan melalui dasar hukum yang jelas yakni melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo,

namun hingga kini masih saja ada beberapa pedagang kaki lima yang secara sembunyi-sembunyi menggelar dagangannya di kawasan Alun-alun Sidoarjo ketika sore hari. Beliau menambahkan bahwa para pedagang kaki lima yang kembali berjualan di Alun-alun lebih disebabkan karena masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DLHK maupun para petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja sehingga para pedagang masih dengan berani melakukan aktivitas jual beli disekitaran Alun-alun Sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Kan sudah jelas ya mas ini sudah ada Perda yang dikeluarkan biar pedagang enggak boleh lagi berjualan disini. tapi sepertinya sama saja sih saya lihat, soalnya kalau sudah mulai sore, memang tidak banyak tapi masih ada saja pedagang yang jualan disini apalagi yang jualan makanan kecil ataupun minuman. Ini mungkin perlu dimaksimalkan lagi pengawasan dari dinas lingkungan atau juga dari satpol pp”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Nuryanto Wahid selaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 8 November 2017 pukul 15.25 WIB di sekitaran kawasan alun-alun Kabupaten Sidoarjo)*

Pendapat Bapak Nuryanto Wahid terkait dengan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DLHK maupun para petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja sehingga para pedagang masih dengan berani melakukan aktivitas jual beli disekitaran Alun-alun juga ditambahkan oleh Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang diwawancarai oleh peneliti pada saat narasumber tengah berkunjung ke kawasan Alun-alun Sidoarjo. Beliau mengungkapkan bahwa memang kondisi Alun-alun saat ini sudah tidak semerawut lagi sebelum para pedagang kaki lima direlokasikan ke GOR Delta namun berdasarkan pengalaman beliau selama mendatangi alun-alun, masih ada juga beberapa pedagang asongan yang berjualan minuman dingin kepada para

pengunjung alun-alun. Para pedagang ini akan pergi apabila mereka telah mengetahui ada petugas Satpol PP yang melakukan patroli keliling. Hal ini tentu dapat menimbulkan ketidak patuhan secara berkepanjangan dari para pedagang kaki lima meskipun kebijakan relokasi sendiri telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta para petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Masih mas tapi jumlahnya enggak banyak seperti sebelumnya seperti yang jualan minuman. Mereka akan pergi kalau sudah melihat mobil patroli satpol jadi kalau kayak gini ya sama saj para pedagang masih belum patuh ya kan mas”*. (Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 8 November 2017 pukul 15.25 WIB di sekitaran kawasan alun-alun Kabupaten Sidoarjo)

Menanggapi pendapat Bapak Nuryanto Wahid dan Bapak Agung Waluyo terkait dengan sikap para petugas DLHK dan Satpol yang masih belum mampu meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap masih adanya beberapa pedagang kaki lima yang belum patuh terhadap pengimplementasian kebijakan relokasi yakni dengan masih melakukan aktivitas berjualan disekitaran Alun-alun, Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan menjelaskan bahwa hingga sejauh ini baik dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan beberapa keluhan terkait dengan masih adanya aktivitas berjualan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima disekitaran Alun-alun meskipun kegiatan para PKL sendiri telah dialihkan ke GOR Delta. Beliau mengungkapkan bahwa hingga kini, sanksi dan penertiban saja tidak akanlah cukup apabila para pedagang kaki lima

sendiri tidak memiliki kesadaran dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Berbicara soal kepatuhan, memang masih banyak hal yang harus dibenahi khususnya kesadaran dari para pedagang kaki lima yang memang secara sembunyi-sembunyi masih melakukan aktivitas berdagang di kawasan alun-alun.kita dari DLHK maupun dari Satpol PP memang tidak bisa begitu saja mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para PKL, itu sebabnya saya menghimbau kepada seluruh warga kabupaten sidoarjo khususnya para PKL untuk dapat mematuhi aturan yang memang sudah disepakati agar tidak berjualan lagi di area-area yang sudah dilarang termasuk juga di alun-alun.”.* (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan, pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja beliau pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)

Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Bapak Nuryanto Wahid dan Bapak Agung Waluyo, Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa untuk pengamanan sendiri memang belum begitu dilakukan setiap saat oleh para petugas Sapol PP mengingat beban kerja dan lokasi penertiban para pedagang kaki lima tidak hanya difokuskan di Alun-alun maupun di GOR Delta saja melainkan masih banyak titik pengamanan yang harus menjadi perhatian para petugas Satuan Polisi Pamong Praja didalam menertibkan dan mengamankan setiap kegiatan yang digelar oleh para pedagang kaki lima. Beliau menambahkan bahwa kesadaran dari para pedagang kaki lima merupakan kunci keberhasilan agar kebijakan relokasi yang telah diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak yakni agar ketertiban dan keamanan



dari kabupaten sidoarjo dapat lebih tertata dengan baik. berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*"Kita sudah sering berdialog juga tentang kurangnya aparaturnya didalam menjalankan kebijakan ini baik itu dari kami sendiri maupun dari pihak DLHK. Kerjasama maupun koordinasi lintas sektoral yang kita lakukan memang sangatlah efektif agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dan tujuan dari relokasi sendiri dapat tercapai secara baik." (Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)*



**Gambar 9 Kegiatan Berjualan para PKL yang masih dilakukan disekitaran Alun-Alun Sidoarjo, 2017**

*Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017*

Terkait dengan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima, peneliti juga mewawancarai Bapak Sutrisno Soleh yang kesehariannya berjualan pakaian anak-anak. Beliau mengungkapkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh para pegawai dari DLHK maupun



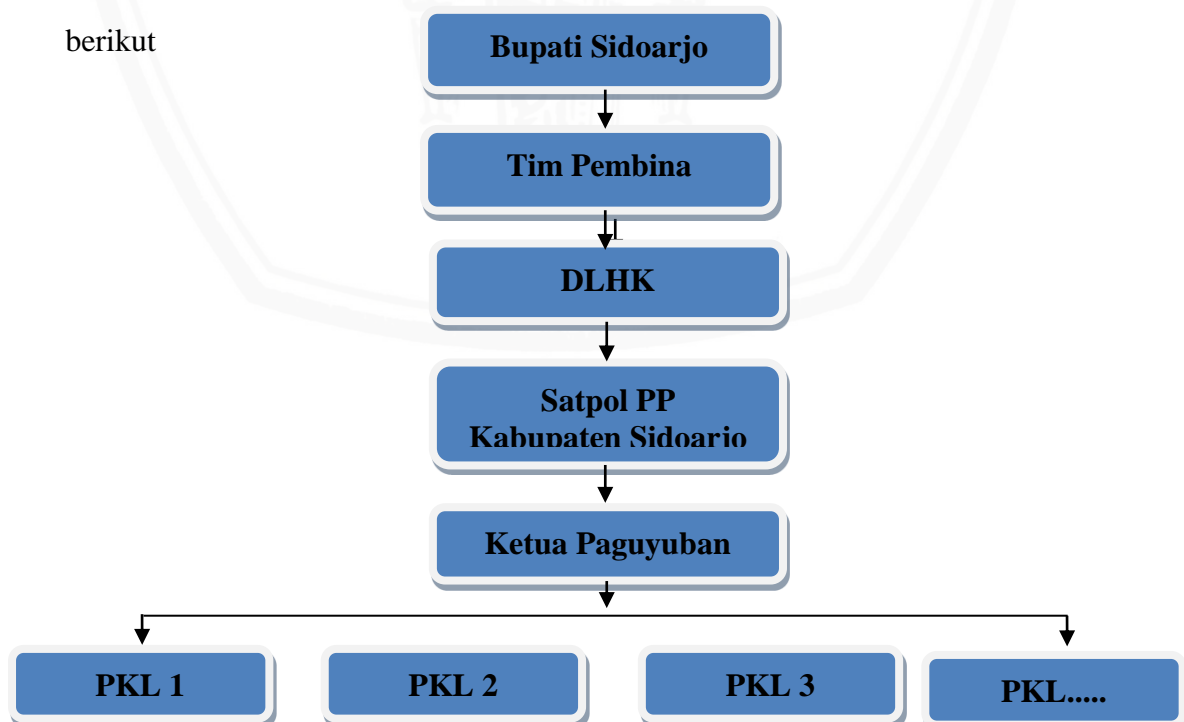
dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo membuat kebijakan relokasi PKL kurang berjalan secara maksimal dan terkesan merugikan para pedagang yang telah direlokasi ke GOR Delta. Beliau menilai bahwa masih ada beberapa kegiatan yang digelar oleh para PKL di alun-alun merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum serta ketidaktegasan para petugas didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Ya kalau seperti ini berarti memang enggak tegas dan kita yang sudah dipindah ke GOR pasti ada yang protes juga karena memang ketika dipindah kesini, pemasukan kita juga ikut berkurang. Seharusnya ya lebih tegas mas, namanya juga abdi negara ya masa takut sama yang salah”*  
(Hasil Wawancara dengan Bapak Sutrisno Soleh yang kesehariannya berjualan pakaian anak-anak, pada tanggal 04 November 2017 pukul 14.48 WIB di lokasi jualan beliau di GOR Delta Kabupaten Sidoarjo)

Setelah memahami dari apa yang responden jelaskan serta melakukan observasi dan pengamatan terkait dengan kecenderungan atau sikap dari pelaksana kebijakan didalam mendukung kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo, hal ini terlihat dari masih adanya beberapa pedagang yang masih menggelar dagangannya disekitaran alun-alun meskipun pemerintah daerah telah merelokasikan segala aktivitas PKL ke GOR Delta. Baik masyarakat yang berprofesi sebagai PKL maupun beberapa masyarakat Kota Sidoarjo yang mengunjungi alun-alun menilai bahwa masih adanya kegiatan yang dilakukan oleh para PKL di sekitaran alun-alun merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum maupun ketidak tegasan para aparaturnya didalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Struktur organisasi ini juga merupakan Birokrasi yang menyelenggarakan dan menangani pelaksanaan kegiatan pemerintah, dimana dalam hal ini Implementasi Kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo dapat di digambarkan dalam bagan berikut



**Gambar 10 Struktur Organisasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo**

*Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan Data Lapangan, 2017*

Melalui struktur birokrasi dan alur komando yang jelas tentu dapat memperkecil timbulnya permasalahan yang muncul oleh karena pelaksanaan kerjasama antara instansi yang terkait. Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa masing-masing instansi khususnya yang tergabung dalam tim pembina PKL memiliki tugas dan tanggung jawab dan itu semua dilaksanakan dengan baik yakni melalui koordinasi dan komunikasi yang kuat didalam mendukung adanya kegiatan relokasi para pedagang kaki lima ke GOR Delta Sidoarjo baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Pembina PKL, dan masyarakat Sidoarjo sebagai sasaran dari adanya pengimplementasian kebijakan relokasi PKL. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Beliau

*“Tentu dalam menangani urusan PKL bukan hal yang mudah untuk diatur sendiri oleh DLHK. Untuk itu perlu ada struktur dan alur yang jelas sehingga memudahkan DLHK bersama dengan Tim Pembina maupun Satpol PP untuk memonitoring pelaksanaan dari kebijakan relokasi PKL dari alun-alun ke GOR Delta”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)*

Pendapat Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terkait dengan adanya struktur birokrasi maupun tugas dari masing-masing dinas dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL ke GOR Delta juga ditambahkan

oleh Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang berkunjung ke alun-alun. Beliau mengungkapkan bahwa masyarakat menganggap kurangnya kontrol dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan praktek jual beli yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di kawasan alun-alun masih tetap saja berlangsung dimana adanya beberapa pedagang kaki lima yang begitu santainya melakukan kegiatan berjualan meskipun kawasan alun-alun telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan tanpa pedagang kaki lima serta seluruh kegiatan PKL yang berada di alun-alun secara tegas telah direlokasikan ke kawasan GOR Delta. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Enggak paham sih mas kalau masalah struktur birokrasi cuman kalau saya sih mending ditata dulu yang baik, harus lebih tegas, dan untuk para PKL ya harus patuhi aturan juga sebab kalau mau jualan lagi disini ya pasti malah mengganggu kita sebagai pengunjung kan mas”*. (Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 8 November 2017 pukul 15.25 WIB di sekitaran kawasan alun-alun Kabupaten Sidoarjo)

Berikut ini peneliti juga menampilkan hasil dokumentasi dimana masih adanya praktek jual beli yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di kawasan alun-alun meskipun segala aktivitas berjualan yang dilakukan oleh PKL telah direlokasikan ke GOR Sidoarjo



**Gambar 11 Kegiatan berjualan yang dilakukan oleh PKL dikawasan Alun-alun**  
*Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017*

Menanggapi pendapat Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang mengungkapkan bahwa kurang efektifnya struktur birokrasi yang terlihat dari masih minimnya kontrol yang dilakukan baik oleh DLHK maupun dari pihak Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga memberikan tanggapan bahwa struktur birokrasi yang dibentuk didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL hingga sejauh ini telah tersusun dengan baik dimana masing-masing instansi memiliki tugas serta tanggung jawab yang berbeda didalam mendukung terlaksananya kebijakan relokasi PKL. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*"Kalau menurut saya sih struktur yang ada sudah sangat sesuai dengan SOP karena memang masing-masing organisasi pemerintah daerah sudah*



*memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing termasuk juga dengan ketua paguyuban, dimana apa yang kita kerjakan tentunya harus berdasarkan apa yang diamanatkan didalam peraturan daerah ”.(Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)*

Berdasarkan hasil wawancara serta temuan peneliti lapangan terkait dengan struktur birokrasi yang dibentuk dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo masih belum berjalan dengan baik. hal ini dapat dilihat dari masih adanya para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun sidoarjo. Kurang maksimalnya kontrol dan pengawasan yang dilakukan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo membuat para pengunjung yang datang ke alun-alun sedikit merasa terganggu dimana para pedagang kaki lima yang seharusnya telah direlokasi ke GOR Delta justru masih melakukan aktivitas berdagangnya disekitaran alun-alun sidoarjo.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo**

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tentu dihadapkan dengan adanya faktor penghambat. Fenomena Pedagang Kaki Lima telah banyak menyita perhatian Pemerintah. PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, merampas hak para pejalan kaki akibat digunakannya trotoar, dan tata ruang kota



yang kacau. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bersikap tegas dalam menentukan kebijakan, namun dalam penegakan dan penertiban kebijakan Pemerintah juga sangatlah sulit dikarenakan berbenturan dengan masalah kemanusiaan. Permasalahan PKL menjadi menarik, karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi Pemerintah. Disatu sisi PKL sering mengganggu lalu lintas dan tidak sesuai dengan tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai bayangan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang belum bisa disediakan Pemerintah. Berikut ini adalah Faktor penghambat yang muncul dalam proses pengimplementasian Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo

#### **4.2.2.1 Keterbatasan Jumlah Aparatur DLHK Maupun Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo**

Kegiatan relokasi bagi PKL merupakan kesulitan tersendiri bagi Pemerintah. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan merekapun dipengaruhi aspek ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk menampung mereka agar dapat tertata. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sendiri melakukan relokasi bagi PKL dengan cara menyediakan tempat relokasi untuk para PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya yakni di kawasan GOR Delta Sidoarjo.

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di alun-

alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo saat ini justru lebih banyak dari pegawai yang hanya berlatar belakang pendidikan di tingkat SMA yakni 195, tingkat SLTP sebanyak 141 orang dan tingkat SD sebanyak 176. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai yang ada dalam lingkup DLHK masih belum sebanding dengan jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan dengan lulusan S2 maupun S1 yang masing-masingnya berjumlah 3 orang dan 27 orang. Hal senada juga yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengungkapkan bahwa keterbatasan dari jumlah pegawai yang ada di DLHK Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu faktor penentu didalam proses pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima untuk dipindahkan ke GOR Delta yang mana jumlah pegawai dari lulusan SMA, SLTP, dan SD masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai DLHK Sidoarjo dengan lulusan S1 maupun S2. Keterbatasan pada jumlah aparatur DLHK Sidoarjo membuat kontrol akan keberlangsungan kebijakan relokasi PKL ke GOR Delta tidak dapat dilakukan setiap saat maupun secara menyeluruh mengingat jumlah maupun kualitas SDM dari aparatur DLHK Sidoarjo masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Sebagai dinas yang ditunjuk sebagai penanggungjawab, kita selalu berusaha semaksimal mungkin walaupun jumlah pegawai maupun tingkat pendidikan masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada, itu sebabnya kita juga dibantu oleh teman-teman dari Satpol PP maupun bekerjasama dengan pihak swasta, kita dari DLHK hanya sebatas memonitoring sejauh mana pelaksanaan dari kegiatan relokasi para pedagang yang ada di alun-alun ketika dipindahkan ke GOR”* (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo).

Terkait dengan kurangnya aparatur yang terjun didalam pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo, Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa keterbatasan aparatur tidak hanya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melainkan juga pihak satuan polisi pamong praja sendiri mengalami kekurangan pegawai yang diterjunkan didalam melakukan relokasi hingga pada pengawasan kegiatan pedagang kaki lima yang baik itu di GOR Delta maupun para pedagang kaki lima yang kembali berjualan di alun-alun Sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*"Terkait dengan jumlah aparatur ya memang sangat terbatas mas. kita keterbatasan personel, karena Satpol PP Kabupaten Sidoarjo tidak hanya melakukan relokasi PKL saja, tetapi juga menertibkan spanduk, penertiban minuman beralkohol, dan perlindungan masyarakat. Jika kita menertibkan semua tersebut mempunyai kendala dalam SDM hanya 45 petugas mas".* (Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 14 November 2017 pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)

Berikut ini peneliti juga menampilkan tabel 6 (Hal.135) terkait dengan jumlah pegawai pada dina lingkungan hidup dan kebersihan serta pada satuan polisi pamong praja yang ada di Kabupaten Sidoarjo didalam mendukung pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo.

**Tabel 6 Jumlah Pegawai DLHK dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017**

No	Pegawai DLHK		Pegawai Satpol PP	
	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	9	S2	-
2	S1	15	S1	3
3	SMA	26	SMA	12
4	SD	-	SD	30
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>		<b>45</b>

*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2017*

Berdasarkan data pada tabel 9 terkait dengan Jumlah pegawai DLHK maupun pada satuan polisi pamong praja kabupaten sidoarjo, maka dapat dikatakan perlu untuk ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun dari latar belakang pendidikan pegawai dalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, bahwa sumber daya manusia merupakan modal penting dalam menggerakkan atau menjalankan sebuah kegiatan ataupun kebijakan yang fungsinya adalah menggerakkan setiap kegiatan didalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan. Adanya hambatan terkait dengan jumlah maupun kemampuan aparatur pada Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan maupun pada satuan polisi pamong praja di kabupaten sidoarjo tentu akan berpengaruh terhadap proses pengimplementasian kebijakan relokasi yang

akan datang. Keterbatasan pada jumlah aparaturnya membuat kontrol dan pengawasan terhadap pengimplementasian kebijakan relokasi pada pedagang kaki lima baik yang berada di kawasan GOR Delta maupun di kawasan alun-alun tidak dapat dilakukan setiap saat mengingat jumlah dan cakupan wilayah kerja dari masing-masing instansi tidak hanya terpusat pada penanganan masalah PKL melainkan juga menangani masalah sosial lain berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4.2.2.2 Rendahnya Kesadaran Para Pedagang Kaki Lima Untuk Menaati Hukum**

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin banyak di Kabupaten Sidoarjo dan masih kurang tertata rapi dan menimbulkan kesan semrawut menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo agar keberadaannya tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kenyamanan, keamanan, dan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo dengan maksud dan tujuan agar dengan diimplementasikannya kebijakan relokasi pedagang kaki lima yakni yang berada di alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta dapat menjadi alat bagi pemerintah daerah didalam menata dan menertibkan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima pada tempat-tempat umum yang tidak diperuntukan untuk kegiatan berdagang. tentunya dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima yang ada di kabupaten sidoarjo perlu didukung sesuai

dengan prosedur pelaksanaannya agar hasilnya dapat sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan dan dipindahkan ke GOR Delta belum sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini. Dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima, Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan maupun pada satuan polisi pamong praja di kabupaten sidoarjo masih menjumpai kendala-kendala dimana menurut Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo bahwa kendala yang dijumpai salah satunya yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Beliau mengemukakan bahwa rendahnya kesadaran para PKL akan aturan hukum yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima justru menjadi tugas terberat sebab beliau menambahkan bahwa hingga sejauh ini, berbagai cara telah dilakukan diantaranya yakni dengan melakukan dialog, menggelar sosialisasi, serta memberikan sanksi bagi para PKL yang masih berjualan di kawasan alun-alun masih belum mampu membuat para PKL menjadi jera. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*"Pertumbuhan PKL yang begitu pesat di diseputaran alun-alun yang tidak terkendali akan merusak keindahan alun-alun dan sekitarnya disamping itu juga para PKL berjualan semauanya tanpa menghiraukan kepentingan umum meskipun memang sudah begitu banyak upaya persuasif yang kita lakukan, hanya saja memang kesadaran dari para PKL sendiri masih harus ditingkatkan lagi demi terwujudnya lingkungan alun-alun yang lebih tertata".* (Hasil Wawancara dengan Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo,



pada tanggal 17 November 2017 pukul 09.24 WIB di ruang kerja beliau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo)

Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga mengungkapkan bahwa menurut pengamatan serta keluhan yang masuk dari masyarakat, kesadaran dari para pedagang kaki lima yang masih saja menggelar dagangannya disekitaran alun-alun masih menjadi sebuah perhatian serius oleh seluruh instansi yang tergabung dalam tim pembina pedagang kaki lima. Beliau menilai bahwa DLHK dan dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo meskipun telah mengambil tindakan tegas, namun masih saja ada beberapa oknum PKL yang tidak menghiraukan larangan untuk berjualan kembali di sekitaran alun-alun meskipun telah diberikan teguran, peringatan tertulis hingga pada pemberian sanksi administrasi yang berupa membayar denda apabila tetap melakukan kegiatan jual beli disekitaran alun-alun. Sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dari PKL yang masih berjualan meskipun sering mendapatkan teguran maupun sanksi, beliau menjelaskan bahwa pihaknya akan secara terus menerus berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja maupun bersama dengan instansi terkait yang tergabung dalam tim pembina PKL untuk melakukan evaluasi terkait dengan kekurangan dari pengimplementasian kebijakan relokasi para pedagang kaki lima yang masih tetap bandel untuk berjualan di alun-alun sidoarjo. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

*“Sampai sejauh pelaksanaan relokasi ke GOR, memang sering ada laporan bahwa masih ada beberapa PKL yang berjualan disekitaran alun-alun meskipun sudah ada tindakan tegas dari Satpol PP. Kita tentu selalu berkoordinasi dengan Satpol PP maupun dengan tim gabungan agar bagaimana ketidakpatuhan dari beberapa PKL ini dapat kita atasi tanpa ada lagi yang merasa dirugikan mas”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan, pada tanggal 21 November 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja beliau pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)*

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan dilapangan terkait dengan Kesadaran Para Pedagang Kaki Lima Untuk Menaati Hukum, DLHK dan dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo meskipun telah mengambil tindakan tegas, namun masih saja ada beberapa oknum PKL yang tidak menghiraukan larangan untuk berjualan kembali di sekitaran alun-alun meskipun telah diberikan teguran, peringatan tertulis hingga pada pemberian sanksi administrasi yang berupa membayar denda apabila tetap melakukan kegiatan jual beli disekitaran alun-alun. Sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dari PKL yang masih berjualan meskipun sering mendapatkan teguran maupun sanksi. Sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dari PKL yang masih berjualan meskipun sering mendapatkan teguran maupun sanksi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo akan secara terus menerus berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja maupun bersama dengan instansi terkait yang tergabung dalam tim pembina PKL untuk melakukan evaluasi terkait dengan kekurangan dari pengimplementasian kebijakan relokasi para pedagang kaki lima yang masih tetap bandel untuk berjualan di alun-alun sidoarjo.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Implementasi Kebijakan Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo

Implementasi Sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Kebijakan Penertiban Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah sebuah upaya pembinaan PKL di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi penentuan lokasi dan membentuk sentra-sentra lokasi bagi PKL, penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL yang memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya dimana menurut Wahab (2014:17), Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukanlah keputusan-keputusan yang berdiri sendiri Dalam hal penentuan lokasi PKL di Kabupaten Sidoarjo memang tidak dipersiapkan suatu lahan khusus bagi PKL tanpa izin kepala daerah, karena mereka termasuk pada sektor perdagangan informal.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo adalah PKL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2007 tentang: “Larangan PKL berjualan di trotoar jalan, bahu jalan, dan taman. PKL yang ketahuan melanggar, diberikan himbauan untuk tidak melakukannya lagi”. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009, antara lain mengatur untuk bagaimana menata dan merelokasi PKL di tempat yang telah diatur oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo seperti halnya yang diungkapkan oleh Thomas Dye (1992) dalam Sahya (2014:35), Pemerintah mempunyai tugas salah satunya

adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya.

Pedagang kaki lima tumbuh berkembang karena usahanya yang sederhana tanpa adanya struktur birokrasi yang berbelit-belit. Karena Banyaknya pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya yang menjajakan jualanya diseputaran alun-alun Sidoarjo membuat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo melakukan langkah strategis dalam menata dan mengelola pedagang kaki lima yakni dengan mengimplementasikan kebijakan relokasi terhadap para PKL. Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah penanganan permasalahan pedagang kaki lima dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menerapkan kebijakan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan lancar yakni melalui kebijakan relokasi bagi para PKL khususnya para PKL yang berjualan disekitaran alun-alun. Para pedagang kaki lima yang berdagang disekitaran alun-alun dirasa sangat mengganggu ketertiban umum dan keindahan taman kota, hal ini menjadi dasar dari pengimplementasian kebijakan relokasi PKL dari alun-alun menuju ke GOR delta Sidoarjo.

Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa tempat usaha yang didirikan oleh para PKL tidak memperhatikan keindahan dan ketertiban kota. Dalam beberapa kasus sering terjadi PKL setelah berjualan tidak mebongkar atau tidak membersihkan tempat dagangan mereka, adakalanya mereka membuat

tempat usahanya yang semi permanen bahkan permanen. faktor utama pemicu hadirnya PKL menurut Mc Gee dan Yeung dalam Herawati (2007:44) adalah pejalan kaki, jika kemudian pada kawasan perdagangan muncul PKL, karena itu di kawasan tersebut lebih banyak pejalan kaki, sama hal yang terjadi pada alun-alun sidoarjo yang merupakan pusat keramaian dan tempat bersantai yang justru banyak berkeliraran para pedagang kaki lima. Selain itu juga para PKL diketahui bahwa di sepanjang jalur lambat, taman dan trotoar maupun area publik lainnya disetiap sudut kota Sidoarjo banyak dimanfaatkan oleh para PKL.

Adanya keleluasan dan ketidaktertiban yang muncul dari kegiatan para pedagang kaki lima, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan reloasi untuk mengatur PKL menurut karakteristik PKL yang ada. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh dalam Mc Gee dan Yeung dalam Herawati (2007:47) bahwa kegiatan relokasi dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih mempermudah pengaturan dan keseragaman dalam penanganan PKL sehingga di samping PKL sebagai aset ekonomi daerah, PKL juga sebagai aset pariwisata yang khas di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Bapak Mohamad Edi Kurniadi, ST, MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan Pedagang kaki lima yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No.2 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan PKL.

Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kegiatan relokasi PKL yang ada di Alun-alun Sidoarjo, keindahan dan ketertiban kota dapat ditata kembali. Hal ini selain dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, kegiatan relokasi terhadap pedagang kaki lima dimaksudkan juga untuk memusatkan segala aktivitas dan kegiatan berjualan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih tertata dan tidak menimbulkan kesemerawutan dimana Secara sosiologis, PKL merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu, seperti: suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama (Sarjono 2005:12). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Barang dan jenis dagangan yang berbeda biasanya terkait dengan perbedaan latar belakang dan karakteristik pelaku PKL.

Kebijakan publik terkait dengan penertiban PKL tidak selamanya berjalan mulus, sering terjadi perlawanan baik fisik maupun nonfisik dari para PKL. Perlawanan tersebut muncul karena pihak PKL merasa dirugikan dan dianggap mereka adalah korban dari kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil. Terkait dengan hal tersebut, menurut (Alisyahbana, 2006:32) bahwa aktivitas PKL yang menggunakan ruang publik dan terkadang juga tanah orang lain mendorong pemerintah melakukan penertiban bagi mereka. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah berusaha menertibkan Pedagang Kaki Lima ditempat-tempat yang tidak



seharusnya digunakan untuk berjualan. Akan tetapi, pada awal tahun 2017, para PKL mulai menempati Kawasan Perumahan Taman Pinang Indah maupun berjualan secara kucing-kucingan di alun-alun kabupaten sidoarjo. Adapun latar belakang para PKL menempati Kawasan tersebut yang dikemukakan oleh Ibu Cucuk Sumiyati sebagai salah satu pedagang kaki lima yang berjualan makanan ringan. Beliau mengungkapkan bahwa sejak direlokasi oleh pemerintah menuju ke GOR Delta Sidoarjo, jumlah pendapatan yang diperoleh sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan oleh sepiunya jumlah para pembeli.

Pendapat Ibu Cucuk Sumiyati terkait dengan kegiatan berjualan para pedagang kaki lima yang justru memilih lokasi lain maupun dengan bermain kucing-kucingan daripada berjualan di seputaran GOR Delta juga ditambahkan oleh Bapak Ashatul Hanifah, SP mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini telah mendapatkan keluhan dari beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran GOR Delta Sidoarjo bahwa sepiunya jumlah pengunjung serta pendapatan para PKL yang setiap harinya tidak menentu menyebabkan beberapa pedagang kaki lima justru ada yang kembali berjualan disekitaran alun-alun secara sembunyi-sembunyi serta ada juga beberapa pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan berjualan diseputaran Taman Pinang.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, jumlah PKL yang direlokasi ke Kawasan GOR Delta hingga bulan Agustus Tahun 2017 berjumlah sebanyak 183 orang yang berasal dari berbagai daerah. Jumlah para pedagang kaki lima yang berjualan di Gor Delta justru tidak sebanding dengan jumlah PKL yang berjualan disekitaran taman

pinang yakni sebanyak 207 pedagang. Bapak Ahmad Mastori yang berprofesi sebagai PKL yang setiap harinya berjualan es kelapa muda mengungkapkan bahwa PKL yang berjualan di Taman Pinang merupakan sebagian besar dari PKL yang direlokasi oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo untuk berjualan di Gor Delta. Para PKL yang menolak untuk direlokasi lebih memilih untuk berjualan di sekitaran perumahan Taman Pinang sebab para PKL menganggap bahwa lokasinya sangat strategis dan sangatlah ramai dikunjungi oleh pembeli.

Bapak Drs. Asrorudin selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa pemerintah masih belum dapat merelokasikan para pedagang kaki lima secara serta merta khususnya bagi para pedagang yang berjualan di kawasan Taman Pinang untuk berjualan di GOR Delta sebab daya tampung GOR Delta sudah tidak mencukupi lagi untuk menampung para PKL yang berasal dari Taman Pinang. Selain itu, Bapak Drs. menambahkan bahwa pemerintah daerah hingga kini masih belum menemukan lokasi alternatif yang dapat digunakan untuk merelokasikan para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran Taman Pinang selain di daerah GOR Delta Sidoarjo.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan bertambah banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Taman Pinang telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyak PKL yang menempati kawasan Taman Pinang hingga Gading Fajar tanpa adanya perizinan tempat dari pemerintah setempat, karena ditempat tersebut banyak pengunjung dan lokasinya strategis. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai

dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan public tidaklah efektif. Sunggono (1994 : 149-153) menjelaskan bahwa seharusnya penataan lokasi PKL harus di setting sedemikian rupa sehingga tidak ada gejolak lagi dan penataannya harus bisa mengakomodasi kepentingan pedagang. Hal-hal yang mengenai PKL sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. peraturan pelaksana yang menunjang dalam terlaksananya kebijakan Pedagang Kaki Lima sudah tertera dalam Permendagri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, ada juga di Peraturan Bupati sidoarjo Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo.

Pada intinya, Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke kawasan GOR Delta Sidoarjo merupakan suatu mekanisme pelaksanaan kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai prosedur operasional dalam menertibkan dan menata kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh PKL maupun untuk menjaga ketertiban umum yang ada di Kabupaten Sidoarjo dimana didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo membaginya kedalam 3 bagian proses didalam merelokasikan para pedagang kaki lima yang berjualan di GOR Delta yakni :

#### 4.3.1.1 Sosialisasi dan Pendataan

Dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi bagi pedagang kaki lima yang berada di alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo, Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo serta dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo berdasarkan peraturan daerah no.8 tahun 1995 dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2001 maka sebelum melakukan kegiatan relokasi, pemberian informasi yang dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada PKL di alun-alun. Bapak Drs. Asrorudin selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa Hal ini dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terhadap PKL yang berjualan di alun-alun yang dilakukan secara bertahap. Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo serta dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu memberikan informasi terkait dengan pengimplementasian kebijakan relokasi secara langsung kepada masing-masing pedagang atau *door to door*, penyampaian secara lisan yakni dengan memberikan surat pemberitahuan serta bekerjasama dengan phak LSM didalam menggelar kegiatan sosialisasi bagi para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun setelah itu dilanjutkan dengan proses pendataan PKL yakni dengan melakukan pengumpulan identitas seperti kartu tanda pengenal (KTP) .

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Widodo (2009:97) bahwa informasi kebijakan publik tersebut harus disampaikan oleh pembuat

kebijakan kepada pelaksana kebijakan agar dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan serta agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik. Adapaun berbagai dimensi dalam komunikasi kebijakan, yaitu dimensi transformasi, kejelasan, dan konsistensi dimana Ibu Cucuk Sumiyati sebagai salah satu pedagang kaki lima yang berjualan makanan ringan membenarkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pemberitahuan secara langsung, pemberitahuan secara lisan yakni dengan memberikan surat, serta melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima. Beliau menambahkan bahwa dari pemerintah dalam hal ini yakni dinas lingkungan hidup dan kebersihan disaat sebelum dilakukannya kegiatan relokasi, Ibu Cucuk Sumiyati dan teman-teman pernah dikumpulkan disamping alun-alun untuk diberikan arahan terkait dengan larangan berjualan serta diberitahukan terkait dengan akan adanya relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun untuk direlokasikan ke GOR Delta Sidoarjo.

Bapak Toyib Ginanjar selaku ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima GOR Delta mengungkapkan bahwa memang benar bahwa sebelum dilaksanakannya kegiatan relokasi bagi para pedagang yang berjualan dialun-alun ke GOR Delta, dirinya dan para pedagang kaki lima yang telah berjualan di alun-alun telah mendapatkan informasi baik secara langsung maupun secara lisan dari DLHK maupun diberikan peringatan dari Satpol PP kabupaten Sidoarjo terkait dengan akan dilaksanakannya relokasi pedagang kaki lima ke GOR Delta Sidoarjo.

Namun beliau sedikit mengecewakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah didalam memberikan sosialisasi maupun penyampaian informasi terkait dengan akan adanya kegiatan relokasi dimana beliau menilai bahwa pemerintah daerah dalam melakukan relokasi PKL ke GOR Delta tidak secara serta merta memperhatikan dan mendengarkan masukan yang diberikan oleh pedagang kaki lima. Beliau beranggapan bahwa pemerintah daerah justru hanya menjalankan kebijakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadaan dan kondisi yang akan terjadi sesudah kegiatan relokasi dilakukan dimana para pedagang kaki lima dihadapkan oleh jumlah pendapatan yang menurun secara drastis dikarenakan oleh kurangnya minat belanja dan sepiunya para pengunjung yang datang ke GOR Delta.

Pada intinya dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa sebelum direlokasi ke GOR Delta, PKL yang berjualan di Alun-alun sudah pernah memperoleh sosialisasi yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta para petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Sosialisasi itu lewat rapat yang bersifat formal maupun informal. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mendukung langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima menuju ke GOR Delta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan berbagai saluran informasi yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten



Sidoarjo dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo didalam mensosialisasikan akan adanya pengimplementasian kebijakan relokasi sudah dilaksanakan dengan baik. Pertemuan yang dilakukan dengan para PKL bertujuan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang peraturan daerah yang mengatur para PKL, sehingga diharapkan PKL dapat mentaati peraturan tersebut. Di dalam melakukan pertemuan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satuan Polisi Pamong Praja melakukan secara berlanjut sehingga diharapkan PKL benar-benar memahami dan menaati peraturan yang telah di sosialisasikan terkait dengan adanya kegiatan Relokasi dari Alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo.

#### **4.3.1.2 Penetapan Lokasi Usaha**

Penetapan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima yang berada di Alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo pada bab 2 pasal 2 ayat ke 3 menyatakan bahwa “Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya perlu mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya dan keadaan pasar. Tempat yang nantinya dijadikan pertimbangan dan digunakan untuk PKL dalam pembuatan kebijakan ini merupakan tempat yang strategis dan benar-benar potensial, karena diharapkan tempat yang baru dapat digunakan untuk jangka panjang atau permanen, PKL disana diminta untuk pindah yang berujung pada munculnya kebijakan Penertiban

tempat usaha dan pembinaan PKL untuk merelokasi PKL yang berjualan di Alun-alun ke tempat yang lebih layak yakni di GOR Delta Sidoarjo.

Menurut Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa Kepala daerah yang dalam hal ini yaitu Bupati Sidoarjo menetapkan lokasi relokasi kegiatan para pedagang kaki lima dari Alun-alun Sidoarjo menuju ke Gor Delta Sidoarjo dikarenakan oleh beberapa pertimbangan yakni adanya penolakan dari beberapa pedagang kaki lima akan beberapa tempat alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. salah satu lokasi yang akhirnya menjadi tempat relokasi bagi pedagang yang berjualan di sekitaran Alun-alun akhirnya diputuskan oleh pemerintah daerah yakni di GOR Delta Sidoarjo.

Bapak Toyib Ginanjar selaku ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima GOR Delta mengungkapkan bahwa hampir sebagian besar pedagang kaki lima memang merasa tidak adil dan dirugikan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi GOR Delta sebagai tempat relokasi bagi para pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun. Hal ini menurut beliau dikarenakan bahwa berdasarkan pengamatannya, GOR Delta tempatnya letaknya kurang strategis serta intensitas pengunjung yang datang tidaklah sebanding dengan jumlah pengunjung yang ada di Alun-alun Sidoarjo. Fenomena yang terjadi dilapangan justru berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan oleh Mc Gee dan Yeung dalam Herawati (2007:44) yang menjelaskan bahwa suatu lokasi baik berupa pembangunan baru dengan fungsi yang berbeda dari semula maupun berupa perbaikan dari kondusi yang telah ada. Tindakan ini juga memperhatikan kepentingan dari pihak PKL

sendiri, yakni tidak mengganggu perolehan atau hubungannya dengan konsumen maka tindakan tersebut dapat diterima.

Setelah penempatan di GOR Delta Sidoarjo, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan pengaturan dalam pembagian lahan dan tenda serta waktu berdagang. Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa melalui penetapan lokasi berdagang diharapkan agar dalam menjalankan aktivitasnya, para pedagang kaki lima lebih teratur dan tertata dengan rapi. Pengaturan didalam berjualan bagi para pedagang kaki lima didasari atas kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja dan para pedagang kaki lima yang berjualan di GOR Delta Sidoarjo.

Namun berbeda dengan kenyataan dilapangan disaat peneliti melakukan observasi, masih terdapat beberapa petak jualan yang kosong dan tidak digunakan oleh para pedagang. Para pedagang lebih memilih untuk berjualan ditempat lain seperti halnya yang ditemui di kawasan taman pinang. Ada juga pedagang yang memilih petak jualan tidak berdasarkan pengelompokan jenis dagangan yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan memilih untuk berbaur dengan para pedagang lain yang berbeda jenis barang dagangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan akan tempat jualan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo masih belum berjalan dengan baik. dalam pengaturan dalam berjualan, masing-

masing pedagang mendapatkan luas petak yakni 9 m persegi dengan lamanya waktu berjualan yakni tidak melebihi waktu yang telah ditentukan yakni hanya diperbolehkan pada pukul 01.00 WIB

Menanggapi temuan peneliti di lapangan akan masih adanya para pedagang yang memilih untuk berjualan didaerah lain maupun tidak menempati petak jualan yang telah disediakan oleh pemerintah di kawasan GOR Delta Sidoarjo, Bapak Toyib Ginanjar selaku ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima GOR Delta mengungkapkan bahwa hal ini memang seharusnya menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah mengapa sampai masih adanya para pedagang yang keluar dari GOR Delta maupun masih ada pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan pengelompokan jenis barang dagangan. Menurut beliau, hal ini lebih dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang ada di GOR Delta Sidoarjo masih belum memungkinkan bagi para pedagang untuk melakukan kegiatan berdagang. Sepinya pengunjung serta letaknya dinilai kurang strategis, menyebabkan para pedagang lebih memilih untuk berbaur dengan jenis barang dagangan lain yang tidak sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sidoarjo.

Pada intinya, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan melakukan penetapan lokasi. Penetapan lokasi berdagang sebelumnya telah diatur didalam peraturan daerah nomor Nomor 7 Tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki

lima di kabupaten sidoarjo pada bab 2 pasal 2 ayat ke 3 menyatakan bahwa “Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya perlu mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya dan keadaan pasar. Dalam penetapan lokasi, terdapat pengaturan-pengaturan termasuk didalamnya yakni besaran lapak yang masing-masing pedagang mendapatkan besaran yang sama, pengaturan lamanya berjualan serta pengaturan jenis dagangan yang diajakan oleh para pedagang. dalam pengaturan dalam berjualan, masing-masing pedagang mendapatkan luas petak yakni 9 m persegi dengan lamanya waktu berjualan yakni tidak melebihi waktu yang telah ditentukan yakni hanya diperbolehkan pada pukul 01.00 WIB. Namun berbeda dengan kenyataan dilapangan disaat peneliti melakukan observasi, masih terdapat beberapa petak jualan yang kosong dan tidak digunakan oleh para pedagang. Para pedagang lebih memilih untuk berjualan ditempat lain seperti halnya yang ditemui di kawasan taman pinang. Ada juga pedagang yang memilih petak jualan tidak berdasarkan pengelompokan jenis dagangan yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan memilih untuk berbaur dengan para pedagang lain yang berbeda jenis barang dagangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan akan tempat jualan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo masih belum berjalan dengan baik.

#### **4.3.1.3 Kegiatan Pembinaan**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki

lima di Kabupaten Sidoarjo maka dibentuk Tim Pembina Pedagang Kaki Lima seperti yang termuat di dalam pasal 9 ayat (1). Adapun susunan anggota Tim Pembina PKL sebagai berikut :

- h. Asisten I Sekda Kabupaten Sidoarjo sebagai Ketua
  - i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagai Wakil Ketua
  - j. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo sebagai Sekrkretaris
  - k. Komandan Pelaksana Harian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sebagai Wakil Sekretaris
  - l. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai Anggota
  - m. Bagian Hukum Sekda Kabupaten Sidoarjo sebagai Anggota
  - n. Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Sidoarjo sebagai anggota
- Tugas Tim pembina PKL sebagaimana tersebut dalam pasal 9, adalah

sebagai berikut :

- d. Mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis kewirausahaan kepada PKL.
- e. Memberikan pertimbangan dan sarana lokasi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk tempat usaha PKL
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

Menurut Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo



terhadap para PKL yang telah direlokasi ke GOR Delta Sidoarjo dilakukan dengan berbagai jalur diantaranya dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, *door to door* atau mengumpulkan mereka kesuatu tempat kemudian dilakukan pembinaan. Kegiatan pembina ini dimaksudkan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara pemerintah daerah dan para pedagang yang telah direlokasi ke GOR Delta. Beliau menambahkan bahwa didalam memberikan pembinaan kepada para PKL, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga mengedepankan aspek kebersihan bagi para PKL didalam menjalankan kegiatan berdagang seperti halnya dengan memberikan pembinaan terkait dengan kebersihan makanan yang dijual maupun pengaturan kebersihan akan sanitasi didalam pembuangan limbah hasil jualan.

Bapak Aji Nur Rohman Selaku PKL yang kesehariannya berjualan bakso dan siomay juga mengungkapkan bahwa setelah direlokasi, khususnya para pedagang makanan yang berjualan di GOR dikumpulkan di kantor kelurahan untuk diberikan pembinaan terkait dengan usaha dagangan yang dijalankan. Beliau menambahkan bahwa didalam kegiatan pembinaan yang diberikan yang biasanya dilakukan selama 1 kali dalam 2 bulan, dirinya dan para PKL yang berjualan di GOR Delta hanya sebatas diberikan penyampian agar mereka tidak kembali berjualan ditempat-tempat umum yang dilarang oleh pemerintah daerah serta lebih memperhatikan kebersihan makanan yang dijual. Namun begitu, beliau mengaku bahwa alangkah lebih baik apabila para PKL yang telah direlokasi tidak hanya sebatas diberikan pembinaan dan pengarahan melainkan juga perlu diberikan bantuan modal didalam menjalankan usaha mengingat kondisi yang

dihadapi ketika berjualan di GOR Delta dari sisi pendapatan perhari sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan sewaktu masih berjualan di Alun-alun.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo masih jauh dari harapan PKL yang telah direlokasi ke GOR Delta yaitu ingin memajukan usahanya atau meningkatkan taraf hidup mereka. Pembinaan yang dilakukan masih sebatas peringatan terhadap pelanggaran yang dilakukan PKL tanpa memperhatikan tingkat pendapatan yang menjadi keluhan utama dari para pedagang kaki lima setelah direlokasikan ke GOR Delta Sidoarjo. Menurut Mc Gee dan Yeung dalam Herawati (2007:44), Tindakan pembinaan terhadap kualitas pola pikir para pedagang dan pelaksanaan aktivitas PKL secara keseluruhan, karena diketahui pola pikir PKL sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan yang ada, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangnya perhatian mengenai visualisasi aktivitas secara keseluruhan.

Menanggapi keluhan ini, Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sedang mengupayakan langkah-langkah agar PKL yang berjualan di GOR Delta mentaati peraturan daerah serta dapat meningkatkan tingkat pendapatan dari para pedagang kaki lima yang telah direlokasikan ke GOR Delta yaitu diantaranya dengan menggandeng pihak swasta didalam penyelenggaraan pesta rakyat, pasar malam, serta acara-acara berupa hiburan band yang diadakan disekitaran GOR Delta guna memancing para

pengunjung dan meningkatkan pemasukan dari para pedagang kaki lima yang telah direlokasi ke GOR Delta.

Pada intinya, dapat dikatakan bahwa kegiatan pembinaan dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dilakukan dengan Pembinaan terhadap para PKL yang telah direlokasi ke GOR Delta Sidoarjo dilakukan dengan berbagai jalur diantaranya dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, *door to door* atau mengumpulkan mereka kesuatu tempat kemudian dilakukan pembinaan. Kegiatan pembinan ini dimaksudkan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara pemerintah daerah dan para pedagang yang telah direlokasi ke GOR Delta.

Terkait dengan proses pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Alun-alun sidoarjo ke GOR Delta Sidoarjo, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. suatu kebijakan tentu harus diimplementasikan agar dampak atau tujuan adanya kebijakan dapat tercapai dimana kebijakan hanya akan menjadi sebuah catatan diatas kertas apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam proses pengimplementasian kebijakan publik terdapat beberapa model yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implemtasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, dimana Model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III menyatakan bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat (4) variabel yakni

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut ini dapat dijelaskan masing-masing variabel yang terkait dengan Implementasi Kebijakan relokasi pedagang kaki lima di alun-alun sidoarjo ke GOR Delta Sidoarjo yakni sebagai berikut

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi dalam proses implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusioanal yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam komunikasi, pesan-pesan disampaikan dan juga berbagai informasi terkait pelaksanaan dari suatu kebijakan. Komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan kesalahan pahaman yang menimbulkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan baik. Komunikasi dilakukan antar sesama implementor atau badan pelaksana kebijakan dan juga komunikasi kepada kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses implementasi, semua pelaksana sudah seharusnya memahami dan mendukung apa yang menjadi tujuan kebijakan. Faktor kepemimpinan sangat berperan dalam mengatur bawahannya atau implementor memmunyai pemahaman dan dukungan terhadap tujuan dari organisasi. (Nugroho, 2009:17).

Selain komunikasi yang dilakukan dengan sesama implementor atau badan pelaksana di Kabupaten Sidoarjo, implementor juga melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat luas khususnya bagi para pedagang kaki lima yang telah direlokasikan ke GOR Delta..

Komunikasi yang dilakukan adalah berupa sosialisasi atau penyuluhan kepada para pedagang kaki lima terkait dengan pengimplementasian kebijakan relokasi PKL serta kegiatan pengaturan didalam melakukan relokasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. Terkait dengan komunikasi yang dibangun didalam pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berada di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo, Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjalin selama ini antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Pembina PKL yang didalamnya melibatkan Dinas-Dinas terkait maupun maupun berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung bersama dengan para pedagang kaki lima telah berjalan dengan sangat bagus dimana sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bertanggung jawab didalam memonitoring Implementasi dari kebijakan relokasi PKL khususnya pra PKL yang berjualan di GOR Delta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo juga berkomunikasi dengan pihak swasta dalam menggelar event-event maupun kegiatan hiburan di daerah GOR Delta.

Kejelasan isi pesan yang disampaikan menurut Agustino (2006:150), akan sangat mempengaruhi penerima pesan. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari program. Karena pesan yang jelas atau tidak samar-samar akan menghindari penafsiran

menyimpang dari yang dimaksudkan. Selain itu juga harus memperhatikan aspek konsistensi. Suatu pesan yang disampaikan haruslah konsisten, karena jika pesan yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi penerima pesan. Dimana pesan tersebut haruslah mempunyai kesesuaian antara apa yang diberikan oleh pengirim pesan dengan petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan dan dengan yang disampaikan oleh media lain (media cetak dan elektronik).

Dalam pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo, antara lain mengatur untuk bagaimana menata dan merelokasi PKL di tempat yang telah diatur oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo, sarana komunikasi yang digunakan dalam memberikan informasi yang digunakan tidak hanya berupa pemberian surat melainkan menggunakan berbagai media cetak dan elektronik. Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa penyampaian informasi serta pesan kepada masyarakat khususnya bagi para pedagang tidak lepas juga akan komunikasi yang baik dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja saling bahu membahu melengkapi informasi melalui media cetak seperti Koran (Jawa Pos, Kompas, dan sebagainya), spanduk atau banner yang dipasang di depan Rumah Sakit, di jalan-jalan strategis maupun tempat-tempat umum. Berikut ini peneliti juga menampilkan kegiatan pemasangan spanduk yang



dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan informasi kepada masyarakat maupun kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun sebelum direlokasikan ke GOR Sidoarjo.

Disamping itu, bentuk komunikasi juga dilakukan yakni dengan memberikan sosialisasi serta menggelar kegiatan dialog dengan para pedagang yang telah direlokasi ke GOR setiap 1 kali dalam 2 bulan, serta melakukan rapat dengar pendapat antar instansi yang masuk sebagai tim pembina pedagang kaki lima. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagai Dinas pelaksana relokasi pedagang kaki lima ke GOR Sidoarjo saat ini berupaya untuk memberikan penyuluhan bagi para pedagang yang telah berjualan di GOR Delta maupun bagi masyarakat umum di Kabupaten Sidoarjo untuk sama-sama bagaimana menjaga ketertiban dan kondisi lingkungan kabupaten sidoarjo yang lebih tertata untuk tidak kembali lagi berjualan di tempat-tempat yang telah dilarang seperti halnya kembali berjualan ke alun-alun sidoarjo.

Akan tetapi tidak semua pedagang kaki lima yang telah direlokasi ke GOR Delta Sidoarjo dengan mudah menerima kebijakan relokasi yang dibuat oleh pemerintah. Banyak dari mereka yang tidak tahu atau bersikap acuh terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Seperti hasil wawancara kepada salah seorang pedagang kaki lima yaitu Bapak Sutrisno Soleh yang kesehariannya berjualan pakaian anak-anak di GOR Delta. Beliau mengungkapkan bahwa dalam pemberian informasi, komunikasi yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tidak melibatkan keseluruhan Pedagang

melainkan hanya melalui ketua paguyuban maupun para pengurus paguyuban. Jika ada pedagang yang ikut dilibatkan untuk berdialog, itu merupakan pedagang kaki lima yang memang sudah sangat lama telah berjualan sebagai PKL.

Masih adanya beberapa pedagang kaki lima yang tidak mengetahui aturan-aturan yang berlaku meskipun telah direlokasi ke GOR Delta Sidoarjo meskipun dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo meskipun telah memberikan pengertian dan arahan baik berupa lisan maupun melalui tulisan. Hal inilah mengapa masih saja terdapat beberapa pedagang kaki lima yang justru kembali lagi berjualan secara sembunyi-sembunyi di seputaran Alun-alun maupun memilih untuk tidak menempati kawasan GOR Delta dan memilih untuk berjualan di daerah lain seperti halnya di kawasan Taman Pinang.

Bagi Para pedagang kaki lima yang tidak mau menempati tempat jualan di kawasan GOR Delta, yang mereka tahu yaitu terdapat tempat untuk berjualan di sisi jalan dan itu dianggap legal karena setiap hari terdapat retribusi. Tentang aturan lain seperti tempat yang tidak diperbolehkan untuk berdagang, batas penjualan dan sarana yang digunakan mereka tidak memahami. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, terdapat upaya komunikasi secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar seluruh pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat-tempat yang dilarang termasuk juga beberapa PKL yang masih secara sembunyi-sembunyi menggelar dagangannya untuk kembali dan dapat bergabung di tempat relokasi yakni di kawasan GOR Delta Sidoarjo.

Pada intinya, dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dibangun antar pihak didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya yakni melalui komunikasi dengan Tim Pembina Pedagang Kaki Lima, Pihak Swasta maupun dengan para pedagang kaki lima sendiri. Meskipun komunikasi yang dibangun didalam kebijakan relokasi PKL ke GOR telah dilakukan semaksimal mungkin, namun dalam hasil penelitian lapangan, peneliti masih menemukan ketidak sesuaian dimana masih terdapat beberapa pedagang yang mengaku tidak dilibatkan didalam dialog yang dilakukan bersama dengan pihak DLHK. Dalam dialog ataupun tatap muka, hanya beberapa PKL saja yang dilibatkan, itupun hanya seperti ketua paguyuban PKL serta para pengurus yang duduk didalam paguyuban. Kalaupun ada pedagang yang dilibatkan itupun jumlahnya tidak begitu banyak dan hanya para pedagang yang telah lama berjualan saja yang dilibatkan ketika ada dialog maupun tatap muka bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun jika ada dialog bersama dengan pemerintah. Para pedagang mengaku hanya didatangi oleh pihak dinas hanya sebatas untuk menarik uang iuran/retribusi tempat jualan. Ketidak sesuaian inilah yang menimbulkan masih adanya beberapa pedagang yang justru tidak mau menempati tempat jualannya di kawasan GOR Delta dan memilih untuk berjualan di tempat-tempat lain yang dianggap strategis dan ramai akan pengunjung.

## **b. Sumber daya**

Sumber daya Menurut Abidin (2002:131-132), merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia, dana (anggaran) diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran maupun peralatan yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas dimana kondisi ini dapat menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.

Dalam menunjang kegiatan pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun menuju ke GOR Delta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya ditunjang oleh sumber daya manusia tetapi juga ditunjang oleh sumberdaya anggaran. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima menuju ke GOR Delta Sidoarjo dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### **1.1 Sumber daya Manusia**

Berbicara tentang organisasi, menurut Abidin (2002:131-132) sama halnya berbicaranya tentang aspek kelembagaan yang didalamnya termasuk kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kondisi sumber daya manusia atau aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Sidoarjo berdasarkan jenis pendidikan serta jumlah pegawai yang terlibat dalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo.

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo saat ini justru lebih banyak dari pegawai yang hanya berlatar belakang pendidikan di tingkat SMA yakni 195, tingkat SLTP sebanyak 141 orang dan tingkat SD sebanyak 176. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai yang ada dalam lingkup DLHK masih belum sebanding dengan jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan dengan lulusan S2 maupun S1 yang masing-masingnya berjumlah 3 orang dan 27 orang. Hal senada juga yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengungkapkan bahwa keterbatasan dari jumlah pegawai yang ada di DLHK Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu faktor penentu didalam proses pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima untuk dipindahkan ke GOR Delta yang mana jumlah pegawai dari lulusan SMA, SLTP, dan SD masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai DLHK Sidoarjo dengan lulusan S1 maupun S2. Keterbatasan pada jumlah aparatur DLHK Sidoarjo membuat kontrol akan keberlangsungan kebijakan relokasi PKL ke GOR Delta tidak dapat dilakukan setiap saat maupun secara menyeluruh mengingat jumlah maupun kualitas SDM dari aparatur DLHK Sidoarjo masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan.

Dalam menutupi kekurangan akan jumlah pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima, Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai koordinator penertiban didalam merelokasikan para pedagang kaki lima baik didalam proses sosialisasi maupun proses relokasi para pedagang dari Alun-alun menuju ke GOR Delta. Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa baik pihak Satpol PP maupun pihak DLHK sama-sama memiliki kekurangan yakni minimnya sumber daya manusia yang perlu dilibatkan didalam mengawal berjalannya relokasi PKL ke GOR delta. Itu sebabnya menurut beliau, kerjasama dan komunikasi yang kuat antara kedua belah instansi merupakan salah satu jalan keluar didalam menentukan keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan relokasi PKL yang ada di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta.

Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga menambahkan bahwa didalam menutupi kekurangan dari SDM yang ada dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, baik sebelum maupun setelah melakukan relokasi selalu melakukan evaluasi secara internal didalam membenahi setiap kekurangan dalam menjalankan peraturan daerah yang didalamnya termasuk juga kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di kawasan Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo. Evaluasi secara internal dilakukan untuk membenahi setiap kekurangan maupun kekeliruan dalam setiap proses yang ada sesuai yang telah diamanatkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang



Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak terjadi singgungan dengan para pedagang kaki lima yang akan direlokasi ke GOR Delta.

Pada intinya, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan modal penting dalam menggerakkan atau menjalankan sebuah kegiatan ataupun kebijakan yang fungsinya adalah menggerakkan setiap kegiatan didalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan. Menurut Edward III (1980) dalam Widodo (2009:98) bahwa faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber-sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang terlibat baik dalam merencanakan maupun mengimplemetasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya melibatkan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan saja melainkan juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang berperan sebagai koordinator dalam penertiban dalam proses relokasi para pedagang yang ada di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo. Meskipun baik dari sisi jumlah maupun kemampuan aparatur dinilai masih kurang, DLHK maupun Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sama-sama melengkapi kekurangan aparatur yakni dengan bekerjasama didalam proses relokasi pedagang yang ada di alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo.

## 1.2 Sumberdaya Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, yang tersedia maka proses implementasi dilapangan akan lebih mudah dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia lebih sedikit maka kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Ketersediaan dana dalam mendukung keberlangsungan dari setiap kegiatan menurut Islamy (2009:57), merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, semakin banyak dana sangat berpengaruh terhadap penggunaan strategi dan cara-cara dalam implementasi kebijakan sehingga dengan tersedianya dana yang cukup maka implementasi akan dapat sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, akan tetapi jika dana yang tersedia kurang, cara-cara atau strategi implementasi kebijakan akan menyesuaikan besarnya jumlah dana yang tersedia dengan kata lain implementasi menyesuaikan jumlah dana yang tersedia.

Menurut wawancara peneliti bersama dengan Bapak Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, beliau mengemukakan bahwa hingga saat ini ketersediaan dana sudah tidak menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pra pedagang yang telah berdagang di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR, sebab setiap kegiatan yang dijalankan mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo. Ketersedian sumber daya finansial atau sarana prasarana yang mencukupi akan mendukung suatu

keberhasilan kebijakan dan juga ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan dapat diandalkan akan sangat menentukan keberhasilan program.

Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, dana yang digunakan memang bersumber dari APBD Sidoarjo dimana dalam melakukan proses relokasi, hal ini memang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo.

Pada intinya, dapat dikatakan bahwa sumber daya anggaran ikut menjadi penentu dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan. Ketersediaan dana dalam mendukung keberlangsungan dari setiap kegiatan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, semakin banyak dana sangat berpengaruh terhadap penggunaan strategi dan cara-cara dalam implementasi kebijakan sehingga dengan tersedianya dana yang cukup maka cara-cara dan strategi implementasi akan dapat sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, akan tetapi jika dana yang tersedia kurang, cara-cara atau strategi implementasi kebijakan akan menyesuaikan besarnya jumlah dana yang tersedia dengan kata lain implementasi menyesuaikan jumlah dana yang tersedia.

Dalam proses pengimplementasian kebijakan terkait dengan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun untuk dipindahkan ke kawasan GOR Delta, secara keseluruhan berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo hingga sejauh ini belum

menemukan hambatan yang berarti terkait dengan anggaran sebab berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua narasumber diatas mengungkapkan bahwa proses penyusunan kegiatan yang ada dalam kegiatan pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima disusun berdasarkan jumlah anggaran yang ada. hal ini memungkinkan setiap kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran dapat dilaksanakan secara penuh tanpa dihadapkan dengan persoalan akan terbatasnya anggaran.

### **c. Disposisi**

Pelaksanaan sebuah kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila pelaksana atau implementor dari kebijakan itu sendiri memiliki komitmen dan konsisten terhadap aturan main yang berlaku. Edwards III dalam Abidin (2002:131-133) mengungkapkan bahwa fokus utama dari studi implementasi adalah persoalan tentang bagaimana organisasi berperilaku, atau bagaimana orang berperilaku dalam mencapai tujuan organisasi. Kecenderungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkah laku dari pelaksana program yaitu petugas lapangan apakah mendukung atau bertentangan dengan program yang mereka sampaikan.

Terkait dengan implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo, pelaksana kebijakan yang dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta dibantu oleh aparatur daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dinilai oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai para pedagang kaki lima masih

belum mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya khususnya para aparaturnya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Bapak Nuryanto Wahid selaku masyarakat Kota Sidoarjo menuturkan bahwa meskipun kebijakan relokasi PKL telah dilaksanakan melalui dasar hukum yang jelas yakni melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo, namun hingga kini masih saja ada beberapa pedagang kaki lima yang secara sembunyi-sembunyi menggelar dagangannya di kawasan Alun-alun Sidoarjo ketika sore hari. Beliau menambahkan bahwa Para pedagang kaki lima yang kembali berjualan di Alun-alun lebih disebabkan karena masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DLHK maupun para petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja sehingga para pedagang masih dengan berani melakukan aktivitas jual beli disekitaran Alun-alun Sidoarjo.

Pendapat Bapak Nuryanto Wahid terkait dengan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DLHK maupun para petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja sehingga para pedagang masih dengan berani melakukan aktivitas jual beli disekitaran Alun-alun juga ditambahkan oleh Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang diwawancarai oleh peneliti pada saat narasumber tengah berkunjung ke kawasan Alun-alun Sidoarjo. Beliau mengungkapkan bahwa memang kondisi Alun-alun saat ini sudah tidak semerawut lagi sebelum para pedagang kaki lima direlokasikan ke GOR Delta namun berdasarkan pengalaman beliau selama mendatangi Alun-alun, masih ada juga beberapa pedagang asongan yang berjualan minuman dingin kepada para

pengunjung Alun-alun. Para pedagang ini akan pergi apabila mereka telah mengetahui ada petugas Satpol PP yang melakukan patroli keliling. Hal ini tentu dapat menimbulkan ketidak patuhan secara berkepanjangan dari para pedagang kaki lima meskipun kebijakan relokasi sendiri telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta para petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan juga menjelaskan bahwa hingga sejauh ini baik dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan beberapa keluhan terkait dengan masih adanya aktivitas berjualan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima disekitaran Alun-alun meskipun kegiatan para PKL sendiri telah dialihkan ke GOR Delta. Beliau mengungkapkan bahwa hingga kini, sanksi dan penertiban saja tidak akan cukup apabila para pedagang kaki lima sendiri tidak memiliki kesadaran dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa untuk pengamanan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pedagang lima memang belum begitu dilakukan setiap saat oleh para petugas Sapol PP mengingat beban kerja dan lokasi penertiban para pedagang kaki lima tidak hanya difokuskan di Alun-alun maupun di GOR Delta saja melainkan masih banyak titik pengamanan yang harus menjadi perhatian para petugas Satuan Polisi Pamong Praja didalam



menertibkan dan mengamankan setiap kegiatan yang digelar oleh para pedagang kaki lima. Beliau menambahkan bahwa kesadaran dari para pedagang kaki lima merupakan kunci keberhasilan agar kebijakan relokasi yang telah diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak yakni agar ketertiban dan keamanan dari Kabupaten Sidoarjo dapat lebih tertata dengan baik.

Terkait dengan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima, peneliti juga mewawancarai Bapak Sutrisno Soleh yang kesehariannya berjualan pakaian anak-anak. Beliau mengungkapkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh para pegawai dari DLHK maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo membuat kebijakan relokasi PKL kurang berjalan secara maksimal dan terkesan merugikan para pedagang yang telah direlokasi ke GOR Delta. Beliau menilai bahwa masih ada beberapa kegiatan yang digelar oleh para PKL di Alun-alun merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum serta ketidak tegasan para petugas didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada intinya, dapat dikatakan bahwa kecenderungan atau sikap dari pelaksana kebijakan didalam mendukung kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo, hal ini terlihat dari masih adanya beberapa pedagang yang masih menggelar dagangannya disekitaran Alun-alun meskipun pemerintah daerah telah merelokasikan segala aktivitas PKL ke GOR Delta. Baik masyarakat yang berprofesi sebagai PKL maupun beberapa masyarakat Kota Sidoarjo yang mengunjungi Alun-alun menilai bahwa masih adanya kegiatan

yang dilakukan oleh para PKL di sekitaran Alun-alun merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum maupun ketidak tegasan para aparaturnya didalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Edwards III dalam Abidin (2002:131-133) mengungkapkan bahwa aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Edward III dalam Widodo (2009:106) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif dikarenakan adanya ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, kepegawaian, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan luar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Melalui struktur birokrasi dan alur komando yang jelas tentu dapat memperkecil timbulnya permasalahan yang muncul oleh karena pelaksanaan kerjasama antara instansi yang terkait.

Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa masing-masing instansi khususnya yang tergabung dalam tim pembina PKL memiliki tugas dan tanggung jawab dan itu semua dilaksanakan dengan baik yakni melalui koordinasi dan komunikasi yang kuat didalam mendukung adanya kegiatan relokasi para pedagang kaki lima ke GOR Delta Sidoarjo baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Pembina PKL, dan masyarakat Sidoarjo sebagai sasaran dari adanya pengimplementasian kebijakan relokasi PKL.

Pendapat Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terkait dengan adanya struktur birokrasi maupun tugas dari masing-masing dinas dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL ke GOR Delta juga ditambahkan oleh Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang berkunjung ke Alun-alun. Beliau mengungkapkan bahwa masyarakat menganggap kurangnya kontrol dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan praktek jual beli yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun masih tetap saja berlangsung dimana adanya beberapa pedagang kaki lima yang begitu santainya melakukan kegiatan berjualan meskipun kawasan Alun-alun telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan tanpa pedagang kaki lima serta seluruh kegiatan PKL yang berada di Alun-alun secara tegas telah direlokasikan ke kawasan GOR Delta.

Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga memberikan tanggapan bahwa struktur birokrasi yang dibentuk didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL hingga sejauh ini telah tersusun dengan baik dimana masing-masing instansi memiliki tugas serta tanggung jawab yang berbeda didalam mendukung terlaksananya kebijakan relokasi PKL.

Pada intinya, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang dibentuk dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta Sidoarjo masih belum berjalan dengan baik. hal ini dapat dilihat dari masih adanya para pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun sidoarjo. Kurang maksimalnya kontrol dan pengawasan yang dilakukan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maupun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo membuat para pengunjung yang datang ke Alun-alun sedikit merasa terganggu dimana para pedagang kaki lima yang seharusnya telah direlokasi ke GOR Delta justru masih melakukan aktivitas berdagangnya disekitaran Alun-alun sidoarjo.

#### **4.3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Relokasi**

##### **Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo**

Abidin (2002:131-132) mengungkapkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tentu dihadapkan dengan adanya faktor penghambat. Fenomena pedagang kaki lima telah banyak menyita perhatian pemerintah. PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, merampas hak para pejalan kaki akibat digunakannya trotoar, dan tata ruang kota yang kacau. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bersikap tegas dalam menentukan kebijakan, namun dalam penegakan dan penertiban kebijakan pemerintah juga sangatlah sulit dikarenakan berbenturan dengan masalah kemanusiaan. Permasalahan PKL menjadi menarik, karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah. Disatu sisi PKL sering mengganggu lalu lintas dan tidak sesuai dengan tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai bayangan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang belum bisa disediakan pemerintah. Berikut ini adalah faktor penghambat yang muncul dalam proses pengimplementasian Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo.

##### **4.3.2.1 Keterbatasan Jumlah Aparatur DLHK Maupun Aparatur pada**

##### **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo**

Kegiatan relokasi bagi PKL merupakan kesulitan tersendiri bagi pemerintah. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan mereka pun

dipengaruhi aspek ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk menampung mereka agar dapat tertata. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sendiri melakukan relokasi bagi PKL dengan cara menyediakan tempat relokasi untuk para PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya yakni di kawasan GOR Delta Sidoarjo.

Abidin (2002:131-132) mengungkapkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan pengimplementasian sebuah kebijakan ikut ditentukan oleh faktor sumber daya. sumber daya disini yang dimaksudkan adalah ketersediaan akan sumber daya manusia sebagai sumber daya utama dalam sebuah proses perencanaan, penyusunan strategi, hingga pada tahap implementasi. Berdasarkan data hasil penelitian, jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun menuju ke GOR Delta Sidoarjo saat ini justru lebih banyak dari pegawai yang hanya berlatar belakang pendidikan di tingkat SMA yakni 195, tingkat SLTP sebanyak 141 orang dan tingkat SD sebanyak 176. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai yang ada dalam lingkup DLHK masih belum sebanding dengan jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan dengan lulusan S2 maupun S1 yang masing-masingnya berjumlah 3 orang dan 27 orang. Hal senada juga yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Rochjadi Hafiluddin selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengungkapkan bahwa keterbatasan dari jumlah pegawai yang ada di DLHK Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu faktor penentu didalam proses



pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima untuk dipindahkan ke GOR Delta yang mana jumlah pegawai dari lulusan SMA, SLTP, dan SD masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai DLHK Sidoarjo dengan lulusan S1 maupun S2. Keterbatasan pada jumlah aparatur DLHK Sidoarjo membuat kontrol akan keberlangsungan kebijakan relokasi PKL ke GOR Delta tidak dapat dilakukan setiap saat maupun secara menyeluruh mengingat jumlah maupun kualitas SDM dari aparatur DLHK Sidoarjo masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan.

Terkait dengan kurangnya aparatur yang terjun didalam pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo, Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Penedalihan satuan polisi pamong praja kabupaten sidoarjo juga mengungkapkan bahwa keterbatasan aparatur tidak hanya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melainkan juga pihak Satuan Polisi Pamong Praja sendiri mengalami kekurangan pegawai yang diterjunkan didalam melakukan relokasi hingga pada pengawasan kegiatan pedagang kaki lima yang baik itu di GOR Delta maupun para pedagang kaki lima yang kembali berjualan di Alun-alun Sidoarjo. jumlah pegawai DLHK maupun pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, maka dapat dikatakan perlu untuk ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun dari latar belakang pendidikan pegawai dalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Pada intinya, dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia merupakan modal penting dalam menggerakan atau menjalankan sebuah kegiatan ataupun

kebijakan yang fungsinya adalah menggerakan setiap kegiatan didalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan. Adanya hambatan terkait dengan jumlah maupun kemampuan aparatur pada Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan maupun pada satuan polisi pamong praja di kabupaten sidoarjo tentu akan berpengaruh terhadap proses pengimplementasian kebijakan relokasi yang akan datang. Keterbatasan pada jumlah aparatur membuat kontrol dan pengawasan terhadap pengimplementasian kebijakan relokasi pada pedagang kaki lima baik yang berada di kawasan GOR Delta maupun di kawasan alun-alun tidak dapat dilakukan setiap saat mengingat jumlah dan cakupan wilayah kerja dari masing-masing instansi tidak hanya terpusat pada penanganan masalah PKL melainkan juga menangani masalah sosial lain berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4.3.2.2 Rendahnya Kesadaran Para Pedagang Kaki Lima Untuk Menaati Hukum**

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin banyak di Kabupaten Sidoarjo dan masih kurang tertata rapi dan menimbulkan kesan semrawut menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo agar keberadaannya tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kenyamanan, keamanan, dan kemacetan lalulintas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo dengan masud dan tujuan agar dengan diimplementasikannya kebijakan relokasi pedagang kaki lima yakni yang

berada di Alun-alun untuk dipindahkan ke GOR Delta dapat menjadi alat bagi pemerintah daerah didalam menata dan menertibkan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima pada tempat-tempat umum yang tidak diperuntukan untuk kegiatan berdagang. tentunya dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima yang ada di kaabupaten sidoarjo perlu didukung sesuai dengan prosedur pelaksanaannya agar hasilnya dapat sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan dan dipindahkan ke GOR Delta belum sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini.

Dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima, Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan maupun pada satuan polisi pamong praja di kabupaten sidoarjo masih menjumpai kendala-kendala dimana menurut Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengedalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo bahwa kendala yang dijumpai salah satunya yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Beliau mengemukakan bahwa rendahnya kesadaran para PKL akan aturan hukum yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima justru menjadi tugas terberat sebab beliau menambahkan bahwa hingga sejauh ini, berbagai cara telah dilakukan diantaranya yakni dengan melakukan dialog, menggelar sosialisasi, serta memberikan sanksi bagi para PKL yang masih berjualan di kawasan alun-alun masih belum mampu mebuat para PKL menjadi jerah.

Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Bapak Willy Radityo, SP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ir. Anas Budi Utama selaku Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga mengungkapkan bahwa menurut pengamatan serta keluhan yang masuk dari masyarakat, kesadaran dari para pedagang kaki lima yang masih saja menggelar dagangannya disekitaran alun-alun masih menjadi sebuah perhatian serius oleh seluruh instansi yang tergabung dalam tim pembina pedagang kaki lima. Beliau menilai bahwa DLHK dan dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo meskipun telah mengambil tindakan tegas, namun masih saja ada beberapa oknum PKL yang tidak menghiraukan larangan untuk berjualan kembali di sekitaran alun-alun meskipun telah diberikan teguran, peringatan tertulis hingga pada pemberian sanksi administrasi yang berupa membayar denda apabila tetap melakukan kegiatan jual beli disekitaran alun-alun. Sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dari PKL yang masih berjualan meskipun sering mendapatkan teguran maupun sanksi, beliau menjelaskan bahwa pihaknya akan secara terus menerus berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja maupun bersama dengan instansi terkait yang tergabung dalam tim pembina PKL untuk melakukan evaluasi terkait dengan kekurangan dari pengimplementasian kebijakan relokasi para pedagang kaki lima yang masih tetap bandel untuk berjualan di alun-alun sidoarjo.

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan dilapangan terkait dengan kesadaran para pedagang kaki lima untuk menaati hukum, DLHK dan dibantu oleh Satpol PP

Kabupaten Sidoarjo meskipun telah mengambil tindakan tegas, namun masih saja ada beberapa oknum PKL yang tidak menghiraukan larangan untuk berjualan kembali di sekitaran Alun-alun meskipun telah diberikan teguran, peringatan tertulis hingga pada pemberian sanksi administrasi yang berupa membayar denda apabila tetap melakukan kegiatan jual beli disekitaran Alun-alun. Sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dari PKL yang masih berjualan meskipun sering mendapatkan teguran maupun sanksi. Sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dari PKL yang masih berjualan meskipun sering mendapatkan teguran maupun sanksi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo akan secara terus menerus berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja maupun bersama dengan instansi terkait yang tergabung dalam tim pembina PKL untuk melakukan evaluasi terkait dengan kekurangan dari pengimplementasian kebijakan relokasi para pedagang kaki lima yang masih tetap bandel untuk berjualan di Alun-alun Sidoarjo.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke kawasan GOR Delta Sidoarjo merupakan mekanisme pemerintah daerah dalam menertibkan dan menata kegiatan perdagangan para PKL yang dibagi kedalam 3 bagian proses yakni Sosialisasi dan Pendataan, Penetapan Lokasi Usaha, serta Kegiatan Pembinaan bagi para pedagang yang telah direlokasi ke GOR Delta Sidoarjo. SDM yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan relokasi PKL melibatkan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Pembina PKL, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pihak Swasta, dan Ketua Paguyuban PKL.
2. Disposisi didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun ke kawasan GOR Delta Sidoarjo saat ini belum berjalan dengan baik dimana masih terlihat adanya kegiatan berjualan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh para PKL, Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun ke kawasan GOR Delta Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan kegiatan koordinasi serta adanya pembentukan tim pembina PKL yang beranggotakan beberapa Organisasi Pemerintah Daerah. Faktor penghambat yang muncul dalam proses pengimplementasian kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun ke kawasan GOR



Delta Sidoarjo yakni keterbatasan jumlah SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo serta rendahnya kesadaran para pedagang kaki lima untuk menaati hukum.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah daerah Sidoarjo yang dalam hal ini DLHK serta Satpol PP perlu meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap masih adanya aktivitas berjualan yang dilakukan oleh beberapa PKL di kawasan Alun-alun Sidoarjo. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan petugas jaga secara bergantian serta pos jaga selama 24 jam didalam melakukan pengawasan agar tidak ada lagi para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan berjualan di kawasan Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.
2. Sebagai upaya peningkatan pengawasan dan kontrol, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satuan Polisi Pamong Praja termasuk juga seluruh Organisasi Pemerintah Daerah yang ditunjuk didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL seharusnya mampu melibatkan peran dari masyarakat dalam melakukan kontrol. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kontak saran ataupun membuka layanan pengaduan yang dapat diakses melalui nomor hp ataupun melalui aplikasi pesan online (*Line* atau *W'A*) sebagai sarana penyampaian keluhan dari implementasi kebijakan relokasi PKL.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifianto, Dessy. 2006. *Kajian Interaksi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Perdagangan*. Jakarta : Alex Media Komputindo.
- Budihardjo, Eko, 1997, *Tata Ruang Perkotaan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Dimara, Doan. 1979. *Pedagang Kaki Lima di Jakarta*. Jakarta: PLIIS-FIS-UI.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Herawati, Agustin Yani. 2007. *Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal. Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi. Aksara: Jakarta.
- Jawa Pos : Sidoarjo, Edisi hari senin tanggal 11 Juli Tahun 2017-*PKL Meraja, Bahu Jalan di jarah*. Tahun 2017
- Kartono, dkk. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung. Universitas Katholik Parahiyangan.
- Kurniadi dan Tangkilisan. 2002. *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. Yogyakarta: YPAPI.
- Miles, Matthew B., Michael Huberman, dan Johny Saldana . 2014. *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourchebook Edition 3* . USA: Sage Publication Ltd.
- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Dwidjowijoto. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta : Alex Media Komputindo.

- Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta:Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung:Alfabeta.
- Sobandi, Baban, dkk. 2005. *Desentralisasi danTuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Humaniora, Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tjokroamidjojo,Bintoro.1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan:Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Widjaja, Haw 2005. *Penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dalam rangka sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: PT. Raja grafindo persada.
- Widodo. Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi analisis kebijakan publik*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Cetakan. Kedua, CAPS, Yogyakarta.
- <http://radarjatim-seputarsidoarjo.co.id:2017> diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pada pukul 21.15
- ([www.mediacenter.sidoarjo.go.id](http://www.mediacenter.sidoarjo.go.id)) diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pada pukul 19.45

# LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1****Daftar Pertanyaan Penelitian Melalui Wawancara**

1. Latar belakang dari pelaksanaan kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ? apakah ada faktor lain selain yang melatar belakangi adanya pelaksanaan kebijakan ini selain yang bapak sebutkan ?
2. Seperti apa tujuan, manfaat, dan sasaran yang ingin dicapai oleh dinas dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan ini ?
3. Hingga saat ini apakah terdapat penolakan dari masyarakat yang dalam hal ini berprofesi sebagai PKL terhadap pelaksanaan Relokasi?
4. Apakah ada uang pengganti yang disediakan oleh dinas bagi para PKL yang di relokasi dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ?
5. Selain dinas kebersihan dan lingkungan hidup serta satpol pp kabupaten sidoarjo, apakah ada pihak lain yang juga ikut dilibatkan dalam kegiatan relokasi PKL ?
6. Adakah dana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo dalam mendukung kegiatan operasional dinas untuk melakukan relokasi para PKL dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ? jika ada, berapa besaran biaya yang dianggarkan ?
7. Apakah masyarakat yang berprofesi sebagai PKL telah diberikan informasi terlebih dahulu baik dengan memberikan surat atau menyampaikan secara lisan terkait dengan adanya kegiatan relokasi dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ?
8. Seperti apa sajakah bentuk perlawanan para PKL terhadap kebijakan relokasi dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ?
9. Seperti apa harapan bapak kedepan dari pelaksanaan kebijakan relokasi dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ?
10. Apakah ada tim khusus yang dibentuk oleh dinas dalam menganani kegiatan relokasi PKL dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ?

11. Berapa banyak jumlah PKL yang direlokasi oleh Dinas dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ?
12. Apakah hingga kini masih ada para PKL yang berjualan di sekitaran alun-alun sidoarjo ?
13. Bagaimana pendapat bapak tentang kondisi awal alun-alun sidoarjo sebelum diadakan kegiatan relokasi ke GOR sidoarjo ?
14. Dalam meningkatkan peran dan kinerja, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan oleh dinas dalam menata kegiatan PKL di sidoarjo selain melalui adanya kegiatan relokasi?
15. Menurut Bapak, Apa saja kendala terbesar didalam menjalankan kebijakan relokasi dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ?
16. Apakah ada kegiatan ataupun pembinaan yang difasilitasi oleh dinas didalam meningkatkan kesadaran dari para PKL untuk lebih memperhatikan juga keteraturan dan ketertiban umum ?
17. Apasaja keluhan yang disampaikan oleh para PKL yang berjualan di seputaran GOR Sidoarjo setelah direlokasi dari Alun-Alun ?
18. Menurut Bapak, apakah situasi dan kondisi di GOR sidoarjo telah memungkinkan untuk dilakukan relokasi dari Alun-alun Sidoarjo ? kalau belum memungkinkan, mengapa kegiatan relokasi ini tetap dilakukan ?
19. Apasaja fasilitas-fasilitas maupun sumberdaya yang dimiliki oleh dinas didalam mendukung dan menjalankan kebijakan terkait dengan kegiatan relokasi yang ada di Kota Sidoarjo ?
20. Hingga sejauh ini, Apakah hingga kini ada petugas dari dinas yang mengeluhkan pelaksanaan kegiatan relokasi yang ada di lapangan ?



21. Menurut bapak, apakah kondisi keuangan maupun sumberdaya manusia yang dimiliki oleh dinas telah cukup dan mampu untuk menangani persoalan PKL yang ada di Sidoarjo ?
22. Seperti apa harapan bapak nantinya dan apa saja hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah maupun oleh dinas didalam melakukan penataan maupun kegiatan relokasi para PKL yang ada di kabupaten sidoarjo ?
23. Jika melihat perkembangan hingga saat ini, menurut bapak apakah kegiatan relokasi para PKL telah memberikan manfaat yang berarti bagi pengaturan kota maupun ketertiban umum di sidoarjo ?
24. Apakah terdapat kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh dinas sesaat setelah melakukan kegiatan PKL dalam melaksanakan kebijakan relokasi dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ? jika ada, siapa saja pihak yang dilibatkan dan siapa saja pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan evaluasi ini ?
25. Bagaimanakah pendapat bapak terkait dengan masih adanya tindak kekerasan terhadap para PKL yang dilakukan oleh para petugas ketika melakukan relokasi dari Alun-Alun ke GOR Sidoarjo ?

## LAMPIRAN 2



**Peneliti sedang Mewawancarai Bapak Ir Rochjadi Hafiluddin, selaku Seksi  
Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**





**Peneliti sedang mewawancarai Bapak Willy Radtyo S.STP selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Sidoarjo**





**Lokasi Penelitian yakni pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**



### LAMPIRAN 3



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Kombes Pol. M. Duryat No. 62 Telepon (031) 8942904  
SIDOARJO – 61218

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800 / 1842 / 404.5.5/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASFIATUL HANIFAH, SP  
NIP : 19680922 199603 2 001  
JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
ALAMAT : Jl Kombes Pol M Duryat No 62 - Kabupaten Sidoarjo

Dengan ini Menerangkan :

Nama : FANDI EKA ARDIANTO  
NIM : 135030107113032  
Jurusan : Administrasi Publik Universitas Brawijaya  
Alamat : Jl. Letjend Suprpto II/ 25 B  
Kel/Ds. Burengan RT 01 Rw 09 Kota Kediri

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan wawancara dan permintaan data. Pelaksanaan survei tersebut antara tanggal 18 oktober s/d 18 Nopember 2017

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

a.n KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SIDOARJO  
Subbag Umum dan Kepegawaian



ASFIATUL HANIFAH, SP

Penata

Nip. 16680922 199603 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran ☎ (031) 8963184, 8946551 Fax (031) 8946551

**SIDOARJO - 61252**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/319/404.5.10/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARINDRA DJAJATI, SH, MM  
NIP : 19591230 198603 2 014  
Jabatan : Sekretaris  
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo

Menerangkan bahwa:

Nama : FANDY EKA ARDIANTO  
NIM : 135030107113032  
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Administrasi Universitas Brawijaya Malang  
Alamat : Jl. Letjend Suprpto II/25 B Desa Burengan RT. 003 RW. 009 Kecamatan Pesantren Kota Kediri  
Judul : Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo "Studi pada Relokasi PKL dari Alun – Alun ke GOR Sidoarjo

telah melaksanakan ijin penelitian mulai tanggal 18 Oktober s/d 18 Nopember 2016.

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 18 Nopember 2017

An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KABUPATEN SIDOARJO

Sekretaris



**HARINDRA DJAJATI, SH, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19591230 198603 2 014





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 15643 UN10.F03.11.11 / P11 / 2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo  
Jalan Raya Siwalanpanji No. 36, Buduran  
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Fandy Eka Ardianto

Alamat : Jl. Letjend Suprpto 2 No.25 B, Kel. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri

NIM : 135030107113032

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Relokasi PKL Alun-alun ke GOR Delta Sidarjo)

Lamanya : 1 (satu) bulan.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Oktober 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, MSI

NIP.19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id)

Nomor : 156<sup>43</sup> / UN10.F03.11.11 / P / 2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

Jalan Kombespol Mohammad Duriyat No. 62

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Fandy Eka Ardianto

Alamat : Jl. Letjend Suprpto 2 No.25 B, Kel. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri

NIM : 135030107113032

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Relokasi PKL Alun-alun ke GOR Delta Sidarjo)

Lamanya : 1 (satu) bulan.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Oktober 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



**Dr. Lely Indah Mindarti, MSI**

NIP.19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU







**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 15693/UN10.F03.11.11 / PU / 2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur  
Jalan Putat Indah No. 1, Putat Gede, Sukomanunggal  
Kota Surabaya, Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Fandy Eka Ardianto

Alamat : Jl. Letjend Suprpto 2 No.25 B, Kel. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri

NIM : 135030107113032

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Relokasi PKL Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo)

Lamanya : 1 (satu) bulan.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Oktober 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



**Dr. Lely Indah Mindarti, MSI**

NIP.19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



**LAMPIRAN 4****CURRICULUM VITAE**

Nama : Fandy Eka Ardianto  
NIM : 135030107113032  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 09 Desember 1993  
Nomor Hp : 082233940894  
Email : fandyeka12@gmail.com  
Alamat Asal : Jl. Letjend Suprpto 2 No 25 B, Kel. Burengan, Kec.  
Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur  
Agama : Islam

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Formal :

- |    |                      |                    |
|----|----------------------|--------------------|
| a. | SD Banjaran 3 Kediri | Lulusan Tahun 2006 |
| b. | SMP Negeri 7 Kediri  | Lulusan Tahun 2009 |
| c. | SMA Negeri 8 Kediri  | Lulusan Tahun 2012 |

Publikasi-publikasi atau

Karya Ilmiah : -